



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

LAPORAN TAHUNAN 2020 ANNUAL REPORT

www.lancartamasejati.com

GET IN TOUCH

Wisma Lancartama
Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B
Gunung - Kebayoran Baru
Jakarta - 12120

T: +62 21 739 2222 - Office
F: +62 21 2751 0724 - Fax
E: info@lancartamasejati.com



2020

Laporan Tahunan Annual Report

Premium Quality is Our Priority

PT LANCARTAMA SEJATI, TBK

MENJAWAB TANTANGAN DENGAN KONSISTENSI

Optimisme Lancartama yang semakin menguat di akhir 2019 harus menghadapi fakta adanya pandemi global yang melanda tanah air sehingga terjadi keterlambatan dan penundaan sejumlah proyek infrastruktur. Kondisi tersebut sedikit telah membuat target kinerja Lancartama di tahun 2020 menjadi jauh lebih menantang.

Namun Lancartama menjawab tantangan tersebut dengan konsistensi. Sinergi yang baik serta komunikasi yang transparan di dalam jajaran Manajemen maupun antar karyawan terus menerus ditingkatkan. Kualitas produk properti yang dibangun Lancartama tetap dijaga.

Sebagai perusahaan terbuka, Lancartama senantiasa mengambil kebijakan secara hati-hati berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang terbaru. Alhasil dalam kondisi seperti ini Lancartama tetap bertahan tanpa adanya pengurangan pegawai bahkan berhasil mendapat pelanggan baru.

Lancartama tetap optimistis bahwa apa yang telah dirintis dan dilakukan secara konsisten akan membuahkan pertumbuhan yang stabil sehingga di masa depan Lancartama dapat menjadi perusahaan konstruksi yang diperhitungkan kiprahnya secara nasional dan Internasional.

RESPONDING TO CHALLENGES WITH CONSISTENCY

Lancartama's optimism, despite continuing to strengthen towards the end of 2019, must face the fact that a global pandemic has hit the country, causing delays and postponements in a number of infrastructure projects. These conditions have brought challenges in achieving Lancartama's performance target in 2020.

But Lancartama responded to the challenge with consistency. Good synergy and transparent communication within management and among employees are continuously improved. The high quality of properties built by Lancartama was continuously maintained.

As a public company, Lancartama always apply policies prudently based on the principles of Good Corporate Governance (GCG) and continuously adhering to the latest government regulations. As a result, despite such conditions, Lancartama was able to keep its employees and even managed to gain new customers.

Lancartama remains optimistic that what has been initiated, if performed consistently will produce stable growth so that in the future Lancartama can become the construction company that is known for its quality of work both nationally and internationally.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Daftar Isi <i>Table of Contents</i>	1	Laporan Direksi <i>Board of Directors' Report</i>	26
Profil Perusahaan <i>Company Profile</i>	2	Informasi Saham <i>Shares Information</i>	29
Visi Misi <i>Vision & Mission</i>	6	Peristiwa Penting <i>Milestones</i>	31
Ikhtisar Keuangan <i>Financial Highlights</i>	7	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i>	33
Lembaga Penunjang Pasar Modal <i>Capital Market Supporting Institutions</i>	9	Analisa & Pembahasan Manajemen <i>Management Discussion & Analysis</i>	39
Profil Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Profile</i>	18	Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance</i>	46
Profil Direksi <i>Board of Directors' Profile</i>	20	Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 <i>Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report</i>	74
Laporan Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Report</i>	23	Laporan Keuangan 2020 <i>Financial Report 2020</i>	75



PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

Nama Perusahaan
Company Name

PT Lancartama Sejati Tbk

Tipe Perusahaan
Company Type

Perseroan Terbatas
Limited Liability Company

Tanggal Berdiri
Established on

1 Juni 1990
1 June 1990

Akta Pendirian No. 12 tanggal 1 Juni 1990, yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 02-24854.HT.01.01.TH.93 tanggal 19 Juni 1993 ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Berita Acara Perseroan No. 39 tanggal 11 September 2008 yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-77984.AH.01.02. TAHUN 2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100719.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Oktober 2008.

Deed of Establishment No. 12 dated 1 June 1990, made before Sugiri Kadarisman, S.H. Notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. 02-24854.HT.01.01.TH.93 dated 19 June 1993 ("Deed of Establishment").

Bidang Usaha
Business Field

Kegiatan usaha yang
dijalankan
Business activities

Alamat
Address

The Deed of Establishment was adjusted to the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies through the Deed of Minutes of the Company No. 39 dated 11 September 2008 made before Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notary in Jakarta and has obtained the approval from Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-77984.AH.01.02.TAHUN 2008 dated 24 October 2008 and has been registered in the Register of Companies No. AHU-0100719.AH.01.09.Tahun 2008 dated 24 October 2008.

Jasa Konstruksi dan Penyewaan Ruang Kantor dan Hunian
Construction Service and Leasing of Office and Residential Spaces

Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, Gedung Perkantoran, Gedung Industri, Gedung Perbelanjaan, Gedung Lainnya, Hotel Bintang Tiga, Hotel Bintang Dua, Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa.

Construction of Residential Buildings, Office Buildings, Industrial Buildings, Shop Buildings, Other Buildings, Three-Star Hotels, Two-Star Hotels, Provision of Other Short-Term Accommodation, Owned or Leased Real Estate.

*JL Pakubuwono VI No. 99 A-B Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta, 12120
Telepon: (021) 739 2222; Faksimili: (021) 2751 0724
Email: info@lancartamasejati.com
Website: www.lancartamasejati.com*

VISION & MISSION

VISI VISION

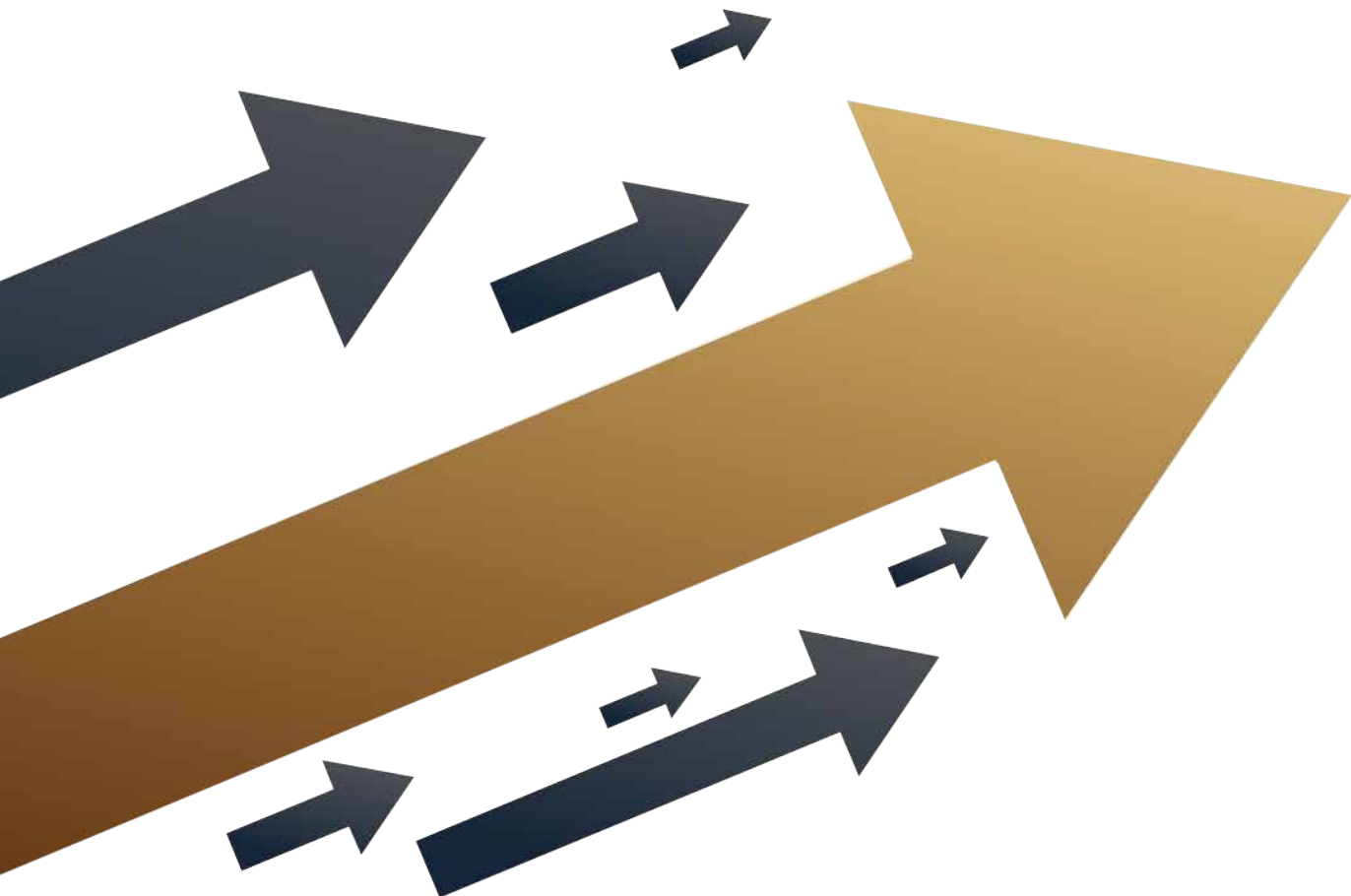
Menjadi perusahaan konstruksi yang terbaik berlandaskan layanan yang berkualitas sehingga selalu memberikan hasil pekerjaan berskala premium dengan harga bersaing pada setiap proyek yang kami kerjakan.

To become the best construction company based on quality services and always deliver premium-scale work result at competitive price on every project we undertake.

MISI MISSION

Dengan fondasi yang dibangun dari kepuasan pelanggan, kami bertujuan untuk menjadi kontraktor internasional terkemuka yang berfokus pada industri kontraktor umum, infrastruktur, perkebunan dan pengembangan.

With a foundation built on customer satisfaction, we aim to become a leading international contractor focused on general contractor, infrastructure, plantation and property development industries.





IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

IKHTISAR KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHTS

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN	2020	2019	2018	FINANCIAL STATEMENT
Pendapatan	25.376.583	41.432.210	57.221.798	Revenue
Beban Pokok Penjualan	(14.321.377)	(23.729.239)	(38.656.641)	Cost of Goods Sold
Laba Kotor	11.055.206	17.702.971	18.565.157	Gross Profit (Loss)
Laba Operasi	5.226.907	10.704.031	11.790.548	Operating Profit (Loss)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	-4.045.225	1.587.817	3.681.309	Profit (Loss) Before Income Tax
Laba (Rugi) Komprehensif	-3.886.065	1.512.511	3.627.102	Total Comprehensive Income (Loss)
POSISI KEUANGAN	2020	2019	2018	FINANCIAL POSITION
Aset Lancar	13.318.573	19.088.594	40.435.759	Current Assets
Aset Tidak Lancar	155.384.724	117.931.785	64.488.460	Non-Current Assets
Total Aset	168.703.297	137.020.379	104.924.218	Total Assets
Liabilitas Jangka Pendek	69.689.655	59.529.218	48.315.407	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	49.095.952	55.016.514	45.394.675	Non-Current Liabilities
Total Liabilitas	118.785.607	114.545.731	93.710.083	Total Liabilities
Total Ekuitas	49.917.690	22.474.647	11.212.136	Total Equity
RASIO KEUANGAN	2020	2019	2018	FINANCIAL RASIO
Margin Laba Kotor	43,56%	42,73%	32,44%	Gross Profit Margin
Margin Laba Komprehensif	(15,3%)	3,65%	6,34%	Net(Loss) Profit Margin
Rasio Lancar	19,11%	32,07%	83,69%	Current Ratio
Rasio Total Utang Terhadap Ekuitas (X)	2,38	5,10	8,36	Debt to Equity Ratio (x)
Rasio Total Utang Terhadap Aset (X)	70,41%	83,60%	89,31%	Debt to Assets Ratio (x)



LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

**Capital Market Supporting Professionals And Institutions
And Other Parties**

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONALS AND INSTITUTIONS AND OTHER PARTIES

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

The Capital Market Supporting Professionals and Institutions that were instrumental in this Public Offering are as follows:

Akuntan Publik
Public Accountant

KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
The Royal Palace
18 Office Park Tower A, 20th floor
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta 12520

Telp. (021) 8313861
Fax. (021) 8313871

Nama Rekan
Partner Name :
Adeyana Widjaja, CPA

Nomor STTD
STTD Number :
STTD.AP-187/PM.22/2018

Tanggal STTD
STTD Date : 05 Februari 2018
05 February 2018

Keanggotaan Asosiasi
Association Membership :

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Nomor Keanggotaan IAPI
IAPI Membership Number :
1957

Pedoman Kerja

Work Guidelines

:

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK dan ISAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik

Financial Accounting Standards in Indonesia (PSAK and ISAK), Professional Standards for Public Accountants (SPAP), Code of Ethics for Public Accountants

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

The main duties of Public Accountant in this Public Offering is to conduct an audit based on auditing standards set by IAPI. These standards require public accountants to plan and conduct audit in order to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on the basis of testing, gathering evidence to support the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.

Konsultan Hukum
Legal Consultant

Ery Yunasri & Partners
Prosperity Tower 12th Floor, Suite 12F
District 8, SCBD Lot. 28,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
12190
Telp. (021) 2793 4825
Fax. (021) 2793 4626
Nama Rekan / *Partner Name* :
Santo Marseilla Arianto, S.H., M.M
Nomor STTD / *Registration Number* :
STTD.KH-186/PM.2/2018
Tanggal STTD / *Registration Date* :
1 Agustus 2018 / 1 August 2018
Asosiasi / *Association* :
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
(HKHPM) / Capital Market Legal Consultant
Association (HKHPM)
Pedoman Kerja / *Work*
Guidelines : *Standar*
Profesi Himpunan Konsultan Hukum
Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana
dinyatakan dalam keputusan HKHPM
No. KEP/01/HKHPM/II/2014 tanggal 4
Februari 2014. / Professional Standards
of the Capital Market Legal Consultant
Association (HKHPM) as stated in the Decree
of HKHPM No. KEP/01/HKHPM/II/2014 dated
4 February 2014.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat

Notaris
Notary

Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

The main duties of Legal Consultant in this Public Offering is to conduct an independent legal review, in accordance with norms or Professional Standards and the legal consultant code of ethics and to provide a legal review report on facts available on the Company as submitted by the Company to the Legal Consultant. The results of the Legal Consultant's review have been published in the Due Diligence Report from Legal Aspect which forms an explanation of the Company and becomes the basis and an integral part of the Legal Opinion which is given objectively and independently.

F.R.Limpele, S.H
Delta Building Blok A/16
Jl. Suryopranoto 1-9, Gambir
Jakarta Pusat 10160
Telp. 021-3800269
Fax. 021-3801684
Nomor STTD / *Registration Number* :
STTD.N-167/PM.223/2019
Tanggal STTD / *Registration Date* :
07 Januari 2019 / *07 January 2019*
No. Asosiasi / *Association Number* :
Ikatan Notaris Indonesia 1454919651019
/ Indonesian Notary Association
1454919651019
Pedoman Kerja / *Work Guidelines* :
Undang-Undang Republik Indonesia No.
2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris / *Laws of Republic*
of Indonesia No. 2 of 2014 on Amendments
to Law Number 30 of 2004 concerning the
Notary Office

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini antara lain adalah

Biro Administrasi Efek
*Securities Administration
Bureau*

membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum ini, antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

The scope of duties of Notary as a supporting profession in this Public Offering include recording deeds relating to this Public Offering, including the Amendment to the Company's Articles of Association, Securities Issuance Guarantee Agreement and Share Administration Management Agreement.

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Boutique Office, Blok F3 No. 5,
Jl Kirana Avenue III – Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250
Telp. (021) 29745222
Fax. (021) 29289961
KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September
2014
Asosiasi Biro Administrasi Efek
Indonesia (ABI) / *Association of Securities
Administration Bureau Indonesia (ABI)*
ABI/III/2015-012

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa DPPS dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan

aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan SKS, apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The scope of duties of SAB in this Public Offering, in accordance with the applicable Professional Standards and Capital Market Regulations, includes the acceptance of share orders in the form of DPPS and Share Order and Purchase Form (FPPS) that has been completed along with the documents required in the share purchase order and has received the approval from Underwriter as an order submitted for share allotment, as well as administering orders and purchasing shares in accordance with the application available at the Registrar. The Underwriters, together with SAB, have the right to refuse orders that do not meet the prevailing order requirements. In the event of an order that exceeds the number of Shares Offered, SAB carries out an allotment process according to the allotment formula set by the Allotment Manager, prints FKPS and prepares an allotment report. SAB is also responsible for issuing SKS, if required, and preparing Initial Public Offering report in accordance with the applicable regulations.

Penilai Publik
Public Appraiser

KJPP Felix Sutandar & Rekan
Jl. Balikpapan I No. 6
Jakarta Pusat 10130
Telp. (021) 6385 1341/42/43
Fax. (021) 6385 1340
Nama Rekan / *Partner Name* :
Felix Sutandar, MSc.
Nomor STTD / *Registration Number* :
STTD.PPB-31/PM.2/2018
Tanggal STTD / *Registration Date* :
30 Agustus 2018 / 30 August 2018
Pedoman Kerja / *Work Guidelines*:
Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) &
Standar Penilai Indonesia (SPI) Edisi VII
Tahun 2018. / *Indonesian Appraisers Code
of Ethics (KEPI) & Indonesian Appraisal
Standards (SPI) Edition VII of 2018*

Tugas utama dari Penilai Publik dalam rangka Penawaran Umum ini meliputi pemeriksaan fisik secara langsung di masing-masing lokasi, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar dari aktiva tetap yang dimiliki Perseroan.

The main duties of Public Appraiser in this Public Offering is to conduct on-site physical inspection at each location, analyzing data to determine the market value of fixed assets owned by the Company.



PROFIL DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Board of Commissioners' and Directors' Profile

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE

Warga Negara Indonesia, usia 49 tahun.
Beliau menempuh pendidikan di SMA Spes Patriae, pada tahun 1990.
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak bulan 2019.

Sebelumnya beliau bekerja sebagai Marketing di PT Astra International Tbk sejak tahun 1990 sampai 2006. Setelah itu, Beliau bekerja sebagai General Manager di PT Mentari Advertising sejak tahun 2006 sampai 2008. Beliau kemudian melanjutkan karirnya sebagai General Marketing Sales di Sanny Auto Gallery sejak tahun 2008 sampai 2019.

*Indonesian citizen, 49 years old.
He graduated from SMA Spes Patriae, in 1990.
Appointed as President Commissioner of the Company since 2019.*

Started his career as Marketing at PT Astra International Tbk from 1990 to 2006. Following that, he became the General Manager at PT Mentari Advertising from 2006 to 2008. He then pursued his career as General Marketing Sales at Sanny Auto Gallery from 2008 to 2019.



DJAJA JULIA SUPENA
KOMISARIS UTAMA
| PRESIDENT COMMISSIONER



RIZKA ALFRINA
KOMISARIS INDEPENDEN
| INDEPENDENT
COMMISSIONER

Warga Negara Indonesia, usia 32 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Ekonomi dari Universitas STIE Adhy Niaga, Jakarta, pada tahun 2011. Meraih gelar Sarjana dari The London School of Public Relation jurusan Public Relation pada tahun 2011. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019.

Memulai karir di PT Trijaya Pratama Futures pada tahun 2010 sampai 2012 sebagai Account Executive. Setelah itu, beliau melanjutkan karir di PT Midtou Aryacom Futures pada tahun 2013 sampai 2014 sebagai Sales Manager. Beliau kemudian melanjutkan karir di PT Millenium Penata Futures pada tahun 2014 sampai 2016 sebagai Senior Business Manager. Kemudian, beliau melanjutkan karir di PT Media Kreasi Komunika pada tahun 2017 sampai 2019 sebagai Sales & Marketing Director. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Armada Berjaya Trans,Tbk dari tahun 2018 sampai sekarang dan sebagai Direktur Utama di PT Sejahtera Karya Intinusa dari tahun 2018 sampai sekarang.

Indonesian citizen, 32 years old. He obtained Bachelor of Economics majoring in Economic Management from Universitas STIE Adhy Niaga, Jakarta, in 2011. He earned a Bachelor's degree from The London School of Public Relation majoring in Public Relation in 2011. Appointed as Independent Commissioner of the Company since 2019.

Started his career at PT Trijaya Pratama Futures from 2010 to 2012 as Account Executive. Following that, he continued his career at PT Midtou Aryacom Futures from 2013 to 2014 as Sales Manager. He then joined PT Millenium Penata Futures from 2014 to 2016 as Senior Business Manager. Then, he pursued his career at PT Media Kreasi Komunika from 2017 to 2019 as Sales & Marketing Director. He currently also serves as an Independent Commissioner at PT Armada Berjaya Trans, Tbk from 2018 until present and as President Director of PT Sejahtera Karya Intinusa from 2018 until present.

PROFIL DEWAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

Warga Negara Indonesia, usia 44 tahun.

Beliau menempuh pendidikan di Santa Monica College, Los Angeles pada tahun 1993-1995. Beliau memperoleh gelar Sarjana di jurusan Computer Information System dari Universitas California State Polytechnic University Pomona, Los Angeles, pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2008.

Memulai karir di Bank Bali pada tahun 1998 sampai 1999 sebagai Forex Dealer. Setelah itu, beliau menjalankan bisnis di bidang teknologi informasi pada tahun 1999 sampai 2007. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Mastertama Adhi Propertindo pada tahun 2016 sampai sekarang.

Indonesian citizen, 44 years old.

He studied at Santa Monica College, Los Angeles in 1993-1995. He graduated with a Bachelor's degree in Computer Information System from University of California State Polytechnic University Pomona, Los Angeles, in 1997.

Appointed as President Director of the Company since 2008.

Started his career at Bank Bali from 1998 to 1999 as Forex Dealer. Following that, he started a business in information technology from 1999 to 2007. He currently also serves as President Director of PT Mastertama Adhi Propertindo from 2016 until present.



ALEX WIDJAJA
DIREKTUR UTAMA |
PRESIDENT DIRECTOR



KATHRIN WIDJAJA
DIREKTUR | DIRECTOR

Warga Negara Indonesia, usia 48 tahun.
Beliau menempuh pendidikan di SMA Tarakanita Pluit, Jakarta pada tahun 1988-1991. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.

Beliau berkarir di PT Lancartama Sejati pada tahun 2008 sampai 2019 sebagai Komisaris.

Indonesian citizen, 48 years old.

She studied at SMA Tarakanita Pluit, Jakarta in 1988-1991. She graduated with Bachelor of Economics majoring in Accounting from Tarumanagara University, Jakarta, in 1995.

Appointed as Director of the Company since 2019. Started her career at PT Lancartama Sejati from 2008 to 2019 as Commissioner.



LAPORAN MANAJEMEN

Management's Report

Di tahun 2020 yang penuh tantangan ini, kami tetap mengupayakan pertumbuhan di tengah kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi dalam. Meskipun masih terdapat kendala yang harus dihadapi, Lancartama tetap menjaga ketahanan usaha untuk tumbuh berkesinambungan demi kemajuan dan perkembangan Perseroan.

The year 2020, which was full of challenges, we continued to strive for growth amidst the economic conditions which were experiencing deep contraction. Even though there are still obstacles to be faced, Lancartama still maintain business resilience to grow sustainably for the progress and development of the Company.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

Djaja Julia Supena

Komisaris Utama / *President Commissioner*



Para Pemegang Saham yang terhormat, Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa PT Lancartama Sejati Tbk dapat melewati tahun 2020 yang penuh tantangan ini. Dengan semangat dan komitmen, kami tetap mengupayakan pertumbuhan di tengah kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi dalam. Meskipun masih terdapat kendala yang harus dihadapi, Lancartama tetap menjaga ketahanan usaha untuk tumbuh berkesinambungan demi kemajuan dan perkembangan Perseroan. Setiap upaya dan langkah Perseroan yang dilakukan melalui pengawasan kami Dewan Komisaris sehingga kami dapat memberikan rekomendasi dan arahan yang dibutuhkan untuk arah pertumbuhan Perseroan.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Berdasarkan hasil pengawasan, kami memandang bahwa Direksi telah mengupayakan pemenuhan tugas, tanggung jawab dan strategi usaha dengan baik. Hal itu terlihat dari diperolehnya pelanggan-pelanggan baru, tetap memelihara hubungan baik dan memberikan yang terbaik kepada setiap pelanggan yang sudah ada sebelumnya. Setiap

Honorable Shareholders,

We would like to offer all praise and gratitude to the presence of God Almighty that PT Lancartama Sejati Tbk could sail through the challenging year of 2020. With enthusiasm and commitment, we continued to strive for growth amidst deep contraction in the economy. Even though there are still obstacles that must be faced, Lancartama still maintains business resilience to grow sustainably for the progress and development of the Company. Every effort and step of the Company was made through the supervision of our Board of Commissioners so that we could provide the recommendations and directions needed for the Company's growth.

Board of Directors Performance Assessment

Based on supervision, we are in the view that the Board of Directors has made good efforts to fulfill its duties, responsibilities and good business strategy. This can be seen from acquiring new customers, maintaining good relationships and giving the best to every existing customer. Every decision making was made based on comprehensive consideration and discussion with the Board of Commissioners. Even though in 2020,

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pembahasan yang komprehensif dengan jajaran Dewan Komisaris. Meskipun di tahun 2020 ini, kinerja dari segi financial sedikit mengalami penurunan, namun strategi dan kebijakan Direksi dalam mengendalikan setiap tantangan-tantangan yang ada baik berasal dari dalam maupun dari luar Perseroan perlu diapresiasi. Mengingat juga pertumbuhan ekonomi dunia sedang mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Pengawasan atas Kebijakan Direksi

Kami selaku Dewan Komisaris senantiasa membangun sinergi yang baik dengan Direksi untuk mengoptimalkan kinerja. Proses komunikasi dilakukan secara transparan dan terbuka. Kami memandang bahwasannya Direksi dalam mengembangkan usaha sudah sejalan dengan peraturan yang berlaku di bidang pembiayaan salah satunya memperoleh pelanggan baru untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidang usaha dan keahlian Perseroan. Tentu saja datangnya pelanggan baru tersebut tidak serta merta langsung mengupayakan pembangunan, namun tetap melakukan diskusi dengan jajaran Dewan Komisaris dan menganalisa perencanaan yang matang kepada setiap proyeknya. Dari sini kami Dewan Komisaris mengapresiasi terhadap kebijakan Direksi yang selalu positif, semangat dan berkomitmen dalam setiap menjalankan usahanya.

Penilaian Terhadap Direksi atas Pelaksanaan GCG

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) adalah pedoman yang selalu dipegang teguh oleh Perseroan. Prinsip-prinsip tersebut yakni transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran sebagai landasan dalam setiap mengambil keputusan. Dewan Komisaris menilai Direksi telah melakukan prinsip-prinsip GCG tersebut dengan baik di setiap lini perusahaan dan telah melibatkan seluruh organ tata kelola dari semua level jabatan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik dari internal maupun eksternal.

Pandangan Atas Prospek Usaha 2021

Di akhir tahun 2020, Pemerintah telah mengumumkan bahwa Indonesia akan menerima Vaksin COVID-19 SINOVA yang berasal dari China yang nantinya akan dipakai untuk memulai program vaksinasi di tahun 2021. Tentu saja, vaksinasi tersebut tidak langsung terjadi kepada masyarakat, melainkan harus lulus uji dari BPOM dan Bio Farma terlebih dahulu untuk memastikan vaksin tersebut memenuhi standar kualitas. Dengan adanya Vaksin ini, diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen memperbaiki perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Kami berharap vaksinasi nantinya dapat diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sehingga Perekonomian di

the performance from financial perspective has decreased slightly, the Board of Directors' strategies and policies in controlling any existing challenges, both from within and outside the Company, need to be appreciated. Also taking into consideration the world economic growth that was experiencing a decline due to the impact of the Covid-19 pandemic.

Supervision of Directors' Policies

As Board of Commissioners, we continue to build good synergy with the Board of Directors to optimize performance. The communication process is carried out in a transparent and open manner. We are in the view that the Board of Directors, in developing the business, is in line with the applicable regulations in the field of financing, one of which is obtaining new customers to carry out development in accordance with the Company's line of business and expertise. Without doubt, the arrival of new customers does not immediately translate to new development, but continues in discussions with the Board of Commissioners and analyzes careful planning for each project. From here, we, the Board of Commissioners, appreciate the policies of the Board of Directors who are always positive, enthusiastic and committed in running their business.

Assessment of the Board of Directors on the Implementation of GCG

The principles of Good Corporate Governance (GCG) are guidelines that the Company always adheres to. These principles are transparency, accountability, independence, responsibility and fairness as the basis for making decisions. The Board of Commissioners assessed that the Board of Directors has implemented these GCG principles well in every line of the company and has involved all organs from all levels of position, in accordance with the applicable rules and regulations, both internally and externally.

Outlook on Business Prospects 2021

At the end of 2020, the Government has announced that Indonesia will receive the SINOVA COVID-19 Vaccine originating from China which will later be used to start the vaccination program in 2021. Without doubt, vaccination will not happen immediately to the public, but must first pass the tests from BPOM and Bio Farma to ensure the vaccine meets quality standards. With this vaccine, it is hoped that it can become one of the instruments to improve Indonesia's economy in the future. We hope that vaccinations will later be given to all Indonesians so that Indonesia's economy can gradually recover. With this view, we have carefully submitted suggestions regarding the strategy to achieve business prospects for 2021. We

Indonesia dapat berangsur pulih. Atas pandangan tersebut, kami telah menyampaikan saran terkait strategi pencapaian prospek usaha untuk tahun 2021 secara seksama. Kami terus mendorong agar kinerja Perseroan tetap baik, seiring dengan berbagai upaya pembenahan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah.

Seiring dengan harapan membaiknya sektor property pada semester ke 2 tahun 2021, Perseroan akan menguatkan mitigasi risiko dengan menyiapkan beberapa langkah operasional yang lebih strategis agar dapat mendorong posisi keuangan perseroan lebih baik dari sebelumnya. Kami selaku management Perseroan optimis untuk dapat mendorong kinerja pendapatan maupun laba usaha yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dukungan dari mitra kerja hingga karyawan kiranya juga memberikan motivasi yang kuat bagi Perseroan untuk mencapai tujuan.

Penutup

Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan, jajaran Direksi, dan seluruh karyawan Perseroan atas kerja keras, komitmen dan dedikasinya untuk Perseroan.

continue to encourage the Company's performance to remain well, in line with various reforms being made by the Government.

In line with the expectation of the improvement in property sector in the second half of 2021, the Company will strengthen its risk mitigation by preparing several more strategic operational steps in order to boost the company's financial position to be better than before.

We, as the management of the Company, are optimistic that we can improve both revenue and operating profit performance as compared to the previous year. Support from work partners and employees would also provide a strong motivation for the Company to achieve its goals.

Closing

Finally, on behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our deepest gratitude and appreciation to all stakeholders, the Board of Directors, and all employees of the Company for their hard work, commitment and dedication to the Company.



LAPORAN DEWAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' REPORT



Alex Widjaja
Direktur Utama / President Director

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Honorable shareholders and stakeholders,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga PT Lancartama Sejati Tbk dapat menyampaikan Laporan Tahunan yang kedua.

We would like to offer all praise and gratitude to God Almighty for His grace so that PT Lancartama Sejati Tbk could deliver its second Annual Report.

Di tahun 2020 ini membawa banyak cerita bagi kami, tak hanya kami tetapi bagi kehidupan masyarakat dunia. Namun, Lancartama tetap mengupayakan pertumbuhan di tengah kondisi pasar yang menantang dan ditambah dengan adanya pandemi Covid-19. Di tahun ini, Indonesia mengalami resesi dampak dari pandemi. Meskipun masih terdapat banyak tantangan untuk tetap diperbaiki, Perseroan tetap menjaga ketahanan usaha untuk tumbuh berkesinambungan.

The year 2020 has brought many stories for us, not only for us but for the lives of the people of the world. However, Lancartama continued to strive for growth amidst challenging market conditions coupled with Covid-19 pandemic. This year, Indonesia was experiencing a recession due to the pandemic. Even though there are still many challenges to be fixed, the Company still maintain business resilience to grow sustainably.

Perekonomiandunia masih mengalami perlambatan dan dinilai kurang menguntungkan secara merata bagi negara maju maupun negara berkembang. Perekonomian Indonesia sendiri menunjukkan perlambatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang melambat hingga dibawah 5% (lima persen) pada akhir tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus hingga 5,32 % (lima koma tiga puluh dua persen) pada Triwulan II 2020. Tentu saja, dampak dari minusnya pertumbuhan ekonomi ini salah satunya adanya peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin. Untuk memutus rantai penyebaran virus, Pemerintah membuat kebijakan yaitu Pembatasan

The world economy is still experiencing a slowdown and is considered to be less profitable evenly for both developed and developing countries. The Indonesian economy itself is showing a significant slowdown. This can be seen from the economic growth which slowed down to below 5% (five percent) by the end of 2020. Indonesia's economic growth was in the negative up to 5.32% (five point thirty two percent) in the second quarter of 2020. Without doubt, the impact of negative growth in this economy was an increase in unemployment and poverty. To break the chain of spreading the virus, the Government made a policy, namely the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in

Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jakarta. Pemberlakuan PSBB tersebut membuat sektor konstruksi dan *real estate* mengalami kontraksi cukup dalam yang mana mengalami penurunan pertumbuhan. Pembatasan aktivitas masyarakat tentu saja berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Di tengah dinamika yang dihadapi, tentu saja kami mengatur sejumlah strategi untuk dapat berhasil melewati ini semua. Sejumlah strategi berhasil dilaksanakan secara konsisten termasuk mengupayakan memperoleh pelanggan-pelanggan baru untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan keahlian Perseroan.

Sumber Daya Manusia

Pertumbuhan bisnis Perseroan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tentu saja Perseroan semakin membutuhkan sumber daya manusia (sdm) yang mempunyai produktifitas dan kualitas yang baik yang akan sangat berperan penting dalam kemajuan bisnis Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan memperhatikan karir yang sesuai dan memastikan bahwa kebutuhan karyawan dapat terpenuhi baik dari aspek kompetensi maupun kesejahteraan. Perseroan juga meningkatkan kompetensi para karyawannya melalui berbagai seminar dan pelatihan yang berguna untuk meningkatkan keterampilan di industri konstruksi. Di samping itu, Perseroan juga rutin melakukan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan yang ada di Perseroan.

GCG

Lancartama terus berupaya meningkatkan standar kualitas penerapan praktik GCG di seluruh lingkungan Perseroan sebagai Entitas. Penerapan GCG mengatur tentang kewenangan dan kewajiban seluruh jajaran Perseroan dan Pemegang Saham, baik dari regulator maupun internal Perseroan. Peran organ pendukung tata kelola perusahaan juga dioptimalkan kontribusinya dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Kami juga menerapkan GCG dengan memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan maupun pihak luar yang terkait dengan perusahaan untuk melakukan pelaporan apabila terjadi pelanggaran.

Prospek Usaha 2021

Tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih menantang bagi perekonomian global dan nasional, juga menantang bagi perekonomian Lancartama. Untuk saat ini prospek perekonomian sangat bergantung pada proses penanganan virus dan strategi Pemerintah dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Risiko berlanjutnya penyebaran virus dapat mempengaruhi kinerja Pemerintah dan swasta. Meskipun tidak sepenuhnya berdampak pada sektor konstruksi yang dijalankan Perseroan, namun kami tetap membangun optimism dalam menjalankan operasional usaha.

Jakarta area. The implementation of PSBB caused the construction and real estate sectors to experience a deep contraction, which brought a decline in growth. Restrictions on community activities, no doubt, have an effect on business activities which then have an impact on the economy. In the midst of the dynamics at hand, we had arranged a number of strategies to go through the situation. A number of strategies have been consistently implemented successfully, including seeking to acquire new customers to carry out development in accordance with the Company's expertise.

Human Resources

With the Company's business growth which is increasing from year to year, the Company increasingly need human resources (HR) who possess good productivity and quality who will play an important role in the progress of the Company's business. Therefore, the Company pays attention to its employees and ensures that their needs can be met both in competency and welfare aspects. The Company also improved the competence of its employees through various seminars and trainings that are useful for improving skills in the construction industry. In addition, the Company also routinely conducts recruitment according to the needs of the Company.

GCG

Lancartama continues to strive to improve the quality standards of implementing GCG practices throughout the Company as an entity. The implementation of GCG regulates the authorities and obligations of all levels of the Company and shareholders, both from regulators and internally. The contribution of supporting organs for corporate governance is also optimized in assisting the implementation of duties of the Board of Commissioners and Directors. We also implemented GCG by facilitating all parties, including leaders, employees and external parties related to the company, to report when a violation occurs.

Business Prospects 2021

2021 will be a more challenging year for both global and national economies, as well as for Lancartama economy. For now, the economic outlook depends heavily on the process of dealing with the virus and the Government's strategy for economic recovery during this pandemic. The risk that the virus will continue to spread could affect the performance of both the Government and private sectors. Although it does not fully impact the construction sector that is carried out by the Company, we still build the optimism in carrying out business operations.

Kami yakin dengan adanya pemberian vaksin kepada masyarakat Indonesia di tahun 2021 dapat memulihkan situasi global perekonomian di dunia, Indonesia, terutama bagi sektor konstruksi yang salah satu garapannya, yakni properti diperkirakan oleh para pengamat mulai bergerak di pertengahan tahun 2021 dan bangkit di akhir tahun.

Sejalan dengan kebangkitan itu, kami akan memitigasi risiko sedini mungkin dengan menyiapkan strategi yang lebih matang untuk membuat posisi keuangan di atas standar. Kami yakin Perseroan kembali dapat meningkatkan pendapatan yang sempat menurun di tahun 2020 sehingga dapat mencetak laba usaha yang lebih tinggi.

Penutup

Kami jajaran Direksi menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Dewan Komisaris atas arahan dan penasihataannya kepada kami selama mengelola perusahaan. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami berikan kepada seluruh pemangku kepentingan, jajaran manajemen beserta karyawan atas kesetiaan, kerja keras dan komitmen yang telah ditunjukkan selama ini.

We believe that the provision of vaccines to the Indonesian public in 2021 can restore the global economic condition in the world, Indonesia, especially for the construction sector, one of which is property, which is estimated by observers to start bouncing back in mid-2021 and rise at the end of the year.

In line with this revival, we will mitigate risk as early as possible by preparing a more mature strategy to put our financial position above the standard. We are confident that the Company can again improve income which had decreased in 2020 so that it can generate a higher operating profit.

Closing

We, the Board of Directors, would like to express our deepest gratitude and appreciation to the Board of Commissioners for their direction and advice while managing the company. We also give our highest appreciation to all stakeholders, management and employees for their loyalty, hard work and commitment thus far.





INFORMASI SAHAM

Shares Information

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

SHARES LISTING CHRONOLOGY

Keterangan/ Description	Tanggal/ Date	Saham Baru / New Shares	Saham Ditempatkan Dan Disetor Penuh / Shares Issued and Fully Paid	Nominal/ Nominal	Tercatat Di / Listed On
Penawaran Perdana / Initial Offering	10-02-2020	200.000.000	1.000.000.000	25	BEI IDX
Penerbitan Waran Seri I / Series I Warrant Issuance	10 Agustus 2020 hingga 10 Februari 2023 / 10 August 2020 to 10 February 2023	100.000.000	800.000.000	25	BEI IDX

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA 31 DESEMBER 2020

CAPITAL STRUCTURE AND SHARES OWNERSHIP AS AT 31 DECEMBER 2020

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 6 Tanggal 7 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

The Company's latest capital structure and shareholders composition based on Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 6 dated 7 July 2020 is as follows

Keterangan/ Description	Nilai Nominal Rp 25/saham Nominal Value Rp 25/share		
	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal Total Nominal Value	%
Modal Dasar / Authorized Capital	3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid Capital			
1. Alex Widjaja	792.000.000	19.800.000.000	99,00
2. Kathrin Widjaja	8.000.000	200.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor / Total Issued and Fully Paid Capital	800.000.000	20.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel / Total Shares in Portfolio	2.400.000.000	60.000.000.000	



PERISTIWA PENTING

MILESTONES

10 Februari 2020 / 10 February 2020

Lancartama Mencatatkan sahamnya di bursa saham.
Lancartama listed its shares on the stock exchange.

Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan penjamin emisi PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA.

Listing on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA as the underwriter.



27 Oktober 2020 / 27 October 2020

Penandatanganan perjanjian PT Lancartama Sejati Tbk dengan PT Primafood International.

Signing of agreement between PT Lancartama Sejati Tbk and PT Primafood International.

Penandatanganan perjanjian tersebut terkait dengan Proyek Pembangunan 500 Toko Retail Prima Freshmart di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Penandatanganan dilakukan di Jakarta oleh Bpk Alex Widjaja selaku Dirut Lancartama Tbk dan Dirut PT Primafood International di Jakarta.

Signing of agreement for the Construction Project of 500 Prima Freshmart Retail Stores in Java and Sumatra Islands. The signing ceremony was carried out in Jakarta by Mr. Alex Widjaja as President Director of Lancartama Tbk and Managing Director of PT Primafood International in Jakarta.



Pembangunan Saluran U-Ditch I tanggal 25 Februari 2020 / Building of U-Ditch Tunnel on 25 February 2020



Pembangunan Saluran U-Ditch II tanggal 16 Desember 2020 / Building of U-Ditch II Tunnel on 16 December 2020



Pembangunan Renovasi Food Court Tahap II tanggal 26 Oktober 2020 / Renovation of Food Court Phase II on 26 October 2020



Pembangunan Interior Food Court tanggal 29 Januari 2020 / Building of Food Court Interior on 29 January 2020

Penandatanganan perjanjian antara PT Lancartama Sejati Tbk dengan PT The Master Steel.

Signing of agreement between PT Lancartama Sejati Tbk and PT Mastertama Adhi Propertindo

Penandatanganan perjanjian tersebut terkait dengan Pembangunan Saluran U-Ditch, Pembangunan Renovasi Food Court Tahap II dan Pembangunan Interior Food Court yang dilakukan pada Proyek Apartment Riverdale Cibitung. Penandatanganan dilakukan di Jakarta oleh Bpk Alex Widjaja selaku Dirut PT Lancartama Sejati Tbk dengan Dirut PT Mastertama Adhi Propertindo

Signing of the agreement for the U-Ditch Tunnel Development, Phase II of Food Court Renovation and Food Court Interior Development carried out at the Riverdale Cibitung Apartment Project. The signing ceremony was carried out in Jakarta by Mr. Alex Widjaja as Managing Director of PT Lancartama Sejati Tbk with Managing Director of PT Mastertama Adhi Propertindo



10 Januari 2020 / 10 January 2020

Penandatanganan perjanjian antara PT Lancartama Sejati Tbk dengan PT The Master Steel.

Signing of agreement between PT Lancartama Sejati Tbk and PT The Master Steel.

Penandatanganan perjanjian tersebut terkait Proyek Pemborongan Pekerjaan Perbaikan Bangunan di TMS III dan Pekerjaan Infrastruktur di TMS IV. Penandatanganan dilakukan di Jakarta oleh Bpk Alex Widjaja selaku Dirut PT Lancartama Sejati Tbk dengan Dirut PT The Master Steel.

Signing of agreement was for the Construction Project at TMS III and Infrastructure Work at TMS IV. The signing ceremony was carried out in Jakarta by Mr. Alex Widjaja as Managing Director of PT Lancartama Sejati Tbk and Managing Director of PT The Master Steel.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

Perseroan memaknai substansi pelaksanaan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai upaya untuk mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, membantu, memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal tanpa melupakan kesejahteraan dan kebersamaan.

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari hubungan yang harmonis, dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar. Oleh karenanya, Perseroan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, moral serta etika terhadap kepentingan masyarakat sekitar. Meskipun di tahun 2020 ini, Perseroan baru menginjakkan kakinya di pasar modal sebagai perusahaan publik, namun Perseroan tidak lupa akan tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan. Bagi Perseroan, kelangsungan dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan tidak hanya didasarkan pada kekuatan finansial saja namun harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup dimana Perseroan beroperasi. Lancartama memaknai substansi pelaksanaan program CSR secara terpadu untuk mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, membantu, memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal tanpa melupakan kesejahteraan dan kebersamaan.

Untuk itu, Perseroan menetapkan program Tanggung Jawab Sosial sebagai upaya strategis dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perseroan dengan masyarakat sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan CSR memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kepentingan sosial dari pemangku kepentingan perusahaan dapat dipenuhi secara tepat dan proporsional, khususnya masyarakat yang berada di lingkungan sekitar Perseroan. Masyarakat merupakan salah satu stakeholder yang turut menentukan keberlangsungan perusahaan di masa depan, karenanya kegiatan CSR Perseroan merupakan upaya untuk menciptakan "lingkaran emas", yakni upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar yang akan membentuk mereka menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi perusahaan. Perseroan menyadari pentingnya hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan operasional. Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendorong terciptanya keselarasan dan keharmonisan kehidupan masyarakat sekitar dengan kehidupan bisnis perusahaan serta bertanggung jawab. Dalam hal ini, Lancartama

The Company interprets the implementation of corporate social responsibility (CSR) as an effort to realize its care for the environment, to help, to empower and to improve the standard of living of local communities without overlooking welfare and togetherness.

The Company realizes that its success is inseparable from a harmonious, dynamic, and mutually beneficial relationship with the surrounding communities. Therefore, the Company has the obligations and responsibilities legally, socially, morally and ethically towards the interests of the surrounding communities. Even though in 2020, the Company has only entered the capital market as a public company, but the Company has not forgotten its responsibilities to the stakeholders. For the Company, sustainable business growth is not only based on financial strength but also dependent to the social and environmental dimensions in which the Company operates. Lancartama interprets the implementation of CSR program in an integrated manner to realize its care for the environment, to help, to empower and to improve the lives of local communities without disregarding welfare and togetherness.

For this reason, the Company establishes Corporate Social Responsibility (CSR) program as a strategic effort in order to maintain and enhance a harmonious relationship between the Company and the community so as to create conditions that are conducive to supporting business development and sustainable company growth.

The implementation of CSR activities aims to ensure that the social interests of the company's stakeholders can be fulfilled appropriately and proportionally, especially the people in the communities surrounding the Company. The community is one of the stakeholders that will determine the sustainability of the company in the future, therefore the Company's CSR activities are in the effort to create a "golden circle", namely an effort to grow and develop the socio and economic conditions of the surrounding communities which will shape them to become reliable partners for the Company. The Company realizes the importance of a harmonious relationship with its stakeholders in supporting operational sustainability. The Company has a high commitment to encourage harmony especially in the surrounding communities with the company's business activities responsibly. In this case, Lancartama implements a Corporate Social Responsibility (CSR) program not only for the social community, but also for the employment, health, and welfare of its employees, the environment and also to

melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*/Tanggung Jawab Sosial tidak hanya terhadap sosial kemasyarakatan, Perseroan menerapkan program CSR tersebut juga kepada Ketenagakerjaan, Kesehatan, Kesejahteraan Karyawan, Lingkungan Hidup dan juga kepada Pelanggan dari Lancartama itu sendiri.

Dalam menetapkan dan menjalankan program-program terkait Program CSR, Perseroan mendasarkan diri kepada peraturan-peraturan dan ketentuan berlaku yang menjadi acuan dan landasan Perseroan dalam menjalankan praktik-praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yaitu antara lain:

1. UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
3. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Anggaran Dasar PT Lancartama Sejati Tbk;
5. Sistem Manajemen PT Lancartama Sejati Tbk.

Pengelolaan Dana CSR

Perseroan menyadari sepenuhnya kesinambungan usaha menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program CSR. Selama tahun 2020, Perseroan telah menggunakan dana untuk seluruh program CSR sebesar Rp. 27.500.000,-. Perseroan menyadari dana program CSR tersebut masih berupa program jangka pendek saja. Namun para jajaran Dewan Komisaris sangat menyetujui dan mengapresiasi terhadap program jangka pendek yang sudah dilaksanakan oleh Perseroan bahwasannya program tersebut dianggap sebagai awal yang positif. Perseroan percaya di kondisi pandemic saat ini, situasi dan kondisi global perekonomian dunia, Indonesia maupun di Perseroan sendiri dapat semakin pulih sehingga ke depannya diharapkan Perseroan mampu menerapkan program CSR dengan program-program yang bersifat jangka panjang (*sustainability*) dan tentu dapat lebih baik lagi di tahun mendatang.

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup

Di tahun 2020 ini, meskipun negara sedang dalam kondisi kurang baik karena adanya penyebaran wabah COVID-19, Perseroan tetap berkomitmen untuk melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial terhadap masyarakat melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Salah satu

the customers of Lancartama itself.

In determining and carrying out activities related to the CSR Program, the Company bases itself on the applicable rules and regulations which become the Company's reference and foundation in carrying out Corporate Social Responsibility practices, namely, among others:

1. *Law Number 40 Year 2007 Article 74 concerning Limited Liability Companies which regulates Social and Environmental Responsibility;*
2. *Decree of the State Minister for the Environment Number 86 of 2002 concerning Guidelines for Implementing Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts;*
3. *Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection;*
4. *Articles of Association of PT Lancartama Sejati Tbk;*
5. *Management System of PT. Lancartama Sejati Tbk.*

CSR Fund Management

The Company is fully aware that business continuity is an inseparable part of the CSR program. Throughout 2020, the Company has spent an amount of Rp. 27.500.000,- for all CSR activities. The company realizes that this CSR fund was only utilized in the form of short-term programs. However, the Board of Commissioners strongly approve and appreciate the short-term programs that have been implemented by the Company that such programs are considered as a positive start. The Company believes that in the current pandemic condition, the global situation and the world economy, Indonesia and the Company itself are in the path to recovery so that in the future it is hoped that the Company will be able to implement a CSR program with programs that are more long term (sustainable) and better in the coming years.

Environmental Responsibility

*In 2020, even though the country was not in a favorable condition due to the spread of the COVID-19 outbreak, the Company remained committed to implement a Social Responsibility Program for the community through its CSR (*Corporate Social Responsibility*) program. One of the Company's CSR programs*

program CSR Perseroan tersebut adalah tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Program yang sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Perseroan telah meraih pengesahan atas dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk kegiatan perkantoran di Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Sosial Masyarakat

Lancartama berkomitmen untuk hadir di tengah-tengah masyarakat melalui pelaksanaan program CSR yang diwujudkan dalam bentuk sumbangan baik bentuk dana, ataupun logistik yang dibutuhkan masyarakat terutama yang terkena dampak dari penyebaran COVID-19. Selama tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan program CSR terhadap sosial masyarakat dengan memberikan sumbangan sebanyak Rp. 27.500.000,-. Adapun rincian program CSR terhadap sosial masyarakat sebagai berikut:

is responsibility for the environment. Programs that have been running properly and appropriately are in accordance with the applicable laws and regulations, namely the Decree of the State Minister for the Environment Number 86 of 2002 concerning Guidelines for the Implementation of Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts. The Company has obtained the endorsement of the Environmental Management Effort (UKL) and Environmental Monitoring Effort (UPL) documents for its office activities on Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, South Jakarta.

Corporate Social Responsibility Towards Society

Lancartama is committed to being present in the midst of society through the implementation of CSR program which is manifested in the form of donations in the form of funds or logistics that are needed by the community, especially those affected by the spread of COVID-19. Throughout 2020, the Company has implemented CSR programs for the social community by providing a contribution of Rp. 27.500.000,-. The details of the CSR program for the social community are as follows:

Program CSR CSR Program	Lokasi Location	Biaya Cost
Sumbangan Dana <i>Donation of Funds</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Gunung, Jakarta Selatan 2. Yayasan Hati Gembira Indonesia <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Gunung, Jakarta Selatan / Gunung Sub-District, South Jakarta 2. Yayasan Hati Gembira Indonesia 	14.000.000,-
Sumbangan Baju Hazmat/APD (200 pcs) <i>Donation of Personal Protective Equipment/PPE (200 pcs)</i>	Beberapa RS di Jakarta <i>A few hospitals in Jakarta</i>	13.000.000,-
Sumbangan Bantuan Dana Penanggulangan Virus COVID-19 <i>Donation for COVID-19 Virus Control Funds</i>	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Jakarta Selatan	500.000,-
		27.500.000,-

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Karyawan

Salah satu faktor yang penting dalam perkembangan Perseroan dalam mencapai keberhasilan adalah sumber daya manusia (SDM). Perseroan memiliki komitmen dalam pengelolaan SDM dengan berlandaskan asas keadilan tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan ataupun gender. Hal ini dibuktikan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh kandidat dalam mengikuti pelaksanaan rekrutmen serta bagi seluruh karyawan dalam mengikuti perkembangan kompetensi, sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan tingkat kebutuhan. Perseroan menyediakan fasilitas dan program kesejahteraan bagi SDM serta memberikan remunerasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerja antara Perseroan dengan karyawan. Adapun untuk aspek kesejahteraan tersebut melalui pemberian fasilitas dan program kesejahteraan yang meliputi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, tunjangan hari raya, bonus atas kinerja, dll.

Mengingat di tahun 2020 ini, wabah virus COVID-19 yang penyebarannya semakin luas tentu saja Perseroan semakin memperhatikan kesehatan SDM. Perhatian Perseroan terhadap seluruh karyawan ini diwujudkan dengan adanya pelaksanaan rapid test rutin setiap 1 (satu) bulan sekali kepada seluruh karyawan baik yang bekerja di kantor maupun sdm yang berada di proyek. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi virus COVID-19 agar karyawan dapat selalu berperilaku hidup sehat dan mawas diri dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga imunitas tubuh setiap saat. Di lain hal, Perseroan juga sempat memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawan dengan pelaksanaan metode test *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Untuk pelaksanaan *rapid test* dan test PCR tersebut, selama 1 (satu) tahun Perseroan mengeluarkan uang sebanyak Rp. 18.169.400,- .

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pelanggan

Perseroan juga tidak lupa akan tanggung jawabnya atas kebutuhan terhadap jasa yang diberikan kepada pelanggan baik itu pelanggan tetap maupun pelanggan baru dari Perseroan. Pelanggan menjadi prioritas yang terdepan untuk memperoleh jasa yang terbaik dari Perseroan. Pengendalian kualitas dan layanan yang diberikan kepada pelanggan dilakukan secara konsisten dan di evaluasi secara berkala demi meningkatkan mutu Perseroan itu sendiri. Perseroan juga memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai

Corporate Social Responsibility for Employment, Health and Welfare of Employees

One of the important factors for the Company in achieving success is human resources (HR). The Company has a commitment to human resource management based on the principle of justice without differentiating ethnicity, religion, race and groups or gender. This is evidenced by providing opportunities for all candidates to participate in recruitment and for all employees to take part in the development of competencies, according to qualification requirements and level of need. The Company provides facilities and welfare programs for HR and provides remuneration in accordance with the laws and regulations governing the work relationship between the Company and employees. As for the welfare aspect, the provision of welfare facilities and programs including BPJS for Health and Employment, holiday allowances, bonuses for performance, etc.

Given that in 2020, the COVID-19 virus outbreak was increasingly widespread, without doubt the Company was paying more attention to the health of its human resources. The Company's attention to all employees is manifested by the implementation of routine rapid tests every month for all employees, both working in the office and on projects. This was done to detect the COVID-19 virus so that employees can always have a healthy and more cautious lifestyle by implementing health protocols and maintaining body immunity at all times. On the other hand, the Company also had the opportunity to provide welfare to all employees by implementing the Polymerase Chain Reaction (PCR) test method. For the implementation of the rapid test and PCR test, for 1 (one) year the Company had spent Rp. 18,169,400, -.

Corporate Responsibility Towards Customers

The Company also does not forget its responsibility for the need for products and services provided to customers, both regular and new customers of the Company. Providing the best products and services for its customers is the foremost priority of the Company. Quality control of products and services provided to customers is carried out consistently and regularly in order to improve the quality name of the Company itself. The Company also ensures that the services provided are in accordance with the laws and regulations where the

dengan peraturan perundang-undangan dimana penerapan tanggung jawab terhadap pelanggan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha. Merujuk pada UU ini, pelaku usaha harus selalu meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Di samping itu, Perseroan menunjuk Project Manager sebagai pihak yang bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan pelanggan, baik itu kritik maupun saran demi kebaikan untuk Perseroan itu sendiri.

Program CSR Sumbangan Logistik kepada Masyarakat melalui Kel. Gunung, Jakarta Selatan

implementation of responsibility for customers refers to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which regulates the rights and obligations of consumers and businesses. Referring to this Law, businesses must always improve the quality of goods and/or services that ensure the continuity of the business in producing goods and/or services, health, comfort, security and consumer safety. In addition, the Company has appointed a Project Manager as the party whose responsibility is to receive and follow up on customer complaints, be it criticism or suggestions for the improvements of the Company.

CSR Program Donation of Logistics to the community through Sub-District Gunung, South Jakarta.





ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion And Analysis

Perekonomian Dunia

Terimbas oleh perlambatan ekonomi di tahun sebelumnya, ekonomi global di tahun 2020 masih mengalami perlambatan dan dinilai kurang menguntungkan secara merata bagi negara maju maupun negara berkembang. Kondisi tersebut semakin diperberat dengan munculnya penyebaran virus corona baru (SARS-COV-2) penyebab *pandemic COVID-19* yang sangat memukul perekonomian sejumlah negara termasuk Indonesia.

Karena untuk mencegah penyebaran virus baru itu sejumlah negara mengambil langkah penguncian wilayah (*lockdown*) dan kebijakan *physical distancing* atau jaga jarak fisik kepada warganya yang tak pelak lagi telah memberikan dampak negatif bagi sektor perekonomian karena beberapa sektor tidak beroperasi secara normal.

Akibat situasi pandemik global tersebut IMF (*International Monetary Found*) memprediksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 mengalami kontraksi dan mencapai nilai negatif alias turun daripada tahun lalu, yakni sebesar minus 3,5%.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa dunia akan mengalami resesi yang diperkirakan setidaknya sama dengan kondisi krisis keuangan global di tahun 2008-2009 atau bahkan bisa lebih buruk dari itu. Kerugian manusia akibat pandemi virus corona sudah tak terukur dan semua negara harus bekerja sama untuk melindungi orang dan membatasi kerusakan ekonomi. IMF juga menyebut bahwa dampak ekonomi sedang dan akan parah, tetapi semakin cepat virus berhenti, semakin cepat dan kuat pemulihan akan terjadi.

Perekonomian Indonesia

Perekonomian global yang masih mengalami perlambatan dan dinilai kurang menguntungkan secara merata bagi negara maju maupun negara berkembang ditambah hantaman pandemi virus Covid-19 tak pelak cukup melemahkan perekonomian Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak krisis moneter 1998, ekonomi Indonesia mengalami resesi. Perekonomian Indonesia menunjukkan perlambatan yang signifikan dimana tercatat negatif dalam 2 (dua) kuartal berturut-turut.

Kinerja perekonomian sepanjang tahun ini lebih buruk dari yang diproyeksi oleh Pemerintah. Di Kuartal I ekonomi masih bisa tumbuh 2,97%, namun di Kuartal II laju kinerja perekonomian langsung terjun bebas ke level minus 5,32%. Kontraksi tersebut lebih dalam dibandingkan dengan proyeksi pemerintah yang diperkirakan

World Economy

With the impact of economic slowdown in the previous year, the global economy in 2020 is still experiencing a slowdown and is considered less profitable for both developed and developing countries. This condition was exacerbated by the emergence of the spread of the new coronavirus (SARS-COV-2) which brought the COVID-19 pandemic that has severely hit the economies of a number of countries including Indonesia.

To prevent the spread of the new virus, a number of countries have implemented both lockdown and physical distancing policies to their citizens which inevitably brought negative impact on the economic sector due to some sectors could not operate as per normal.

As a result of the global pandemic situation, IMF (International Monetary Found) predicted that global economic growth in 2020 will experience a contraction and reach a negative value, ie. lower than the previous year, which was minus 3.5%.

In other words, the world will experience a recession which is estimated to be at least similar as the global financial crisis in 2008-2009, or even worse. The human cost of coronavirus pandemic is immeasurable and all countries must work together to protect the people and limit economic damage. The IMF also said that the economic impact is and will become more severe, but the sooner the virus can be stopped, the faster and stronger the recovery will be.

Indonesian economy

The global economy, which is still experiencing a slowdown and is considered less profitable both for developed and developing countries, plus the impact of the Covid-19 virus pandemic has undoubtedly weakened the Indonesian economy. For the first time since the 1998 monetary crisis, the Indonesian economy went into recession. The Indonesian economy has shown a significant slowdown which was recorded negative for 2 (two) consecutive quarters.

The economy's performance so far this year has been worse than projected by the Government. In the first quarter, the economy could still grow by 2.97%, but in the second quarter its performance immediately fell to a level of minus 5.32%. This contraction was deeper than the government's projection, which estimated

kinerja perekonomian akan di kisaran minus 4,3% hingga minus 4,8%. Hal yang sama juga terjadi pada Triwulan III. Pada Triwulan III, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia minus 3,49%.

Meski membaik dibandingkan kuartal sebelumnya, realisasi tersebut juga lebih buruk dibanding proyeksi Pemerintah yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berkontraksi 2,9%. Namun demikian, secara kuartalan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III sudah tumbuh 5,05%. Di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang menantang, Lancartama tetap mengupayakan pertumbuhan. Meskipun masih terdapat banyak tantangan yang harus diperbaiki, Perseroan tetap menjaga ketahanan usaha untuk tumbuh berkesinambungan.

Seperti halnya mata uang negara-negara berkembang lainnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika pada awal bulan April 2020 juga sempat tertekan hingga mencapai Rp16.495. Volatilitas nilai tukar mulai mereda menjelang akhir tahun 2020 setelah ditemukannya vaksin COVID-19. Nilai tukar Rupiah pada perdagangan di akhir tahun 2020 ditutup pada posisi Rp14.050 dan terus stabil. Perlambatan aktivitas ekonomi yang signifikan tercermin dari laju inflasi sepanjang tahun 2020 yang tercatat menurun menjadi 1,68% year-on-year dibandingkan dengan inflasi di tahun 2019 yang sebesar 2,59% (YoY).

Terkait menurunnya inflasi dan melemahnya permintaan barang-barang impor akibat menurunnya aktivitas ekonomi dalam negeri, neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2020 tercatat mengalami surplus cukup tinggi mencapai USD21,73 miliar, jauh lebih baik dibandingkan dengan neraca perdagangan di tahun 2019 yang defisit USD3,59 miliar. Alhasil neraca transaksi berjalan Indonesia pada Triwulan-III 2020 mencatatkan surplus sebesar USD964 juta, atau 0,36% terhadap PDB, yang merupakan surplus untuk pertama kalinya sejak Triwulan-III 2011.

Tinjauan Industri

Fitch Solutions Country Risk & Industry Research sebelumnya memprediksi pertumbuhan sektor konstruksi di Indonesia pada tahun ini sebesar 4,9%. Namun, lembaga ini merevisi turun prediksi pertumbuhan riil menjadi 2,1%. Melesetnya perkiraan ini, karena imbas dari adanya keterlambatan dan penundaan sejumlah proyek infrastruktur dan latar belakang kondisi ekonomi makro yang buruk. Kondisi tersebut diperkirakan akan membuat investasi ke sektor bangunan dan infrastruktur menjadi terhambat. Selain itu, aktivitas konstruksi juga diproyeksikan berkurang hingga akhir tahun 2020. Padahal seperti yang Pemerintah

that economic performance will be in the range of minus 4.3% to minus 4.8%. The same thing happened in Quarter III. In the third quarter, Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) was minus 3.49%.

Even though it has improved as compared to the previous quarter, this realization was also worse than the Government's projection, which estimated that the economy would contract by 2.9%. However, on a quarterly basis, the economy has grown by 5.05% in the third quarter. In the midst of challenging economic condition in Indonesia, Lancartama continued to strive for growth. Even though there are still many challenges that need to be faced, the Company still maintain its resilience to grow sustainably.

Like the currencies of other developing countries, Rupiah exchange rate against US dollar at the beginning of April 2020 was also under pressure until it reached Rp. 16,495. Exchange rate volatility began to subside towards the end of 2020 after the discovery of the COVID-19 vaccine. At the end of 2020, Rupiah exchange rate was closed at Rp14,050 and continued to stabilise. The significant slowdown in economic activity is reflected in the inflation rate throughout 2020 which was recorded to have decreased to 1.68% year-on-year compared to inflation in 2019 of 2.59% (YoY).

As for the decline in inflation and weakening demand for imported goods due to lower domestic economic activity, Indonesia's trade balance throughout 2020 recorded quite a high surplus reaching USD 21.73 billion, much better than the trade balance in 2019 which was a deficit of USD 3.59 billion. As a result, Indonesia's current account balance in Q3 2020 recorded a surplus of USD 964 million, or 0.36% of GDP, which was the first surplus since Q3 2011.

Industry Overview

Fitch Solutions Country Risk & Industry Research previously predicted growth in the construction sector in Indonesia this year will be 4.9%. However, this agency revised down its forecast for real growth to 2.1%. This miscalculation was due to the impact of delays and postponements in a number of infrastructure projects and a background of poor macroeconomic condition. This condition is expected to hamper investment in the building and infrastructure sector. In addition, construction activity is also projected to decrease until the end of 2020. In fact, as the Government mentioned, the construction sector was initially expected to be able to generate overall outperformed growth in 2020.

katakan, sektor konstruksi awalnya diharapkan mampu mencetak pertumbuhan *outperformed* secara keseluruhan tahun 2020. Di samping itu, kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia masih berlanjut dan malah semakin luas wilayah yang terpapar virus tersebut.

Laporan keuangan

Aset

Total Aset yang dicapai Lancartama di tahun 2020 mengalami meningkat 23,12% (Rp31,68 miliar) menjadi Rp168,703 miliar dibandingkan Rp137,020 miliar (2019).

Kenaikan tersebut terkait meningkatnya Aset Tidak Lancar dibandingkan tahun 2019, sebesar Rp37,453 miliar menjadi Rp155,384 miliar dari Rp117,932 miliar, walaupun Aset Lancar mengalami penurunan menjadi Rp13,319 miliar dari Rp19,088 miliar atau menurun 30,23% (Rp5,770 miliar).

Penurunan pada Aset Lancar terutama disebabkan oleh Piutang Usaha Pihak ke-tiga, Piutang Usaha Pihak berelasi, Uang muka dan biaya dibayar dimuka masing-masing sebesar Rp7,762 miliar (86,65%), Rp1,136 miliar (95,16%) dan Rp1,499 miliar (24,34%).

Sementara meningkatnya Aset Tidak Lancar disebabkan terutama oleh melonjaknya Properti Investasi sebesar 37,42% atau Rp40,138 miliar dari Rp107,264 miliar menjadi Rp147,402 miliar.

Liabilitas

Perseroan mencatat Liabilitas di tahun 2020 sebesar Rp118,786 miliar, meningkat 3,70% atau sebesar Rp 4,240 miliar dari Rp114,546 miliar (2019).

Dari angka tersebut Liabilitas Jangka Pendek meningkat sebesar 17,07% atau Rp 10,160 miliar menjadi Rp69,690 miliar dari Rp 59,529 (2019). Peningkatan itu terutama disebabkan oleh Utang Bank Jangka Pendek yang bertambah dari Rp 53,071 miliar menjadi Rp64,114 miliar (naik 28,81%).

Liabilitas Jangka Panjang menurun 10,76% (Rp5,921 miliar) dari Rp55,017 (2019) menjadi Rp49,096 miliar yang terutama disebabkan oleh menurunnya Liabilitas Bank sebesar Rp5,100 miliar (9,49%) menjadi Rp48,644 miliar dibandingkan Rp53,745 miliar (2019).

Ekuitas

Per 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan mencapai Rp49,918 miliar atau meningkat 122,11% (Rp27,443 miliar) dibandingkan 2019 yang berjumlah Rp22,475 miliar, terutama karena tambahan modal disetor sebesar Rp26,329 miliar (2019).

In addition, the condition of the spread of COVID-19 in Indonesia is still continuing and the area exposed to the virus is even wider.

Financial Statements

Assets

The total assets achieved by Lancartama in 2020 increased by 23.12% (Rp31.68 billion) to Rp. 168.703 billion compared to Rp 137.020 billion (2019).

This increase was related to the increase in Non-Current Assets amounting to Rp37.453 billion compared to 2019, to Rp155.384 billion from Rp117.932 billion, although Current Assets decreased to Rp13.319 billion from Rp19.088 billion or decreased by 30.23% (Rp5,770 billion).

Decrease in Current Assets was mainly due to Accounts Receivable from Third Parties, Trade Receivables from Related Parties, Advances and Prepaid Expenses amounting to IDR7.762 billion (86.65%), IDR1.136 billion (95.16%) and Rp1.499 billion (24.34%) respectively.

Meanwhile, the increase in Non-current Assets was mainly due to a 37.42% increase in investment properties or Rp40.138 billion from Rp107.264 billion to Rp147.402 billion.

Liabilities

The Company recorded Liabilities in 2020 amounting to IDR 118.786 billion, an increase of 3.70% or IDR 4.240 billion from IDR 114.546 billion (2019).

From this figure, Current Liabilities increased by 17.07% or Rp. 10.160 billion to Rp. 69.690 billion from Rp. 59.529 (2019). The increase was mainly due to the increase in short-term bank loans from Rp 53.071 billion to Rp 64.114 billion (up 28.81%).

Non-current Liabilities decreased by 10.76% (IDR5.921 billion) from IDR55.017 (2019) to IDR49.096 billion which was mainly caused by a decrease in Bank Liabilities by IDR5.100 billion (9.49%) to IDR48.644 billion compared to IDR 53.745 billion (2019).

Equity

As of 31 December 2020, the Company's total equity reached Rp. 49.918 billion or an increase of 122.11% (Rp. 27.443 billion) compared to 2019 which amounted to Rp. 22.475 billion, mainly due to additional paid-up capital of Rp. 26.329 billion (2019).

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan

Pendapatan Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25,377 miliar, berkurang Rp16,056 miliar atau 38,75% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp41,432 miliar. Penyebabnya terutama adalah berkurangnya pendapatan dari Infrastruktur sebesar Rp4 miliar (16,67%) dari Rp24 miliar menjadi Rp20,000 miliar.

Beban Pokok Penjualan

Pada tahun 2020, beban pokok penjualan Perseroan mencapai Rp14,322 miliar atau menurun sebesar Rp9,408 miliar (39,65%) dari Rp23,729 miliar (2019) yang disebabkan menurunnya beban Bangunan dan Beban Infrastruktur masing-masing sebesar 62,58% (menjadi Rp10,208 miliar) dan 19,86% (menjadi Rp2,530 miliar).

Laba Kotor

Menurunnya Beban Pokok Penjualan tidak meningkatkan Laba Kotor yang tercatat mencapai Rp 11,055 miliar atau menurun Rp6,648 miliar (37,55%) dibandingkan perolehan tahun 2019 sebesar 17,703 miliar.

Laba Usaha

Laba Usaha mengalami penurunan dari Rp10,704 miliar menjadi Rp5,227 atau menurun 51,17%. Menurunnya Usaha tersebut disebabkan oleh akibat menurunnya Laba Kotor.

Laba Bersih Tahun berjalan

Untuk tahun 2020 ini Perseroan mencatat Laba Bersih tahun berjalan sebesar negatif Rp4,045 miliar atau menurun 354,77% atau Rp5,633 miliar dari Rp1,588 miliar di tahun sebelumnya. Menurunnya Laba Bersih disebabkan oleh menurunnya Laba Usaha walaupun Beban Umum dan Administrasi serta Beban Keuangan juga menurun.

Laba Komprehensif

Mengenai Laba Komprehensif, untuk tahun 2020 tercatat negatif Rp3,886 miliar atau menurun Rp5,399 miliar (356,93%) dibandingkan Rp1,512 miliar (2019). Laba Komprehensif tahun 2020 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas Induk juga mencapai negatif Rp3,886 miliar atau menurun Rp5,399 miliar (356,93%) dibandingkan Rp1,512 miliar (2019).

Laba per Saham

Laba per Saham Dasar Perseroan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas pada tahun 2020 tercatat sebesar negatif Rp4 atau menurun negatif Rp16 (133,33%) dibandingkan Rp12 (2019).

INCOME STATEMENT

Revenue

The Company's revenue as of 31 December 2020 was IDR 25.377 billion, reduced by IDR 16.056 billion or 38.75% compared to 2019 which amounted to IDR 41.432 billion. This was mainly due to a decrease in revenue from infrastructure by Rp. 4 billion (16.67%) from Rp. 24 billion to Rp. 20.000 billion.

Cost of Goods Sold

In 2020, the Company's cost of goods sold reached IDR 14.322 billion or decreased by IDR 9.408 billion (39.65%) from IDR 23.729 billion (2019) due to decrease in Building and Infrastructure Expenses by 62.58% (to Rp.10.208 billion) and 19.86% (to Rp2.530 billion) respectively.

Gross Profit

The decrease in Cost of Goods Sold did not increase the Gross Profit which was recorded at Rp. 11.055 billion or decreased by Rp. 6.648 billion (37.55%) compared to the Gross Profit in 2019 of 17.703 billion.

Operating Profit

Operating Profit has decreased from IDR10.704 billion to IDR 5.227 or decreased by 51.17%. The decline in business was caused by a decrease in Gross Profit.

Net Income for the Current Year

For 2020, the Company recorded a negative net income of Rp4.045 billion or decreased by 354.77% or Rp5.633 billion from Rp1.588 billion in the previous year. The decrease in net income was due to a decrease in operating profit, although general and administrative expenses and financial expenses also decreased.

Comprehensive Income

As for Comprehensive Income, in 2020 it was recorded as negative IDR 3.886 billion or decreased by IDR 5.399 billion (356.93%) compared to previous year of IDR 1.512 billion (2019). Comprehensive Income for 2020 attributable to owners of parent entity also reached negative IDR 3.886 billion or decreased by IDR 5.399 billion (356.93%) compared to IDR 1.512 billion (2019).

Earnings per Share

Basic Earnings per Share of the Company attributable to the owner of the entity in 2020 was recorded at negative IDR 4 or decreased by negative IDR 16 (133.33%) compared to IDR 12 (2019).

Laporan Arus Kas

Arus Kas dari aktivitas operasi

Arus Kas yang digunakan dari aktivitas operasi pada tahun 2020 adalah sebesar negatif Rp1,847 miliar atau menurun 119,18 % atau Rp11,478 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp9,630 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Penerimaan Kas dari Pelanggan dan Kas yang dihasilkan dari operasi, yakni masing-masing menurun sebesar Rp10,176 miliar (23,49%) menjadi Rp33,314 miliar, dan Rp20,577 miliar (51,40%) menjadi Rp9,999 miliar.

Arus Kas dari aktivitas investasi

Arus Kas dari aktivitas investasi di tahun 2020 mengalami peningkatan dari negatif Rp42,900 miliar (2019) menjadi negatif Rp40,455 atau naik sebesar Rp2,445 miliar (5,70%). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Penambahan Properti Investasi sebesar Rp17,966 miliar sehingga meningkat dari negatif Rp58,342 (2019) menjadi negatif Rp40,376 miliar atau naik 30,79%.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan meningkat (32,24%) dari Rp31,408 miliar menjadi Rp41,536 miliar. Peningkatan tersebut terutama karena menurunnya Pembayaran utang bank jangka pendek dari Rp190,796 miliar menjadi Rp110,957 miliar atau menurun 41,85%.

Kemampuan Membayar Utang Dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang Perseroan diukur dengan sejumlah rasio. Rasio total hutang terhadap ekuitas Perseroan pada tahun 2020 mencapai 2,38 kali dibandingkan tahun lalu sebesar 5,10. Sedangkan rasio lancar Perseroan pada 2020 mencapai 19,11%, masih lebih sedikit dibandingkan 2019 sebesar 32,07%.

Berdasarkan rasio-rasio keuangan tersebut di atas, Dapat dikatakan bahwa Perseroan memiliki tingkat kolektibilitas piutang yang baik dan seluruh piutang usaha dapat ditagih sehingga tidak memerlukan pembentukan cadangan penurunan nilai. Selain itu Perseroan masih memiliki kemampuan yang cukup dalam membayar hutang.

Struktur Permodalan

Perseroan mengelola permodalan dengan tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Selain itu struktur modal disesuaikan terkait dengan perubahan kondisi ekonomi.

Cash Flow Statement

Cash Flow from operating activities

Cash flow used from operating activities in 2020 amounted to negative Rp1.847 billion or decreased by 119.18% or Rp11.478 billion compared to the previous year which was Rp9.630 billion. This decrease was mainly due to decrease in cash receipts from customers and cash generated from operations, by Rp10.176 billion (23.49%) to Rp33.314 billion and by Rp20.577 billion (51.40%) to Rp9,999 billion respectively.

Cash Flow from investing activities

Cash Flow from investing activities in 2020 increased from negative IDR 42.900 billion (2019) to negative IDR 40.455 or an increase of IDR 2.445 billion (5.70%). This increase was mainly due to the decrease of Investment Properties of Rp. 17.966 billion, increasing from negative Rp. 58.342 (2019) to negative Rp. 40.376 billion, or an increase of 30.79%.

Cash Flow from Financing Activities

Cash Flow from Financing Activities increased (32.24%) from IDR31.408 billion to IDR41.536 billion. The increase was mainly due to a decrease in short-term bank debt payments from Rp190.796 billion to Rp110.957 billion or a decrease of 41.85%.

Debt Servicing Ability and Accounts Receivable Collectability Level

The ability to service debts and the collectability of Company's receivables are measured by a number of ratios. The ratio of the Company's total debt to equity in 2020 reached 2.38 times compared to last year's 5.10. Meanwhile, current ratio of the Company in 2020 will reach 19.11%, still less than 2019 at 32.07%.

Based on the financial ratios mentioned above, it can be said that the Company has a good collectability level and all trade receivables are collectible so that it does not require the formation of an allowance for impairment. In addition, the Company still has sufficient ability to service its debts.

Capital Structure

The Company manages its capital with the aim of ensuring that the company can maintain a healthy capital ratio in order to support the business and maximize shareholder value. In addition, the capital structure is adjusted according to changes in economic conditions.

Perseroan memantau modalnya dengan menggunakan analisis *gearing ratio* (rasio utang terhadap modal), yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal. Utang bersih dihitung dari utang lain-lain jangka panjang, utang obligasi konversi dan utang bank jangka panjang dikurangi kas dan bank. Jumlah modal berdasarkan pada jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Produksi dan Laba Rugi Per Segmen Usaha

Usaha produksi dan laba rugi per segmen usaha dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki, segmen usaha dibagi berdasarkan sektor usaha, yakni Infrastruktur dan konstruksi. Untuk sektor Infrastruktur menghasilkan sebesar Rp20,000 miliar dan untuk sektor konstruksi Rp5,162 miliar. Perseroan juga mendapatkan pendapatan dari sewa gedung sebesar Rp213.750 juta. Dikurangi dengan sejumlah beban pokok, maka dihasilkan laba bersih tahun berjalan negatif Rp4,045 miliar.

The company monitors its capital by using gearing ratio analysis (debt to equity ratio), which divides net debt to total equity. Net debt is calculated from other payables, convertible bonds and long-term bank loans less cash and bank. Total equity is based on the amount of equity attributable to the owners of the parent entity.

Production and Profit and Loss Per Business Segment

Production and Profit and Loss Per Business Segment
In evaluating each segment's performance and determining the allocation of resources owned, business segments are divided based on market sector which are Infrastructure and construction. Infrastructure sector earning IDR 20 billion and for the construction sector earning IDR 5.162 billion. Also company get income from building rent IDR 213.750 million). Subtracting a number of principal expenses, the resulting net profit for the year was negative IDR 4.045 billion.





TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan yang Baik di dalam lingkup perusahaan diterapkan melalui pelaksanaan-pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yang terdiri atas prinsip-prinsip: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran, di dalam pengelolaan perusahaan.

Bagi Lancartama, pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut adalah mutlak, demi memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

Dengan dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG tersebut. Lancartama mampu menyelaraskan hubungan antar pemangku kepentingan sehingga Perseroan menghasilkan keputusan yang efektif, efisien dapat dipertanggungjawabkan serta dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan patuh terhadap UU.

Penerapan Prinsip-prinsip GCG tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015, peraturan Bursa Efek Indonesia, serta undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Perseroan juga mematuhi prinsip-prinsip GCG yang diberlakukan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta Pedoman Umum GCG Indonesia.

Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola Perusahaan tercermin pada organ-organ perusahaan sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
- Dewan Komisaris, dan
- Direksi.

Struktur Organisasi Perseroan

Peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta organ-organ Perseroan lainnya tertuang di dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Pedoman tersebut juga mengatur etika Karyawan, bagaimana mereka menjalankan fungsi dan tugas masing-masing secara efektif, berinteraksi satu sama lain.

RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang secara hirarkis memegang kekuasaan tertinggi karena RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris, antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris

Good Corporate Governance within the scope of the company is implemented through the application of GCG (Good Corporate Governance) principles which include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, in the management of the company.

For Lancartama, the implementation of these GCG principles is absolute, in order to maximize company value, improve company performance and contribution, and maintain the company's long-term sustainability.

By implementing these GCG principles, Lancartama is able to harmonize the relationship between stakeholders so that the Company can make decisions that are effective, efficient and accountable and based on high moral values and compliant with laws.

The implementation of GCG principles refers to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market, the Company's Articles of Association, Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 21/POJK.04/2015, Indonesian Stock Exchange regulations, and other related laws and regulations. The Company also complies with the GCG principles enforced by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) as well as the General Guidelines for GCG in Indonesia.

Corporate Governance Structure

The structure of corporate governance is reflected in the company's organs as follows:

- General Meeting of Shareholders (GMS),
- Board of Commissioners, and
- Directors.

Corporate Organizational Structure

The roles and responsibilities of Board of Commissioners and Directors as well as other Company organs are contained in the Company's Articles of Association which govern the guidelines for implementing GCG principles.

The guidelines also govern employee ethics, how to perform their respective functions and duties effectively, interacting with one another.

GMS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is company organ who hold the highest authority hierarchically because the GMS holds the authorities that are not owned by the Directors or Board of Commissioners, including appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and Directors, evaluating the performance of the Board of Commissioners and Di-

dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan.

Selain itu RUPS juga menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi.

RUPS juga merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting dan strategis terkait modal yang ditanam dalam perusahaan, serta keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan. Namun, tanpa mengurangi kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS, RUPS maupun pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

RUPS yang diselenggarakan setahun sekali atau sering disebut RUPS Tahunan atau RUPST, jenis RUPS lainnya adalah RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perusahaan untuk membahas hal-hal krusial terkait dengan perusahaan yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham.

RUPST

A. Penyelenggaraan Rapat

Perseroan mengadakan RUPST (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan) diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2020 di Wisma Lancartama Lt. 5 Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi :
Dewan Komisaris : Djaja Julia Supena & Rizka Alfrina
Direksi : Alex Widjaja & Kathrin Widjaja

C. Jumlah Saham yang Hadir pada Saat Rapat

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan Perseroan yang mewakili mayoritas saham dari yang 1.000.000.000 lembar saham yang telah dikeluarkan Perusahaan.

rectors, approving amendments to the Articles of Association, approving annual reports.

In addition, the GMS also determines the form and amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors and makes decisions related to corporate actions or other strategic decisions proposed by the Directors.

GMS is also a means for shareholders to make important and strategic decisions related to the capital invested in the company, as well as long-term sustainability of the company, by taking into account the provisions of the Articles of Association and laws and regulations.

GMS decisions are made in a fair and transparent manner. However, without reducing the power and authority held by the GMS, the GMS and shareholders cannot intervene in the implementation of the duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and Directors to carry out their obligations and rights in accordance with the Articles of Association and laws and regulations.

GMS is held once a year or often referred to as Annual GMS or AGMS, another type of GMS is EGMS (Extraordinary General Meeting of Shareholders) which can be held at any time according to company needs to discuss crucial matters of the company that require approval from the shareholders.

AGMS

A. Implementation of Meeting

The Company held the AGMS (Annual General Meeting of Shareholders) on 7 July 2020 at Wisma Lancartama Lt. 5 Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, South Jakarta 12120.

B. Board of Commissioners and Directors Attendance

*The meeting was attended by the Board of Commissioners and Directors:
Board of Commissioners: Djaja Julia Supena & Rizka Alfina
Directors : Alex Widjaja & Kathrin Widjaja*

C. Total Shareholders Present at the Meeting

The meeting was attended by shareholders of the Company who represent the majority of 1.000,000,000 shares that have been issued by the Company.

D. Keputusan Rapat

Berhubung acara Rapat telah diketahui oleh seluruh pemegang saham dan setelah diadakan pembahasan sesuai dengan acara Rapat, maka Ketua Rapat langsung mengusulkan dalam Rapat dan kemudian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui dan memutuskan:

E. Keputusan dan realisasi RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

D. Meeting Decisions

As the meeting agenda has been made known to all shareholders and after discussion was held in accordance with the Meeting agenda, Chairperson of the Meeting made direct proposals in the Meeting in which consensus was reached by way of deliberation, to approve and decide:

E. Decisions and implementations of the AGMS are as follows:

No	Keputusan Decision	Realisasi Implementation
1.	<p>a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.</p> <p>a. <i>Provided full acquittance and release of responsibility (acquit et de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in Financial Year 2019 as long as these actions are reflected in the Annual Report.</i></p> <p>b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p>b. <i>Approved and ratified the Annual Report of the Board of Directors of the Company for Financial Year 2019, including the Company's Activity Report, 2019 Financial Statements which have been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) and the Board of Commissioners' Supervisory Report.</i></p>	<p>Telah direalisasikan sepenuhnya. <i>Fully implemented</i></p>
2.	<p>Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp. 1.587.817.503,- (satu miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga rupiah) sebagai berikut: <i>Approved the use of Company's net profit for Financial Year 2019 of Rp. 1,587,817,503,- (one billion five hundred eighty seven million eight hundred seventeen thousand five hundred and three rupiah) as follows:</i></p>	<p>Telah direalisasikan sepenuhnya. <i>Fully implemented</i></p>

No	Keputusan <i>Decision</i>	Realisasi <i>Implementation</i>
	<p>a. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;</p> <p>a. <i>Rp. 50,000,000,- (fifty million rupiah) set aside and recorded as a reserve fund;</i></p> <p>b. Sebesar Rp. 1.537.817.503,- ((satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan, sehingga Perseroan tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.</p> <p>b. <i>Rp. 1,537,817,503,- (one billion five hundred thirty seven million eight hundred seventeen thousand five hundred and three rupiah) was entered and recorded as retained earnings, to increase the working capital of the Company, so that the Company did not distribute cash dividends to the shareholders of the Company.</i></p>	
3.	<p>Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.</p> <p><i>Received report on the use of proceeds from initial public offering of the Company.</i></p>	<p>Telah direalisasikan sepenuhnya.</p> <p><i>Fully implemented</i></p>
4.	<p>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan terdaftar di OJK, yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentianannya.</p> <p><i>Granted the authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant, with the criteria of being independent and registered with the OJK, who will audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2020, as it was being considered and evaluated for the appointment of a Public Accountant, as well as to determine the Accountant's honorarium including the terms of appointment and dismissal.</i></p>	<p>Telah direalisasikan sepenuhnya.</p> <p><i>Fully implemented</i></p>
5.	<p>a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk Tahun Buku 2020 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Ko-</p>	<p>Telah direalisasikan sepenuhnya.</p> <p><i>Fully implemented</i></p>

No	Keputusan Decision	Realisasi Implementation
	<p>misaris untuk menetapkan alokasinya.</p> <p>a. <i>Determined the honorarium and/or other benefits for members of the Company's Board of Commissioners as a whole for Financial Year 2020 and authorized the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation.</i></p> <p>b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.</p> <p>b. <i>Authorized the Board of Commissioners to determine salaries and/or allowances for members of the Company Directors.</i></p>	

Hasil keputusan diatas tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Lancartama Sejati Tbk No. 6 Tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dihadapan R.F.Limpele, S.H selaku Notaris di Jakarta.

The above decisions are recorded in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Lancartama Sejati Tbk No. 6 Dated 7 July 2020 which was recorded before R.F. Limpele, S.H as Notary in Jakarta.

RUPSLB

A. Penyelenggaraan Rapat

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2020 di Wisma Lancartama Lt. 5 Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi :

Dewan Komisaris : Djaja Julia Supena & Rizka Alfrina

Direksi : Alex Widjaja & Kathrin Widjaja

C. Jumlah Saham yang Hadir pada Saat Rapat

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan Perseroan yang mewakili mayoritas saham dari yang 1.000.000.000 lembar saham yang telah dikeluarkan Perusahaan.

D. Keputusan Rapat

Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

EGMS

A. Implementation of Meeting

The 2020 EGMS (Extraordinary General Meeting of Shareholders) was held on 7 July 2020 at Wisma Lancartama Lt. 5 Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, South Jakarta 12120.

B. Board of Commissioners and Directors Attendance

*The meeting was attended by the Board of Commissioners and Directors:
Board of Commissioners: Djaja Julia Supena & Rizka Alfrina
Directors: Alex Widjaja & Kathrin Widjaja*

C. Total Shareholders Present at the Meeting

The meeting was attended by shareholders of the Company who represent the majority of 1.000.000.000 shares that have been issued by the Company.

D. Meeting Decisions

Meeting decisions were reached by deliberation to reach a consensus, to approve and decide the following:

No	Keputusan <i>Decision</i>	Realisasi <i>Implementation</i>
1.	<p>Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama Perseroan mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai penjamin sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (termasuk memberikan jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>), dalam rangka mendapatkan fasilitas keuangan yang diperoleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun <i>refinancing</i> (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.</p> <p><i>Gave the approval to Directors of the Company for and on behalf of the Company to transfer, release or guarantee all or most of the Company's assets in one transaction or several transactions that are independent or related to one another and/or act as guarantor in relation to the Company's and/or its subsidiaries' business activities including providing corporate guarantees in order to obtain financial facilities for the Company and/or its subsidiaries from third parties such as the time extension or refinancing (along with all additions and/or changes thereof), up to the period considered necessary by the Company Directors.</i></p>	<p>Telah direalisasikan sepenuhnya. <i>Fully implemented</i></p>

Hasil keputusan RUPSLB tersebut di atas tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Lancartama Sejati Tbk No. 7 Tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dihadapan R.F.Limpele, S.H selaku Notaris di Jakarta.

The above decision of the EGMS was recorded in the Deed of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Lancartama Sejati Tbk No. 7 Dated 7 July 2020 which was recorded before R.F. Limpele, S.H as Notary in Jakarta.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

Sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014 dan tertuang di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Lancartama Tbk, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan;
2. Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala untuk membahas pengelolaan operasional Perseroan;
3. Mengawasi pengelolaan Perseroan atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan memberikan masukan jika diperlukan;
4. Menominasikan dan menunjuk calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk diajukan dan disetujui dalam RUPS Tahunan;
5. Menentukan jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, berlandaskan pada wewenang yang diberikan dalam RUPS Tahunan;
6. Menunjuk dan menetapkan anggota Komite Audit;

Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Lancartama Sejati nomor 6 tanggal 7 Juli 2020

No	Keputusan Decision	Realisasi Implementation
1.	Djaja Julia Supena	Komisaris Utama/ President Commissioner
2.	Rizka Alfrina	Komisaris Independen/ Independent Commissioner

Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, ke depannya Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014, akan memperhatikan:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
- b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;

Board of Commissioners

The Board of Commissioners is a company organ that is responsible for general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and provides advice to the Board of Directors. The Company's Board of Commissioners consists of President Commissioner and Independent Commissioner.

In accordance with the Corporate Law and OJK Regulation No. 33/2014 and stated in the Articles of Association of the Company and the Code of Conduct for Board of Commissioners of PT Lancartama Tbk, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:

1. *Supervise Directors' management of the Company and provide approval and ratification of the Company's work plan and annual budget;*
2. *Hold regular meetings to discuss the operational management of the Company;*
3. *Oversee the management of the Company on the policies set by the Directors and provide input if needed;*
4. *Nominate and appoint candidate members of the Board of Commissioners and Directors to be proposed and approved in the Annual GMS;*
5. *Determine the amount of remuneration for members of Board of Commissioners and Directors, based on authority given in the Annual GMS;*
6. *Appoint and assign members of the Audit Committee;*

The composition of Board of Commissioners based on the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Lancartama Sejati number 6 dated 7 July 2020

In determining the amount of remuneration, moving forward the Board of Commissioners, in accordance with OJK Regulation No. 34/2014, will pay attention to:

- a. *The remuneration that applies to the industry is appropriate with the Company's business activities and business scale from the Company;*
- b. *Duties, responsibilities and authorities of members of Directors and/or members of the Board of Commissioners in relation to the achievement of the Company's goals and performance;*

- c. Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat *variable*.

- c. *Performance target or performance of each Director and/or members of the Board of Commissioners; and*
- d. *Balance between fixed and variable allowances.*

Rapat Dewan Komisaris

Selama 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut :

Board of Commissioners Meeting

Throughout 2020, the Board of Commissioners held 6 (six) meetings with the attendance frequency as follows:

Nama Name	Jabatan Title	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Persentase Kehadiran (%) Attendance Percentage (%)
Djaja Julia Supena	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	6	100
Rizka Alfrina	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	6	100

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Ke depannya Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Board of Commissioners Meeting Agenda

Moving forward, the Board of Commissioners plans to hold a meeting at least 1 (one) time in 2 (two) months.

No	Tanggal Date	Agenda
1.	17 Januari 2020 <i>17 January 2020</i>	Laporan Tahunan 2019 <i>Annual Report 2019</i>
2.	20 Maret 2020 <i>20 March 2020</i>	Rencana Kerja Perusahaan <i>Company Work Plan</i>
3.	15 Mei 2020 <i>15 May 2020</i>	RUPS Tahunan <i>AGMS</i>
4.	10 Juli 2020 <i>10 July 2020</i>	Laporan Kinerja <i>Performance Report</i>
5.	25 September 2020 <i>25 September 2020</i>	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan <i>Socialization of Financial Services Authority Regulations</i>
6.	20 November 2020	Rencana Kerja Perusahaan



Dewan Komisaris memberikan pendapat dan masukan kepada Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan selama 2020, melakukan Fungsi pengawasan dan penasihat terhadap Direksi dan juga mengoptimalkan serta melakukan evaluasi dan penilaian kinerja atas komite yang berada di bawahnya yakni antara lain Komite Audit dalam mengawasi laporan keuangan terkait operasional perusahaan.

Dewan Komisaris belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi karena fungsi komite tersebut untuk sementara dapat dilaksanakan oleh Direktur.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Ke depannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014 dan Anggaran Dasar dan Tata Tertib Direksi PT Lancartama Sejati Tbk.

Direksi tidak bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris, melainkan kepada RUPS sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Penilaian Kinerja Direksi

Dalam mengelola perusahaan, Direksi dinilai dan dievaluasi kinerjanya oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan kriteria yang disusun oleh Fungsi Nominasi.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual, baik yang disampaikan oleh Dewan Komisaris maupun yang disampaikan langsung oleh Direksi dalam RUPST, merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali Anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian dan peningkatan efektivitas Direksi, dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi.

The Board of Commissioners provided opinion and input to the Directors regarding management of the Company throughout 2020, carried out supervisory and advisory functions to the Directors and also optimized and reviewed the performance of the committees under it, namely the Audit Committee in supervising financial reports related to company operations.

The Board of Commissioners has not yet established a Nomination and Remuneration Committee because the committee's functions can be temporarily carried out by Director.

The Company and Board of Commissioners do not have contracts related to employee benefits after the end of the employment period.

Directors

The Company's Board of Directors consist of a President Director and a Director.

Directors are assigned to carry out and undertake responsibility for management of the Company in the interests of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company as stipulated in the articles of association. Moving forward, the Company Directors will continue to carry out their duties and responsibilities in accordance with the Company Law and OJK Regulation No. 33/2014 and the Articles of Association and Code of Conduct of the Board of Directors of PT Lancartama Sejati Tbk.

The Board of Directors does not report to the Board of Commissioners, but to the GMS as a form of accountability for management of the company in the context of implementing GCG principles.

Directors Performance Review

In managing the company, Directors are assessed and evaluated on their performance by the Board of Commissioners both individually and collectively based on the criteria prepared by the Nomination Function.

The results of the performance review of each individual member of Directors, whether submitted by the Board of Commissioners or submitted directly by the Board of Directors at the AGMS, are one of the basic considerations for Shareholders to dismiss and/or reappoint the Member of the Board of Directors concerned. Results of the performance review are means of assessing and increasing the effectiveness of the Directors, and are an integral part of the compensation and incentives scheme for members of the Board of Directors.

Direksi berpedoman pada Tata Tertib Direksi PT Lancartama Sejati Tbk.

Directors are guided by the Code of Conduct of Directors of PT Lancartama Sejati Tbk.

Tugas utama Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud tujuan.
2. Wajib mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
4. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan;
5. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan, dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum tahun buku tersebut dimulai.

The main duties of Directors are as follows:

1. Undertake full responsibility in implementing duties in the interests of the Company to achieve the set goal.
2. Fully accountable for their duties in accordance with the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association.
3. Lead, manage, and control the Company in accordance with the Company objectives;
4. Control, maintain, and take care of Company assets;
5. Prepare an annual work plan which contains the annual budget of the Company, and must be submitted to the Board of Commissioners for approval, before the financial year begins.

Penilaian Direksi atas kinerja Komite di bawahnya

Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi dibantu oleh organ atau komite yang bertanggungjawab kepada Direksi, yakni Satuan Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan. Evaluasi dan penilaian atas kinerja kedua organ tersebut menjadi tanggungjawab dan kewenangan Direksi.

Directors' Review of the reporting Committees' performance

In carrying out its duties, the Directors are assisted by an organ or committee responsible to the Board of Directors, namely the Internal Audit Unit and Corporate Secretary. Performance evaluation and review of these two organs is the responsibility and authority of the Board of Directors.

Susunan Direksi

Susunan Direksi berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Lancartama Sejati nomor 6 tanggal 7 Juli 2020 sebagai berikut:

Directors Composition

The composition of the Board of Directors based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Lancartama Sejati number 6 dated 7 July 2020 as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Alex Widjaja	Direktur Utama <i>President Director</i>
Kathrin Widjaja	Direktur <i>Director</i>

Rapat Direksi

Selama 2020, Direksi telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut :

Directors Meeting

Throughout 2020, the Board of Directors has held 12 (twelve) meetings with the attendance frequency as follows:

Nama Name	Jabatan Title	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Persentase Kehadiran (%) Attendance Percentage (%)
Alex Widjaja	Direktur Utama <i>President Director</i>	12	100
Kathrin Widjaja	Direktur <i>Director</i>	12	100

Agenda Rapat Direksi

Directors Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda
1.	26 Januari 2020 26 January 2020	Kinerja Perseroan Company Performance
2.	10 Februari 2020 10 February 2020	Rencana Pengembangan Usaha Business Development Plan
3.	13 Maret 2020 13 March 2020	Update Kinerja Perusahaan Company Performance Update
4.	3 April 2020 3 April 2020	Strategi Keuangan Financial Strategy
5.	4 Mei 2020 4 May 2020	Update Kinerja Perusahaan Company Performance Update
6.	19 Juni 2020 19 June 2020	Persiapan RUPS Tahunan Preparation for AGMS
7.	6 Juli 2020 6 July 2020	Review Kinerja Perusahaan Company Performance Review
8.	7 Agustus 2020 7 Agustus 2020	Laporan Kinerja Keuangan Financial Performance Review
9.	20 September 2020 20 September 2020	Rencana Jangka Panjang Perusahaan Company Long Term Plan
10.	9 Oktober 2020 9 October 2020	Update Kinerja Perusahaan Company Performance Update
11.	6 November 2020 6 November 2020	Rencana Pengembangan Usaha Business Development Plan
12.	11 Desember 2020 11 December 2020	Persiapan Public Expose Preparation for Public Expose

Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi

Komisaris dan Direksi melaksanakan Rapat gabungan yang dilaksanakan selama 4 kali dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Joint Meetings of Commissioners and Directors

The Commissioners and Directors held 4 joint meetings with the frequency of attendance as follows:

Nama Name	Jabatan Title	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Persentase Kehadiran (%) Attendance Percentage (%)
Djaja Julia Supena	Komisaris Utama President Commissioner	4	100
Rizka Alfrina	Komisaris Independen Independent Commissioner	4	100
Alex Widjaja	Direktur Utama President Director	4	100
Kathrin Widjaja	Direktur Director	4	100

Agenda Rapat Dewan Komisaris**Board of Commissioners Meeting Agenda**

No	Tanggal Date	Agenda
1.	22 Februari 2020 <i>22 February 2020</i>	Rencana Jangka Panjang Perusahaan <i>Company Long Term Plan</i>
2.	2 Juli 2020 <i>2 July 2020</i>	RUPS Tahunan AGMS
3.	15 Oktober 2020 <i>15 October 2020</i>	Laporan Rencana Pengembangan Usaha <i>Business Development Plan Report</i>
4.	20 Desember 2020 <i>20 December 2020</i>	Laporan Kinerja Perusahaan <i>Company Performance Report</i>

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

The Company and Board of Directors do not have a contract related to employee benefits after the end of the employment period.

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan

Family Relationship of Members of Directors, Board of Commissioners and Shareholders of the Company

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

The nature of family relationships between members of Directors, Board of Commissioners, and the Company's Shareholders are as follows:

Nama Name	Jabatan Title	Hubungan Kekeluargaan Relationship
Alex Widjaja	Direktur Utama <i>President Director</i>	Adik kandung dari Kathrin Widjaja, Direktur sekaligus Pemegang Saham Perseroan <i>Younger brother of Kathrin Widjaja, Director and Shareholder of the Company</i>
Kathrin Widjaja	Direktur <i>Director</i>	Kakak kandung dari Alex Widjaja, Direktur utama sekaligus Pemegang Saham Perseroan <i>Older sister of Alex Widjaja, Director and Shareholder of the Company</i>
Djaja Julia Supena	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Suami Kathrin Widjaja, Direktur sekaligus Pemegang Saham Perseroan Husband of Kathrin Widjaja, Director and Shareholder of the Company
Rizka Alfrina	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	

Program Pelatihan dan Pengembangan Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, di sepanjang tahun 2020 anggota Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri berbagai program pelatihan dan pengembangan sebagai berikut:

Training and Development Program for Board of Commissioners and Directors

To improve competence in carrying out their duties and responsibilities, throughout 2020 members of the Board of Commissioners and Directors attended various training and development program as follows:

Nama Name	Jabatan Title	Persentase Kehadiran (%) Attendance Frequency (%)	Penyelenggara Organiser
Acara CEO Networking 2020, CEO Networking Event 2020	24 November 2020 24 November 2020	Alex Widjaja (Dirut) Alex Widjaja (President Director)	("OJK"), ("IDX"), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI") dan ("KSEI") ("OJK"), ("IDX"), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI") dan ("KSEI")
Acara Penutupan Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 dan Pembukaan Perdagangan BEI Tahun 2021. Indonesia Stock Exchange (IDX) Trade Closing Ceremony in 2020 and Trade Opening Ceremony in 2021	30 Desember 2020 dan 4 Januari 2021 30 December 2020 and 4 January 2021	Alex Widjaja (Dirut) Alex Widjaja (President Director)	IDX

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 027/SK/DIR/XI/2019 tanggal 7 November 2019, diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan yakni:

Nama : Destryani Sianturi
 Alamat : JL Pakubuwono VI No. 99 A-B
 Gunung, Kebayoran Baru,
 Jakarta, 12120
 Nomor Telp/Fax : (021) 739 2222/ 2751 0724
 Email : info@lancartamasejati.com
 Pengalaman kerja :
 PT Unitama Analitika Perkasa sebagai Sekretaris, tahun 2004 – 2007
 PT Geotechnical & Environmental Service sebagai Technical Support, tahun 2007 – 2010
 PT Geotechnical & Environmental Service sebagai Personnel Assistant and Procurement Coordinator, tahun 2010 - 2012

Corporate Secretary

Based on the Decree of the Board of Directors Number 027/SK/DIR/XI/2019 dated 7 November 2019, the following was appointed as Corporate Secretary of the Company, namely:

Name : Destryani Sianturi
 Address : JL Pakubuwono VI No. 99 A-B
 Gunung, Kebayoran Baru,
 Jakarta, 12120
 Phone / Fax Number : (021) 739 2222/2751 0724
 Email : info@lancartamasejati.com
 Work experience :
 PT Unitama Analitika Perkasa as Secretary, 2004 - 2007
 PT Geotechnical & Environmental Service as Technical Support, 2007 - 2010
 PT Geotechnical & Environmental Service as Personnel Assistant and Procurement Coordinator, 2010 - 2012

PT Geotechnical & Environmental Service sebagai Project Assistant & Business Development Support, tahun 2012 - 2016

Sekretaris Direktur Utama PT Lancartama Sejati, 2017 - 2019

Corporate Secretary PT Lancartama Sejati Tbk, tahun 2019 – sekarang

Sesuai Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk meningkatkan kompetensinya, Perusahaan telah mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan Perseroan dalam seminar atau program pelatihan yang diadakan oleh BEI, OJK, atau pihak lain yang relevan, yang lebih rincinya dapat dilihat di sub bab Sumber Daya Manusia.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor No. 025/SK/KOM/XI/2019 tanggal 7 November 2019 Tentang Pembentukan Komite Audit. Adapun susunan anggota Komite Audit telah ditetapkan sebagai berikut:

Ketua : Rizka Alfrina

Anggota 1: I Made Satya Guna Warga Negara Indonesia, usia 48 tahun.

Meraih gelar Master of Finance dari RMIT University, Australia pada tahun 1998-1999.

PT Geotechnical & Environmental Service as Project Assistant & Business Development Support, 2012 - 2016

Secretary to the President Director of PT Lancartama Sejati, 2017 - 2019

Corporate Secretary of PT Lancartama Sejati Tbk, 2019 – present

In accordance with OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014, Corporate Secretary of the Company has the following duties and responsibilities:

- a. *Keep abreast of developments in the capital market, particularly the applicable laws and regulations in the capital market*
- b. *Provide input to Directors and Board of Commissioners of the Company to comply with the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector;*
- c. *Assist the Directors and Board of Commissioners in implementing good corporate governance which includes:*
 1. *Information disclosure to the public, including the availability of information on the Company's website;*
 2. *Submission of reports to the Financial Services Authority on time;*
 3. *Organize and document the General Meeting of Shareholders;*
 4. *Organize and document Directors and/or Board of Commissioners meetings; and*
 5. *Implementation of the Company's orientation program for the Directors and/or Board of Commissioners.*
- d. *As a liaison between the Company and shareholders of the Company, Financial Services Authority, and other stakeholders.*

To improve competence, the Company has sent the Corporate Secretary to seminars or training programs held by the IDX, OJK, or other relevant parties, the details of which can be seen in the Human Resources sub-section.

Audit Committee

The Company has formed an Audit Committee based on the Decree of the Board of Commissioners Number No. 025/SK/KOM/XI/2019 dated 7 November 2019 regarding the Establishment of Audit Committee. The members of the Audit Committee are as follows:

Chairman : Rizka Alfrina

Member 1: I Made Satya Guna, Indonesian citizen, 48 years old.

Obtained Master of Finance from RMIT University, Australia in 1998-1999.

Pengalaman Kerja:

Mar 1999 – Des 1999 : Corporate Finance Officer di PT Shingsung Kosia.

Jan 2000 – Apr 2001 : Corporate Data Analyst di CEIC Data Co Ltd.

Apr 2001 – Jul 2004 : Research Assistant di Merrill Lynch Indonesia.

Agustus 2004 – Mei 2007 : Equity Analyst di PT BNI Securities.

Mei 2007 – Jan 2008 : Senior Equity Analyst di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.

Des 2015 – Feb 2018 : Direktur Independen di PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.

Feb 2008 – Sekarang : PT UOB Kay Hian Sekuritas, Strategic & Corporate Governance.

Anggota 2 : Ismail Hasan

Warga Negara Indonesia, usia 34 tahun.

Meraih gelar DIV Akuntansi dari University STAN Jakarta pada tahun 2012.

Pengalaman Kerja:

Jan 2008 – Nov 2013 : Senior Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Jan 2014 – Mar 2014 : Auditor KAP Ghazali, Sahat & Rekan

Sep 2014 – Jan 2016 : Kepala Bagian Internal Audit PT Wonokoyo Jaya Corporindo

Feb 2016 – Jan 2018 : Internal Audit Supervisor PT Dua Putra Utama Makmur Tbk

Jan 2018 – April 2018 : Internal Audit Assistant Manager PT Cardig Aero Services Tbk

April 2018 – Sekarang : Konsultan PT Paqa Rating Indonesia

Nov 2008 – Sekarang : Komite Audit PT Armada Berjaya Trans Tbk

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 7 November 2019, dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.55/2015. Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

Work experience:

Mar 1999 - Dec 1999: Corporate Finance Officer at PT Shingsung Kosia.

Jan 2000 - Apr 2001: Corporate Data Analyst at CEIC Data Co Ltd.

Apr 2001 - Jul 2004: Research Assistant at Merrill Lynch Indonesia.

August 2004 - May 2007: Equity Analyst at PT BNI Securities.

May 2007 - Jan 2008: Senior Equity Analyst at PT Andalan Artha Advisindo Securities.

Dec 2015 - Feb 2018: Independent Director at PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.

Feb 2008 - Present: PT UOB Kay Hian Sekuritas, Strategic & Corporate Governance.

Member 2: Ismail Hasan

Indonesian citizen, 34 years old.

Received a DIV in Accounting from University STAN Jakarta in 2012.

Work experience:

Jan 2008 - Nov 2013: Senior Auditor of Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)

Jan 2014 - Mar 2014: Auditor of KAP Ghazali, Sahat & Rekan

Sep 2014 - Jan 2016: Head of Internal Audit at PT Wonokoyo Jaya Corporindo

Feb 2016 - Jan 2018: Internal Audit Supervisor at PT Dua Putra Utama Makmur Tbk

Jan 2018 - April 2018: Internal Audit Assistant Manager at PT Cardig Aero Services Tbk

April 2018 - Present: Consultant at PT Paqa Rating Indonesia

Nov 2008 - Present: Audit Committee at PT Armada Berjaya Trans Tbk

The duties, responsibilities and authorities of the Audit Committee have been outlined in the Company's Audit Committee Charter dated 7 November 2019, and are in accordance with OJK Regulation No.55/2015. The Company's Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities which include the following:

- a. Review financial information that will be issued by the Company to the public and/or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the Company's financial information;
- b. Review on compliance with laws and regulations relating to Company's activities;
- c. Provide independent opinion in the event of disagreements between management and Accountant for the service rendered;
- d. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment, and service fees;

- a. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- b. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- c. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- d. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- e. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit rutin dilakukan untuk memastikan bahwa faktor risiko telah diantisipasi. Disamping itu, Komite Audit secara rutin melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Rapat Komite Audit telah dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota adalah sebagai berikut.

Nama Name	Jabatan Title	Jumlah Rapat Number of meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Persentase Kehadiran (%) Attendance Percentage (%)
Rizka Alfrina	Ketua Chairman	4	4	100
I Made Satya Guna	Anggota Member	4	4	100
Ismail Hasan	Anggota Member	4	4	100

- a. Review the implementation of audits by the internal auditors and supervise follow-ups implementation by the Directors on internal auditors' findings;
- b. Review the risk management implementation activities carried out by the Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;
- c. Review complaints relating to the accounting process and financial reporting of the Company;
- d. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company; and
- e. Maintain the confidentiality of documents, data and information of the Company.

In carrying out its duties, the Company's Audit Committee has the following authorities:

- a. Access the Company's documents, data and information that are necessary regarding employees, funds, assets and resources of the Company;
- b. Communicate directly with employees, including the Directors and parties who perform internal audit, risk management, and Accountant regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee;
- c. Involve independent parties outside the members of Audit Committee who are required to assist in carrying out their duties (if needed); and
- d. Perform other authorities assigned by the Board of Commissioners.

Audit Committee Meetings

Audit Committee meetings are held regularly to ensure that risk factors are fully anticipated. In addition, the Audit Committee regularly evaluates risk management policies carried out by the Board of Directors. Audit Committee meetings are held regularly every 3 (three) months. The frequency and attendance levels of each member are as follows.

Satuan Audit Internal (SAI)

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 026/SK/DIRKOM/XI/2019 tanggal 7 November 2019, Perseroan telah mengangkat Lia Ariesta Fitriana sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Adapun keterangan Lia Ariesta Fitriani adalah sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia, usia 30 tahun. Meraih gelar Sarjana jurusan Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pengalaman Kerja:

2008 – 2010 : Akunting di PT Transpacific Global
2010 – 2011 : Akunting di PT Sirkel Utama
2011 - 2013 : Akunting di PT Vita Samudera
2013 – 2019 : Akunting di PT Lancartama Sejati
2019 – sekarang : Internal Audit di PT Lancartama Sejati Tbk

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;

Internal Audit Unit (IAU)

The Company has established an Internal Audit Unit and drafted an Internal Audit Charter in accordance with OJK Regulation No. 56/2015.

Based on Decree of the Board of Directors of the Company Number 026/SK/DIRKOM/XI/2019 dated 7 November 2019, the Company has appointed Lia Ariesta Fitriana as Head of the Internal Audit Unit.

Lia Ariesta Fitriani's biography is as follows:

Indonesian citizen, 30 years old. Holds a Bachelor's degree in Accounting from Muhammadiyah University Jakarta.

Work experience:

*2008 – 2010 : Accountant at PT Transpacific Global
2010 – 2011 : Accountant at PT Sirkel Utama
2011 – 2013 : Accountant at PT Vita Samudera
2013 – 2019 : Accountant at PT Lancartama Sejati
2019 - present : Internal Audit at PT Lancartama Sejati Tbk*

The duties and responsibilities of the Company's Internal Audit Unit are as follows:

- Develop and implement Internal Audit annual plan;*
- Review and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with company policy;*
- Examine and assess the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and others activities;*
- Provide suggestions for improvements and objective information on the activities being audited at all levels of management;*
- Prepare reports on the results of audits and submit the report to President Director and Board of Commissioners;*
- Monitor, analyze and report on the implementation of the improvements that have been suggested;*
- Cooperate with the Audit Committee;*
- Develop a program to evaluate the quality of internal audit activities that it performs; and*
- Perform special checks if required.*

In carrying out its duties and responsibilities, the Company's Internal Audit Unit has the following authorities:

- Access all relevant information regarding the Company in relation to its duties and function;*
- Communicate directly with members of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;*

- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk sementara Perseroan belum membentuk Komite karena fungsi komite tersebut sudah dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. Sesuai Peraturan OJK No. 34/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi.
 - b. Kebijakan atas Remunerasi dan
 - c. Besaran atas Remunerasi.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris diputuskan setiap tahun dalam RUPS bersamaan dengan penetapan besaran remunerasi Direksi. Selain honorarium, Dewan Komisaris juga berhak menerima tunjangan yang

- c. *Hold regular and incidental meetings with the of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee; and*
- d. *Coordinate activities with external auditor activities.*

Nomination and Remuneration Committee

For the time being, the Company has not formed a Committee as the committee's functions have been carried out directly by the Board of Commissioners. In accordance with OJK Regulation No. 34/2014, the duties and responsibilities are as follows:

- a. *Related to the Nomination function:*
 1. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - a. *Composition of the positions of Directors and/or Board of Commissioners.*
 - b. *Policies and criteria required in the Nomination process and*
 - c. *Performance evaluation policy for members of Directors and/or Board of Commissioners*
 2. *Assist the Board of Commissioners in reviewing the performance of members of Directors and/or Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation materials*
 3. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the competence development program for members of Directors and/or Board of Commissioners and*
 4. *Propose candidates who meet the requirements as members of Directors and/or Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
- b. *Related to the Remuneration function:*
 1. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - a. *Remuneration Structure.*
 - b. *Remuneration Policy and*
 - c. *Amount of Remuneration.*
 2. *Assist the Board of Commissioners in conducting performance reviews in accordance with the remuneration received by each member of the Directors and/or Board of Commissioners.*

Board of Commissioners and Directors Remuneration

The amount of remuneration for members of the Board of Commissioners is determined annually at the GMS together with the determination of the amount of remuneration for the Directors. Apart from the honorarium, the Board of Commissioners is also

jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Penentuan besarnya honorarium dan tujuangan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya diputuskan oleh RUPS.

entitled to receive allowances, the amount of which is determined by the GMS. The amount of honorarium and objective is determined based on the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee which is subsequently decided by the GMS.

Adapun besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors for 2020 is as follows:

No.	Jabatan Title	Nilai per Bulan Amount per Month	Total
1.	Direktur Utama <i>President Director</i>	30.000.000	360.000.000
2.	Direktur <i>Director</i>	12.300.000	147.600.000
3.	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	9.000.000	108.000.000
4.	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	4.280.000	51.360.000
Total			666.960.000

Kantor Akuntan Publik

Public Accountant Firm

Berdasarkan akta RUPST nomor 6 tanggal 7 Juli 2020, Perseroan telah menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan dan entitas Anak Perusahaan pada 2020. Akuntan publik yang ditunjuk tersebut tidak memberikan jasa lain selain jasa audit laporan keuangan Perseroan.

Based on the AGMS on 7 July 2020, the Company has agreed to authorize the Board of Commissioners to appoint a public accounting firm registered with the Financial Services Authority, namely Kanaka Puradiredja Public Accountant Firm (KAP), Suhartono to audit the financial statements of the Company and its subsidiaries in 2020. The appointed public accountant does not provide services other than auditing the Company's financial statements.

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Gambaran Umum Penerapan Sistem Manajemen Risiko

Overview of Risk Management System Implementation

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha konstruksi, Perseroan tidak terlepas dari paparan risiko-risiko yang berpotensi pada jalannya bisnis Perseroan. Menyadari hal itu, Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko yang terarah. Penerapan tersebut dimulai melalui identifikasi, pengendalian dan pengelolaan risiko. Hal ini dilakukan oleh Perseroan dan tetap dalam pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sumber daya manusia di dalam Perseroan.

Being in the construction business, the Company is inseparable from the potential risks involved in the course of the Company's business. Knowing this, the Company implements a targeted risk management system. The implementation begins through identification, control and risk management. This is conducted by the Company and remains under the supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as human resources of the Company.

Jenis Risiko dan Cara Pengelolaan/Mitigasi

Type of Risks and Management/Mitigation Method

Adapun risiko-risiko yang dimiliki Perseroan dan cara pengelolaan atau mitigasi dari risiko-risiko tersebut diantaranya:

The risks that are faced by the Company and the management or mitigation of these risks include:

No.	Resiko Risk	Definisi Definition	Pengelolaan/Mitigasi Terhadap Risiko Risk Management/ Mitigation
1.	Risiko Mata Uang <i>Currency Risk</i>	Risiko yang terjadi pada hubungan mata uang dalam negeri dan mata uang asing akibat adanya fluktuasi perusahaan dan ekonomi makro.	Melakukan pengawasan terhadap pergerakan suku bunga pasar. <i>Monitor the movement of market interest rates.</i>
2.	Risiko Kenaikan Harga <i>Price Inflation Risk</i>	Risiko kenaikan harga bahan dan/atau material yang akan mengakibatkan menurunnya keuntungan proyek. <i>Risks that occur in the relationship between domestic and foreign currencies due to company and macroeconomic fluctuations.</i>	<ol style="list-style-type: none"> Memantau pergerakan harga bahan baku untuk mengantisipasi apabila terjadi kenaikan harga yang akan mempengaruhi keuntungan proyek; Memperhitungkan estimasi inflasi saat penawaran. <ol style="list-style-type: none"> <i>Monitor raw materials price movements in anticipation of price increases that will affect project profits;</i> <i>Takes into account the estimated inflation at the time of proposal.</i>
3.	Risiko Persaingan Usaha <i>Business Competition Risk</i>	Risiko yang paling signifikan, mengingat persaingan tidak hanya terjadi pada kegiatan usaha konstruksi milik swasta, melainkan juga terjadi persaingan di kegiatan usaha konstruksi milik Pemerintah. <i>Risk of increasing prices of raw materials which will result in decreased project profits.</i>	<ol style="list-style-type: none"> Mengupayakan harga penawaran yang paling kompetitif; Selalu mengupayakan pelayanan terbaik kepada pelanggan tetap & pelanggan baru. <ol style="list-style-type: none"> <i>Strive for the most competitive bidding price;</i> <i>Always strive for the best service to both existing & new customers.</i>
4.	Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Sosial Ekonomi <i>Risk of Changes in Government Policy, Socio-Economic Conditions</i>	Salah satu risiko yang sangat berpengaruh terhadap jalannya aktivitas Perseroan di tahun 2020 ini. Dikarenakan adanya penyebaran virus COVID-19 yang mengakibatkan dibuatnya peraturan oleh Pemerintah yakni Peraturan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga risiko ini juga akan menyebabkan jumlah pekerjaan/proyek berkurang dan pendapatan <i>Risk of increasing prices of raw materials which will result in decreased project profits.</i> <i>The most significant risk, considering that competition does not only occur in private construction business activities, but also in government-owned construction business activities.</i> <i>Perseroan menjadi turun/berkurang.</i>	Memantau perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang baik dari Pemerintah maupun di masyarakat. <i>Monitor the development of situation and conditions from the Government and in the community.</i>

Sumber Daya Manusia

Perseroan memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset terpenting bagi perusahaan, karena SDM memegang peranan vital terhadap keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR), telah menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan kematian, juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan karyawan dalam seminar dan *workshop* atau program pelatihan sesuai di bidangnya masing-masing demi meningkatkan kompetensi tiap karyawan. Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dan SDM di bidang Legal dan Keuangan mengikuti sejumlah

Human Resources

The Company views Human Resources (HR) as the most important asset for the company, because HR plays a vital role in the success of the company in carrying out its business activities.

The Company always pay attention to government regulations related to employment, such as implementing the provisions regarding the Regional Minimum Wage (UMR), participate in BPJS Ketenaga Kerjaan which includes Accident Security, Old Age Security, Pension Security, and Death Security Programs, as well as participate in BPJS Health.

Training Program to Develop Corporate Secretary Competence

The Company is committed to involving employees in seminars and workshops or training programs according to their respective fields in order to improve the competence of each employee. Throughout 2020, the Company has included the Corporate Secretary and employees in Legal and Financial fields to take part in a number of trainings and seminars as follows:



Nama Training	Nama Peserta Training	Penyelenggara
<p>Sosialisasi Peraturan Pencatatan dan Pengenalan Sistem dan Sarana Pelaporan SPE-IDXnet di Hari Selasa tanggal 18 Februari 2020</p> <p><i>Socialization of Listing Regulations and Introduction to SPE-IDXnet Reporting Systems and Facilities on Tuesday, 18 February 2020</i></p>	<p>- Destry Sianturi (Corporate Secretary)</p> <p>- Agries Sally (Accounting)</p>	<p>PT. Bursa Efek Indonesia</p>
<p>Sosialisasi Peraturan Pasar Modal, 26 Februari 2020</p> <p><i>Socialization of Capital Market Regulation, 26 February 2020</i></p>	<p>- Destry Sianturi (Corporate Secretary)</p> <p>- Steffi Claudia (Legal)</p>	<p>Otoritas Jasa Keuangan <i>Financial Services Authority</i></p>
<p>Public Review Pengembangan Taksonomi Laporan Keuangan Berbasis XBRL, 28 Februari 2020</p> <p><i>Public Review of XBRL-Based Taxonomy Development Financial Report, 28 February 2020</i></p>	<p>- Agries Sally (Accounting) dan Lia Ariesta (Internal Audit)</p>	<p>PT. Bursa Efek Indonesia</p>
<p>Seminar Indonesia Corporate Secretary Association dan PT Bursa Efek Indonesia, 3 Maret 2020</p> <p><i>Seminar on Indonesia Corporate Secretary Association and PT Bursa Efek Indonesia, 3 March 2020</i></p>	<p>- Destry Sianturi (Corporate Secretary)</p>	<p>PT. Bursa Efek Indonesia dan Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) <i>PT. Bursa Efek Indonesia dan Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)</i></p>
<p>Seminar terkait Dampak Covid-19 terhadap Penerapan PSAK 8, PSAK 68 dan PSAK 71, 29 April 2020</p> <p><i>Seminar related to the Impact of Covid-19 on the Implementation of PSAK 8, PSAK 68 and PSAK 71, 29 April 2020</i></p>	<p>- Lia Ariesta (Internal Audit)</p>	<p>PT Bursa Efek Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia <i>PT. Bursa Efek Indonesia dan Indonesia Accountant Association</i></p>
<p>Sosialisasi 2 POJK di Pasar Modal, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020, 5 Mei 2020</p> <p><i>Socialization of 2 POJK in Capital Market, POJK Number 15/POJK.04/2020 and POJK Number 16/POJK.04/2020, 5 May 2020</i></p>	<p>- Destry Sianturi (Corporate Secretary)</p> <p>- Steffi Claudia (Legal)</p>	<p>OJK-IDX</p>
<p>Online Class eASY.KSEI tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI, 23 June 2020</p> <p><i>eASY.KSEI Online Class on Implementation of KSEI Electronic Facility of General Meeting System, 23 June 2020</i></p>	<p>- Destry Sianturi (Corporate Secretary)</p>	<p>KSEI</p>

Komposisi Sumber Daya Manusia

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan, termasuk Direksi, yang dikelompokkan berdasarkan Status Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas. Seluruh karyawan Perseroan adalah Warga Negara Indonesia, tidak ada tenaga kerja asing.

Human Resources Composition

The following tables reveal the composition of the Company's human resources, including the Board of Directors, which are grouped based on Permanent/Non-Permanent Employee Status, Position, Education, Age, and Activities. All employees of the Company are Indonesian citizens, there are no foreign workers.

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama

Employees Composition Based on Main Activities

Status	31 Desember 2020 31 December 2020					
	2020		2019		2018	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Manajerial <i>Managerial</i>	4	4	3	38	3	33
Akuntansi / Keuangan <i>Accountancy/ Finance</i>	5	5	1	13	1	11
Operasional <i>Operational</i>	2	2	4	50	5	56
Personalia <i>Human Resources</i>	1	1	0	0	0	0
Pemasaran <i>Marketing</i>	2	2	0	0	0	0
Jumlah Total	14	14	8	100	9	100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Tetap/Tidak Tetap

Employees Composition Based on Permanent/Non-Permanent Status

Status	31 Desember 2020 31 December 2020					
	2020		2019		2018	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Tetap <i>Permanent</i>	10	100	8	100	7	78
Tidak Tetap <i>Non-Permanent</i>	4	0	0	0	2	22
Jumlah Total	14	100	8	100	9	100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jabatan *Employees Composition Based on Title*

Status	31 Desember 2020 31 December 2020					
	2020		2019		2018	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Direksi <i>Directors</i>	4	29	2	25	2	22
Manajer <i>Managers</i>	4	29	3	38	1	11
Staff <i>Staffs</i>	6	42	3	38	6	67
Jumlah Total	14	100	8	100	9	100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan *Employees Composition Based on Education Level*

Status	31 Desember 2020 31 December 2020					
	2020		2019		2018	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
SMP <i>Middle School</i>	0	0	0	0	0	0
SMA / SMK <i>High School</i>	2	25	2	25	4	44
D1 <i>Diploma 1</i>	0	0	0	0	0	0
D3 <i>Diploma 3</i>	0	0	0	0	0	0
S1 <i>Bachelor's Degree</i>	12	75	6	75	5	56
Jumlah Total	14	100	8	100	9	100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia *Employees Composition Based on Age*

Status	31 Desember 2020 31 December 2020					
	2020		2019		2018	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
21-30	3	21	1	13	3	33
31-35	0	0	0	0	0	0
36-40	5	36	3	38	3	33
> 40	6	43	4	50	3	33
Jumlah Total	14	100	8	100	9	100

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan, termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

The Company does not have an agreement to involve employees and management in the ownership of the Company's shares, including agreements related to the Company's share ownership program by employees or members of Directors and Board of Commissioners.

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan serta tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan atau serikat pekerja. Namun Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan.

The Company does not have a labor union formed by the Company's employees and does not have a Collective Labor Agreement between the Company and the Company's employees or labor unions. However, the Company has set Company Regulations.

Sarana dan Keselamatan Kerja

Perusahaan menyediakan sarana keselamatan kerja yang merupakan bagian penerapan Manajemen K3.

Work Health and Safety

The company provides work safe facilities which are part of the implementation of WHS Management.

Tanggal Pelatihan Training Date	2020		2019	
	Frekuensi Frequency	Peserta Participants	Frekuensi Frequency	Peserta Participants
Pelatihan Ketrampilan Teknis <i>Technical Skill Training</i>	2	3	3	50
Sistem dan Prosedur <i>System and Procedures</i>	5	4	2	30
Organisasi & Kepemimpinan <i>Organisation & Leadership</i>	1	1	0	0
Standarisasi Mutu <i>Standardization of Quality</i>	0	0	0	0



Sistem Remunerasi Karyawan

Perseroan menerapkan meritokrasi dalam remunerasi sesuai kinerja.

Employee Remuneration System

The Company implements meritocracy in remuneration according to performance.

Whistleblowing System

Sehubungan dengan perlunya sistem pelaporan pelanggaran, Perseroan belum memiliki sistem pengaduan internal secara khusus. Namun itu fungsi tersebut diberikan kepada manajemen dan sumber daya manusia, yang bertanggung jawab kepada Direksi.

Whistleblowing System

In regards to the need for a violation reporting system, the Company does not yet have a specific internal complaint system. However, this function is assigned to the management and human resources, who are responsible to the Board of Directors.

Standar Kode Etik

Standar Kode merupakan standar etika dan perilaku yang berlaku kepada semua karyawan, manajemen dan pemangku kepentingan. Pokok-pokok kode etik yang disusun Manajemen adalah:

- menunjukkan kejujuran, objektivitas dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya,
- loyalitas terhadap Perseroan,
- tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum,
- tidak terlibat dalam tindakan dan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya
- dan tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, rekan kerja, klien, pelanggan, pemasok. Perseroan senantiasa secara rutin menyosialisasikan

Code of Conduct Standards

Code Standards are ethical and behavioral standards that apply to all employees, management and stakeholders. The principles of code of ethics set by the Management are:

- *demonstrate honesty, objectivity and seriousness in carrying out duties and fulfilling their professional responsibilities,*
- *loyalty to the Company,*
- *not involved in activities that deviate or break the law,*
- *not involved or not engaged in actions and/or activities that may discredit the internal audit profession or the organization*
- *and should not accept anything in any form from an employee, co-worker, client, customer, supplier.*

Kode etik tersebut melalui:

- rapat-rapat umum yang diselenggarakan rutin
- situs perusahaan
- grup media sosial perusahaan

The company continues to socialize these code of conducts regularly through:

- *general meetings held regularly*
- *company website*
- *corporate social media groups*

Perkara Hukum Yang Dihadapi oleh Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020 dan sampai tanggal Laporan Tahunan 2020 ini diterbitkan, bahwa Perseroan, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara hukum baik perkara pidana, perdata, sengketa pajak dan sengketa-sengketa di Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun di Pengadilan Hubungan Industrial di tempat kedudukan Perseroan maupun di tempat lainnya.

Sanksi Administratif Terkait Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan

Selama tahun 2020, Perseroan tidak pernah menerima sanksi administratif dari pihak manapun baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau lembaga penunjang pasar modal lainnya dalam penyampaian Laporan Keuangan Perseroan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) walaupun dalam kondisi masih belum ideal. Kegiatan CSR tersebut berupa bantuan jangka pendek (*charity*) maupun yang sifatnya berkelanjutan (*sustainability*). Awalnya program CSR difokuskan pada peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan keselamatan kerja dari karyawan.

Kegiatan tersebut diintegrasikan di dalam program *Health, Safety and Environment* (HSE) di mana Perseroan berupaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan keamanan, serta beasiswa pendidikan bagi masyarakat sekitar.

Legal Cases Faced by the Company, Directors and Board of Commissioners

Throughout 2020 and until the date of publication of the 2020 Annual Report, the Company, Directors and Board of Commissioners of the Company are not currently involved in legal cases, whether criminal, civil, tax disputes and other disputes in the State Administrative Court (PTUN), Indonesian National Arbitrage Agency (BANI), as well as at the Industrial Relations Court at the domicile of the Company or other places.

Administrative Sanctions Related to Late Submission of Financial Statements

Throughout 2020, the Company has never received administrative sanctions from any party, either from the Financial Services Authority (OJK) and/or other capital market supporting institutions in the submission of Company's Financial Statements.

Corporate Social Responsibility

The Company implements its social responsibility towards the society through its CSR (Corporate Social Responsibility) program though under less than ideal conditions. The CSR activities can be in the form of short-term assistance (charity) or more sustainable assistance. Initially the CSR program was focused on increasing the competence, welfare and work safety of its employees.

These activities are integrated into the Health, Safety and Environment (HSE) program where the Company seeks to improve the quality of environmental health and safety, as well as provide educational scholarships for the surrounding community.

Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Lancartama Sejati Tbk Tahun 2020

*Statement of Directors and Board of Commissioners
on the Responsibility for 2020 Annual Report of
PT Lancartama Sejati Tbk*

PT. LANCARTAMA SEJATI, Tbk.

Direksi dan Dewan Komisaris PT Lancartama Sejati Tbk menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan ini telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

The Directors and Board of Commissioners of PT Lancartama Sejati Tbk testify that all information in this Annual Report has been presented in its entirety and are fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 20 Mei 2021

Jakarta, 20 Mei 2021

Dewan Komisaris *Board of Commissioner*



Djaja Julia Supena
Komisaris Utama
President Commissioner



Rizka Alfrina
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi *Board of Director*



Alex Widjaja
Direktur Utama
President Director



Kathrin Widjaja
Direktur
Director

PT LANCARTAMA SEJATI Tbk
LAPORAN KEUANGAN/*FINANCIAL STATEMENTS*
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020/
As of and For the Year Ended December 31, 2020

dan/and

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

PT LANCARTAMA SEJATI Tbk

DAFTAR ISI/ *TABLE OF CONTENTS*

	<i>Halaman/Page</i>
SURAT PERNYATAAN DIREKSI/ <i>STATEMENT OF DIRECTOR</i>	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ <i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>	
LAPORAN KEUANGAN PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020/ <i>STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020</i>	
LAPORAN POSISI KEUANGAN / <i>STATEMENT OF FINANCIAL POSITION</i>	1 – 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN/ <i>STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i>	3
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS / <i>STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY</i>	4
LAPORAN ARUS KAS / <i>STATEMENT OF CASH FLOWS</i>	5-6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN / <i>NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS</i>	7 – 92

Laporan No. 00337/3.0357/AU.1/03/0751-1/1/IV/2021

Report No. 00337/3.0357/AU.1/03/0751-1/1/IV/2021

Laporan Auditor Independen**Independent Auditors' Report**

**Kepada Yth,
Para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT LANCARTAMA SEJATI TBK**

**To:
The Shareholders, Commissioners and Directors of
PT LANCARTAMA SEJATI TBK**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Lancartama Sejati Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Lancartama Sejati Tbk, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**Management's responsibility for the financial statements**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor**Auditors' responsibility**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Lancartama Sejati Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Lancartama Sejati Tbk as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO



Adeyana Widjaja, CPA

Nomor Izin Akuntan Publik No. AP. 0751
License of Public Accountant No. AP.0751

Jakarta, 14 April 2021/ April 14, 2021





PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
PT LANCARTAMA SEJATI TBK

*DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER DECEMBER 31, 2020
PT LANCARTAMA SEJATI TBK*

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I, the undersigned:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama / <i>Name</i> | : Alex Widjaja |
| Alamat kantor / <i>Office address</i> | : Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B, Gunung, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 |
| Alamat domisili sesuai KTP
atau kartu identitas lain/
<i>Domicile as stated in ID Card</i> | : P. Hijau Resd. Twr A Lt. 19 AG, Jl. Kalimaya No. 48
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon/ <i>Phone Number</i> | : 021 7392222 |
| Jabatan / <i>Position</i> | : Direktur Utama / <i>President Director</i> |
| 2. Nama / <i>Name</i> | : Kathrin Widjaja |
| Alamat kantor / <i>Office address</i> | : Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B, Gunung, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 |
| Alamat domisili sesuai KTP
atau kartu identitas lain/
<i>Domicile as stated in ID Card</i> | : Jl. Pluit Timur Raya No. 20 A, Pluit, Penjaringan
Jakarta Utara |
| Nomor Telepon/ <i>Phone Number</i> | : 021 7392222 |
| Jabatan / <i>Position</i> | : Direktur / <i>Director</i> |

menyatakan bahwa:

state that:

- | | |
|--|--|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Lancartama Sejati Tbk; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the PT Lancartama Sejati Tbk;</i> |
| 2. Laporan Keuangan PT Lancartama Sejati Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia; | 2. <i>The PT Lancartama Sejati Tbk financial statements have been prepared and presented in accordance with financial accounting standard in Indonesia;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Lancartama Sejati Tbk telah dibuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information contained in the PT Lancartama Sejati Tbk financial statements is complete and correct;</i> |
| b. Laporan Keuangan PT Lancartama Sejati Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The PT Lancartama Sejati Tbk financial statements do not contain misleading material information of facts, and do no omit material information and fact;</i> |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Lancartama Sejati Tbk. | 4. <i>We are responsible for the PT Lancartama Sejati Tbk internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statements letter is made truthfully.

Jakarta, 14 April 2021



Alex Widjaja
Direktur Utama / *President Director*

Kathrin Widjaja
Direktur / *Director*

PT LANCARTAMA SEJATI Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LANCARTAMA SEJATI Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan setara kas	931.086.534	3d,3e,6,28	1.698.147.338	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang usaha				<i>Trade receivable</i>
Pihak ketiga	1.195.403.302	3d,7,28	8.957.099.550	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	57.796.406	3c,25	1.194.077.474	<i>Related parties</i>
Piutang lain-lain		3d,28		<i>Other receivable</i>
Pihak ketiga	173.667.072		119.126.690	<i>Third parties</i>
Tagihan bruto pemberi kerja	6.300.590.900	3f,8	960.583.726	<i>due from customers</i>
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	4.660.028.707	9	6.159.558.800	<i>Advances and prepaid expense</i>
Jumlah Aset Lancar	13.318.572.921		19.088.593.578	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Piutang lain-lain		3d,28		<i>Other receivable</i>
Pihak berelasi	1.140.225.000	3c,25	1.582.893.310	<i>Related parties</i>
Properti investasi	147.402.151.680	3i,10	107.263.749.419	<i>Investment property</i>
Aset tetap	6.842.347.632	3g,11	9.085.142.211	<i>Fixed Asset</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar	155.384.724.312		117.931.784.940	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	168.703.297.233		137.020.378.518	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

	2020	Catatan/ Notes	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang bank jangka pendek	64.114.272.770	3d,14,28	53.070.894.454	Bank loan short-term
Utang pajak	277.820.858	3l,13a	581.458.766	Tax payable
Biaya yang masih harus dibayar	247.124.535	3d,12,28	751.557.580	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka	135.750.000	3j	-	Unearned revenue
Deposito pelanggan	40.000.000		-	Security deposits
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				Payable long Term current maturity within 1 (one) year:
Bank	4.138.547.987	3d,14,28	4.360.713.527	Bank
Sewa pembiayaan	736.139.023	3d,3h,15,28	764.593.181	Finance lease
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	69.689.655.173		59.529.217.508	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-Current Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun				Long term liabilities – net of current maturities within 1 (one) year:
Bank	48.644.534.738	3d,14,28	53.744.504.968	Bank
Sewa pembiayaan	69.725.233	3d,3h,15,28	805.864.255	Finance lease
Liabilitas imbalan kerja	381.692.000	3m,16	466.145.000	Liabilities employees benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	49.095.951.971		55.016.514.223	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	118.785.607.144		114.545.731.731	Total Liabilities
Ekuitas				Equity
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham				Share capital Par value Rp25 per share
Modal dasar - 3.200.000.000 saham				Authorized Capital - 3,200,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor - 1.000.000.005 saham (31 Desember 2019: 800.000.000 saham)	25.000.000.125	17	20.000.000.000	Issued and fully paid share capital - 1,000,000,000 shares (December 31, 2019: 800,000,000 shares)
Tambahan modal disetor	26.329.108.079	18	-	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain	29.647.000		(129.513.000)	Other comprehensive income
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	-		-	appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	(1.441.065.115)		2.604.159.787	unappropriated
Jumlah Ekuitas	49.917.690.089		22.474.646.787	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	168.703.297.233		137.020.378.518	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT LANCARTAMA SEJATI Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LANCARTAMA SEJATI Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
 For the Year Ended December 31, 2020
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
Pendapatan	25.376.582.800	3j,19	41.432.210.341	Revenue
Beban pokok pendapatan	(14.321.377.215)	3j,20	(23.729.238.987)	<i>Cost of goods sold</i>
Laba Bruto	11.055.205.585		17.702.971.354	Gross profit
Beban umum dan administrasi	(5.014.150.432)	3j,21	(5.488.965.337)	<i>General and administrative expenses</i>
Pendapatan (beban) lainnya	95.686.803	3j,22	(237.008.894)	<i>Other income (expenses)</i>
Beban pajak penghasilan final	(909.834.984)	3l,13b	(1.272.966.310)	<i>Income tax final expense</i>
Laba Usaha	5.226.906.972		10.704.030.813	<i>Income from operation</i>
Pendapatan keuangan	261.565.887	3j,23	30.658.106	<i>Finance income</i>
Beban keuangan	(9.533.697.761)	3j,24	(9.146.871.866)	<i>Finance expenses</i>
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(4.045.224.902)		1.587.817.053	<i>Net income (Loss) for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain:				<i>Other comprehensive income</i>
Pengkukuran kembali				<i>Re-measurement of</i>
liabilitas imbalan kerja	159.160.000	13m,16	(75.306.000)	<i>employee benefits liabilities</i>
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(3.886.064.902)		1.512.511.053	Total comprehensive income (Loss) for the year
Laba (Rugi) Bersih Tahun Yang Dapat Diatribusikan Ke Pemilik Entitas	(4.045.224.902)		1.587.817.053	Profit (Loss) for year attributable to Owner of the parent entity
Laba (Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Ke Pemilik Entitas	(3.886.064.902)		1.512.511.053	Net comprehensive income (Loss) attributable to Owner of the parent entity
Laba (Rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas	(4)	3p,24	12	<i>Basic earnings per share attributable to Owner of the entity</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT LANCARTAMA SEJATI Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LANCARTAMA SEJATI Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
 For the Year Ended December 31, 2020
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham / <i>Share capital</i>	Tambah modal disetor / <i>Additional paid-in capital</i>	Penghasilan Komprehensif Lain / Other <i>Comprehensive Income</i>	Saldo Laba/ <i>Retained earnings</i>		Kepentingan Non Pengendali / <i>Non-Controlling Interest</i>	Jumlah Ekuitas / <i>Total Equity</i>	
				Ditentukan penggunaannya / <i>Appropriated</i>	Belum ditentukan penggunaannya / <i>Unappropriated</i>			
Saldo per 1 Januari 2019	10.250.000.000	-	(54.207.000)	-	1.016.342.734	2.000.000	11.214.135.734	<i>Balance as of January 1, 2019</i>
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	(2.000.000)	(2.000.000)	<i>Non-controlling interest</i>
Setoran modal	9.750.000.000	-	-	-	-	-	9.750.000.000	<i>Paid in capital</i>
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	(75.306.000)	-	1.587.817.053	-	1.512.511.053	<i>Comprehensive income for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2019	20.000.000.000	-	(129.513.000)	-	2.604.159.787	-	22.474.646.787	<i>Balance as of December 31, 2019</i>
Penerbitan saham baru sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana	5.000.000.000	26.329.108.204	-	-	-	-	31.329.108.204	<i>Issuance of new share in relation to Initial Public Offering</i>
Penerbitan saham baru melalui pelaksanaan waran	125	(125)	-	-	-	-	-	<i>Issuance of new shares through warrant exercised</i>
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	159.160.000	-	(4.045.224.902)	-	(3.886.064.902)	<i>Comprehensive loss for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2020	25.000.000.125	26.329.108.079	29.647.000	-	(1.441.065.115)	-	49.917.690.089	<i>Balance as of December 31, 2020</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	33.314.029.048		43.489.803.981	<i>Receipts from customers</i>
Pembayaran kas kepada pemasok dan untuk beban operasional lainnya	(21.214.581.750)		(21.336.961.390)	<i>Payments to suppliers other operating expenses</i>
Pembayaran kepada karyawan	(2.099.998.999)		(1.576.426.790)	<i>Payments to employees</i>
				<i>Cash receipts from operating activities</i>
Kas yang dihasilkan dari operasi	9.999.448.299		20.576.415.801	<i>Receipts from interest</i>
Penerimaan bunga	261.565.887		30.658.106	<i>Payments of interest</i>
Pembayaran bunga	(9.133.249.316)		(8.364.134.879)	<i>Payments of taxes</i>
Pembayaran pajak	(3.070.716.172)	13	(2.375.119.151)	<i>Receipts (payments) other</i>
Penerimaan (pembayaran) lainnya	95.686.803		(237.008.894)	
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(1.847.264.499)		9.630.810.983	<i>Net Cash Flows Provided by Operating Activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	-	10	403.290.384	<i>Proceeds from sale of property, plant and equipment</i>
Pembelian aset tetap	(79.307.620)	10	(391.421.478)	<i>Acquisition of property, plant and equipment</i>
Pembayaran uang muka aset tetap	-		(4.570.183.800)	<i>Paymnet advances property, plant and equipment</i>
Penerimaan dari pelepasan Investasi entitas asosiasi	-	8	20.000.000.000	<i>Receipt of release Associated investment</i>
Penambahan properti investasi	(40.376.087.429)	9	(58.341.873.455)	<i>Acquisition of property investmnets</i>
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(40.455.395.049)		(42.900.188.349)	<i>Net Cash Flows Used in Operating Activities</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran utang				<i>Payments of finance</i>
sewa pembiayaan	(764.593.180)	15	(610.772.667)	<i> lease payable</i>
Penerimaan pihak berelasi	2.719.174.378	27	17.343.582.163	<i>Receipts related parties</i>
Pembayaran pihak berelasi	(1.140.225.000)	27	(16.051.937.567)	<i>Payments related parties</i>
Penerimaan atas penambahan				<i>Proceeds from increase in</i>
setoran modal	35.000.000.000	17,18	9.750.000.000	<i> paid-up capital</i>
Penerimaan utang				<i>Increase in bank loan</i>
bank jangka pendek	121.999.914.794	14	201.755.569.997	<i> short- term</i>
Pembayaran utang				<i>Payments of bank loan</i>
bank jangka pendek	(110.956.536.478)	14	(190.796.278.003)	<i> short- term</i>
Penerimaan utang bank				<i>Increase in bank loan</i>
Jangka panjang	21.618.854.076	14	116.371.277.138	<i> long - term</i>
Pembayaran utang bank				<i>Payments of bank loan</i>
jangka panjang	<u>(26.940.989.846)</u>	14	<u>(106.353.150.257)</u>	<i> long - term</i>
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>41.535.598.744</u>		<u>31.408.290.804</u>	<i>Net Cash Provided by Financing Activities</i>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(767.060.804)		(1.861.086.562)	<i>Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents</i>
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	<u>1.698.147.338</u>	5	<u>3.559.233.900</u>	<i>Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year</i>
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	<u><u>931.086.534</u></u>	5	<u><u>1.698.147.338</u></u>	<i>Cash and Cash Equivalents at End of the Year</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Lancartama Sejati Tbk (“Entitas”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 12 dari Notaris Sugiri Kadarisman, S.H., tanggal 1 Juni 1990. Akta pendirian ini disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-02-4854.HT.01.01.TH.93 tanggal 19 Juni 1993.

Akta No. 66 tanggal 16 Juli 2019 dihadapan Desman, S.H., M. Hum., MM., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03.-0309192. Tahun 2019 pada tanggal 6 Agustus 2019 yang isinya menyetujui tentang peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Akta Notaris Nomor 65 Tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, SH., M.HUM., M.KN, berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0032845.AH.01.11.TAHUN 2020 pada tanggal 18 Pebruari 2020, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, pemegang saham menyetujui tentang :

- Mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Entitas dan menawarkan/menjual saham yang baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 200.000.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25 dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 100.000.000 yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Entitas dicatatkan.
- Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.

1. GENERAL

a. The Company’s Establishment

PT Lancartama Sejati Tbk (“the Entity”) was established based on Notarial Deed No. 12 of Notary Sugiri Kadarisman, S.H., dated June 1, 1990. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.C-02-4854.HT.01.01.TH.93 dated June 19, 1993.

Based on Notarial Deed No. 66 of Desman, S.H., M. Hum., MM., Notary Jakarta This deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03.-0309192. Tahun 2019 dated August 6, 2019- which agree on the increase in authorized capital, issued and paid up capital.

The Articles of Association of the Entity have been amended several times, most recently as stated in the Deed Deed No. 65 dated February 13, 2020 Christina Dwi Utami, SH., M.HUM., M.KN Notary in This deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0032845.AH.01.11.TAHUN 2020 dated Februari 18, 2020, regarding the changes in Issued/paid Capital, the shareholders agreed :

- *Issues shares in the Entity’s deposits / portfolios and offer / sell new shares to be issued from the portfolios through a Public Offering to the maximum number of 200,000,000 new shares with a nominal value of Rp25 each and issue Warrant Series I, at 100,000,000 freely given to the public who buy new shares in a Public Offering and Series I Warrants can be transferred and / or traded separately from the new shares, taking into account the applicable laws and regulations and Stocks Exchange regulations in Indonesia that apply in the place where the Entity’s shares are listed.*
- *In connection with decision, further the Entity’s shareholders hereby agree and declare disposing their rights to buy in advance the offer or sale of new shares in the context of a Public Offering to the public through the Capital Market mentioned above.*

1. UMUM - Lanjutan

a. Pendirian Perusahaan - Lanjutan

- Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Entitas, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum termasuk menyatakan susunan pemegang saham Entitas dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
- Jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Saham Entitas kepada Masyarakat adalah sebanyak 200.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000 sehingga jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Entitas adalah sebanyak 1.000.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 800.000.000 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.000.000.000 merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Entitas.
 - b. Sebanyak 200.000.000 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000 adalah saham-saham yang dikeluarkan oleh Entitas pada saat Penawaran Umum saham Perseroan kepada masyarakat.
 - Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 31,25% atau sejumlah 1.000.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000 oleh para pemegang saham
 - Bertalian dengan modal ditempatkan sebagaimana termaktub dalam pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Entitas yang telah diambil bagaian dan disetor penuh oleh para pemegang saham, yaitu:

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas, ruang lingkup kegiatan Entitas adalah:

- Konstruksi gedung tempat tinggal, mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium.
- Konstruksi gedung perkantoran, mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan).

1. GENERAL - Continued

a. The Company's Establishment - Continued

- Authorize the Director and / or the Entity;s board of commissioners to state in a separate deed made before a Notary, regarding the certainty of the number of shares issued and paid up in the context of carrying out a Public Offering, including stating the composition of the Entity's shareholders in the deed, after the Public Offering has been completed and the issuance of shares for the implementation of the Series I Warrants is listed on the Indonesia Stock Exchanges and the name of the shareholders resulting from the Public Offering have been recorded in the Register of Shareholders.
- Shares issued by the Entity in a Public Offering of Shares to the Public are 200,000,000 shares with a total value of Rp5,000,000,000 so the total number of shares issued by the Entity is 1,000,000,000 shares with a total amount of Rp25,000,000,000 with the following details:
 - a. A total of 800,000,000 with a total amount of Rp20,000,000,000 are all shares issued by the Entity.
 - b. A total of 200,000,000 with a total amount of Rp5,000,000,000 is all shares issued by the Entity upon a Public Offering of the Company's shares to the public.
 - Of the authorized capital has been issued and fully paid up 31,25% or a total of 1,000,000,000 shares with a total nominal amount of Rp25,000,000,000 by the shareholders.
 - Regarding the issued capital as stipulated in article 4 paragraph 2 of the Entity's Article of Association which have been taken as part and fully paid by the shareholders, namely:

In accordance with Article 3 of the Entity's Article of Association, the scope of the Entity's activities is:

- Residential building construction, including building construction businesses used for residence, such as residential homes, apartments and condominiums.
- Office building construction, including building construction businesses used for offices, such as office spaces and home offices.

1. UMUM - Lanjutan

a. Pendirian Perusahaan - Lanjutan

- Konstruksi gedung industri, mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja.
- Konstruksi gedung perbelanjaan, mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung.
- Konstruksi gedung lainnya.

Saat ini kegiatan utama Entitas menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.

Entitas berlokasi di Jakarta dan berkantor pusat di Wisma Lancartama, Jalan Pakubuwono VI Nomor 99 A-B, Jakarta Selatan.

Entitas mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990.

Entitas merupakan entitas induk terakhir.

b. Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 1 November 2019 dari Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	:	Djaja Julia Supena	:
Komisaris Independen	:	Rizka Alfrina	:

Direksi

Direktur Utama	:	Alex Widjaja	:
Direktur	:	Kathrin Widjaja	:

Entitas mempunyai 8 dan 8 karyawan tetap masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit).

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 026/SK/DIRKOM/XI/2019 tanggal 7 November 2019, Perseroan telah mengangkat Lia Ariesta Fitriana sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 027/SK/DIR/XI/2019 tanggal 7 November 2019, Sekretaris Perusahaan adalah Destryani Sianturi.

1. GENERAL – Continued

a. The Company's Establishment - Continued

- Construction of industrial buildings, including building construction businesses used for industry, such as factories and workshops.
- Construction of shopping buildings, including business construction of buildings used for shopping, such as malls, department stores, shops, shop houses (shop houses) and stalls.
- Other building construction.

At present the main activity of the Entity is carrying out business activities in the field of construction.

The entity domiciles in Jakarta and has its head office in Wisma Lancartama, Jalan Pakubuwono VI Number 99 A-B, Jakarta Selatan.

The Entity started its commercial operations in 1990.

The entity is the ultimate entity.

b. Board of Commissioners and Directors and employees

Based on Deed No. 4 dated November 1, 2019 of Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M.Kn., a Notary in Jakarta the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Entity as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner

Directors

President Director
Director

The entity has 8 and 8 permanent employees as of December 31, 2020 and 2019, respectively (unaudited).

Based on the Decree of the Board of Directors No. 026/SK/DIRKOM/XI/2019 date November 7, 2019, the Entity appointed Lia Ariesta Fitriana as Head of the Internal Audit Unit.

Based on the Decree of the Board of Directors No. 027/SK/DIR/XI/2019 date November 7, 2019, the Corporate Secretary is Destryani Sianturi.

1. UMUM – Lanjutan

c. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 29 Januari 2020, PT Lancartama Sejati, memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusannya No. S-9/D.04/2020 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 100.000.000 Saham baru dengan nilai nominal Rp25 per saham dan harga penawaran Rp175 per saham dan penerbitan 100.000.000 Waran Seri I yang diberikan kepada setiap 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp288 per saham dan periode pelaksanaan mulai tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 10 Pebruari 2021. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham - saham PT Lancartama Sejati telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Pebruari 2020.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI

a. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020)

Dalam tahun berjalan, Entitas telah menerapkan standar akuntansi keuangan (“SAK”) dan intrepretasi standar akuntansi keuangan (“ISAK”) baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 1 dan PSAK No. 25: Definisi Material. Amandemen ini menjelaskan definisi material dengan tujuan untuk menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka konseptual dan beberapa PSAK yang relevan. Selain itu, juga memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai definisi material dalam rangka mengurangi pengungkapan berlebihan akibat adanya perubahan threshold definisi material.

1. GENERAL - Continued

c. Public Offering of the Company’s Shares

On January 29, 2020, PT Lancartama Sejati, obtained an effective statement from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority with its Decree No. S-9/D.04/2020 to conduct an Initial Public Offering of 100,000,000 new shares with a nominal value of Rp 25 per share and an offering price of Rp175 per share and the issuance of 100,000,000 Series I Warrants which are given to every 1 new share with The exercise price is Rp288 per share and the exercise period is from 10 August 10, 2020 to February 10, 2021. If Series I Warrants are not exercised until their expiration date, Series I Warrants will become expired, have no value and are not valid.

PT Lancartama Sejati shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on February 10, 2020.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (ISAK)

a. Standards (SAKs) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAKs) Issued and Effective in the Current Year (on or after January 1, 2020)

In the current year, the Entity has adopted all of the new and revised financial accounting standards (“SAK”) and interpretation to financial accounting standards (“ISAK”) including amendments and annual improvements issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and affected to the financial statements effective for accounting period beginning on or after January 1, 2020.

New and revised SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements effective in the current year are as follows:

- Amendment to PSAK No. 1 and PSAK No. 25: Definition of Material. This amendment clarifies the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and some relevant PSAKs. In addition, it also provides clearer guidance regarding the definition of material in the context of reducing over disclosure due to changes in the threshold of the material definition.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI – Lanjutan

a. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020) – Lanjutan

- Amendemen PSAK No. 15 “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”. Amendemen PSAK No. 15 menambahkan paragraf 14A sehingga mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK No. 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama sebagaimana dimaksud dalam PSAK No. 15 paragraf 38.
- Amendemen PSAK No. 22: Definisi Bisnis. Amendemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi adalah merupakan bisnis atau bukan. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambahkan panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses akuisisi bersifat substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan pengujian konsentrasi nilai wajar opsional.
- Amendemen PSAK No. 62, “Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK No. 62: Kontrak Asuransi”.

Amendemen ini memberikan 2 (dua) pendekatan yang bersifat opsional bagi entitas asuransi, yakni:

- a. *Deferral approach*: pengecualian temporer dari penerapan PSAK No. 71 bagi entitas yang aktivitas utamanya adalah menerbitkan kontrak asuransi sebagaimana dalam ruang lingkup PSAK No. 62 (yang diterapkan pada level entitas pelapor); dan
- b. *Overlay approach*: memperkenankan entitas untuk mereklasifikasi beberapa penghasilan atau beban yang timbul dari aset keuangan yang ditetapkan dari laba rugi ke penghasilan komprehensif lain.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) – Continued

a. Standards (SAKs) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAKs) Issued Effective in the Current Year (on or after January 1, 2020) – Continued

- *Amendment to PSAK No. 15 "Investment in Associates and Joint Ventures concerning Long-Term Interests in Associates and Joint Ventures". Amendments to PSAK No. 15 add paragraph 14A so that it is stipulated that the entity also applies PSAK No. 71 to financial instruments in associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests which form a substantial part of the entity's net investment in associates or joint ventures as referred to in PSAK No. 15 paragraph 38.*
- *Amendments to PSAK No. 22: Definition of Business. This amendment were issued to help entities determine whether an acquired set of activities and assets is a business or not. They clarify the minimum requirements for a business, remove the assessment of whether market participants are capable of replacing any missing elements, add guidance to help entities assess whether an acquired process is substantive, narrow the definitions of a business and of outputs, and introduce an optional fair value concentration test.*
- *Amendment to PSAK No. 62 "Insurance Contract-Implementing PSAK No. 71: Financial Instruments with PSAK No. 62: Insurance Contract".*

This Amendment provides 2 (two) approaches that are optional for the insurer, namely:

- a. *Deferrral approach*: temporary exemption from the application of PSAK No. 71 to an entity whose principal activity is to issue an insurance contract as within the scope of PSAK No. 62 (which applies at the level of the reporting entity); and
- b. *Overlay approach*: allows an entity to reclassify multiple income or expenses arising from a defined financial asset from profit or loss to another comprehensive income.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI – Lanjutan

a. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020) – Lanjutan

- PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan”, PSAK No. 71 mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. PSAK ini akan menggantikan PSAK No. 55 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.
- Amendemen PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”. Amendemen PSAK No. 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A sehingga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

PSAK No. 72 “Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan”, PSAK No. 72 mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan. PSAK No. 72 ini akan menggantikan PSAK No. 23 “Pendapatan”, PSAK No. 34 “Kontrak Konstruksi”, PSAK No. 44 “Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate”, ISAK No. 10 “Program Loyalitas Pelanggan”, ISAK No. 21 “Perjanjian Konstruksi Real Estat” dan ISAK No. 27: Pengalihan Aset Dari Pelanggan”.
- PSAK No. 73 “Sewa”, PSAK No. 73 mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa dan mensyaratkan penyewa untuk mengukur semua sewa menggunakan model akuntansi tunggal yang serupa dengan akuntansi untuk sewa pembiayaan menurut PSAK No. 30. PSAK No. 73 mengatur dua pengecualian untuk penyewa yang terkait dengan model akuntansi, yaitu untuk sewa dengan aset bernilai rendah dan sewa dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang. Pada saat dimulainya masa sewa, penyewa mengakui kewajiban membayar sewa dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasari selama masa sewa.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) – Continued

a. Standards (SAKs) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAKs) Issued Effective in the Current Year (on or after January 1, 2020) - Continued

- PSAK No. 71 “Financial Instruments”, PSAK No. 71 provides for changes in terms of financial instruments such as classification and measurement, impairment, and hedge accounting. This PSAK will replace PSAK No. 55 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”.
- Amendment to PSAK No. 71 “Financial Instruments concerning Features of Accelerating Repayment with Negative Compensation”. Amendment to PSAK No. 71 amend paragraphs PP4.1.11 (b) and PP4.1.12 (b), and add paragraphs PP4.1.12A to regulate that financial assets with accelerated repayment features that can result in negative compensation meeting qualifications as contractual cash flows originating solely from payment of principal and interest from the principal amount owed.

PSAK No. 72 “Revenue from Contract with Customers”, PSAK No. 72 sets the revenue recognition model of the contract with the customer, so the entity is expected to conduct an analysis before acknowledging the revenue. This PSAK No. 72 will replace PSAK No. 23 “Revenue”, PSAK No. 34 “Construction Contracts”, PSAK No. 44 “Accounting for Real Estate Development Activities”, ISAK No. 10 “Customer Loyalty Program”, ISAK No. 21 “Real Estate Construction Agreements” and ISAK No. 27: Transfer of Assets From Customers”.
- PSAK No. 73 “Leases”, PSAK No. 73 establishes the principles for recognizing, measuring, presenting and disclosing leases and requires lessee to measure all leases using a single accounting model which is similar as the accounting for finance leases according to PSAK No. 30. PSAK No. 73 provides two exceptions to lessee related to the accounting model, namely for leases with low value assets and leases with a period of 12 months or less. At the commencement of the lease period, the lessee will recognize the obligation to pay the lease and assets that represent the right to use underlying assets during the lease period.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI – Lanjutan

a. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020) - Lanjutan

- Penyewa juga akan secara terpisah mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dan beban penyusutan aset sewaan. Akuntansi pesewa berdasarkan PSAK No. 73 secara substansial tidak berubah dari akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAK No. 30. Pesewa akan terus mengklasifikasikan semua sewa berdasarkan prinsip klasifikasi sebagaimana diatur dalam PSAK No. 30. PSAK No. 73 menggantikan PSAK No. 30 “Sewa”, dan interpretasinya berdasarkan ISAK No. 8 “Menentukan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa”, ISAK No. 23 “Sewa Operasi - Insentif”, ISAK No. 24 “Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Sewa Dalam Bentuk Hukum” dan ISAK No. 25 “Hak Atas Tanah”.
- ISAK No. 35 “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba”. ISAK No. 35 mengatur ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas yang berorientasi nirlaba terlepas dari bentuk hukum entitas. Interpretasi ini juga dapat diterapkan oleh entitas berorientasi nirlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Akuntabilitas Non Publik (SAK ETAP). ISAK No. 35 menggantikan PSAK No. 45 “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nirlaba” berdasarkan PSAK No. 13 tentang Pencabutan PSAK No. 45 “Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba”.

b. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Namun Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2021)

- PSAK No. 74 “Kontrak Asuransi”. Kontrak asuransi mengharuskan entitas untuk mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi. Portofolio terdiri dari kontrak yang memiliki risiko serupa dan dikelola bersama. Entitas membagi portofolio kontrak asuransi yang diterbitkan, minimal, ke dalam kelompok kontrak yang memberatkan pada pengakuan awal, kelompok kontrak pada pengakuan awal tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk kemudian menjadi kontrak yang merugi, dan kelompok kontrak yang tersisa dalam portofolio.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) – Continued

a. Standards (SAKs) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAKs) Issued Effective in the Current Year (on or after January 1, 2020) - Continued

- Lessee will also separately recognize interest expense for lease obligations and depreciation expense on lease assets. Accounting for lessor based on PSAK No. 73 is substantially unchanged from accounting as stipulated in PSAK No. 30. Lessor will continue to classify all leases based on the classification principle as currently regulated in PSAK No. 30. PSAK No. 73 replaces PSAK No. 30 “Leases”, and its interpretation under ISAK No. 8 “Determining whether an Arrangement contains a Lease”, ISAK No. 23 “Operating Lease – Incentives”, ISAK No. 24 “Evaluation of Substance of Several Transactions Involving a Legal Form of Lease” and ISAK No. 25 “Landrights”.
- ISAK No. 35 “Presentation of Financial Statements Non-for-Profit Oriented Entity”. ISAK No. 35 regulates the scope of the presentation of financial statements not-for-profit oriented entity regardless of the legal form of the entity. This interpretation can also be applied by not-for-profit oriented entities that use the Financial Accounting Standards for Entities Non-Publicly Accountability (SAK ETAP). ISAK No. 35 replaces PSAK No. 45 “Presentation of Financial Statements Not-for-profit Entity” based on PPSAK No. 13 concerning Revocation PSAK No. 45 “Financial Reporting Non-for-Profit Entity”.

b. Standards (SAKs) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAKs) Issued but not Effective in the Current Year (on or after January 1, 2021)

- PSAK No. 74 “Insurance Contract”. Insurance contracts require an entity to identify an insurance contract portfolio. The portfolio consists of contracts that have similar risks and are jointly managed. An entity divides insurance contract portfolio issued, at the minimum, into a group of onerous contracts at initial recognition, a group of contracts at initial recognition has no significant possibility of subsequently becoming a losing contract, and the remaining contract groups in the portfolio.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI – Lanjutan

b. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Namun Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2021) - Lanjutan

PSAK No. 74 juga mengatur bahwa kelompok kontrak asuransi diukur pada nilai total arus kas pemenuhan dan margin jasa kontraktual. Arus kas kepatuhan mencakup estimasi arus kas masa depan dan penyesuaian untuk mencerminkan nilai waktu uang dan risiko keuangan yang terkait dengan arus kas masa depan, serta penyesuaian terhadap risiko non-keuangan. Pendekatan ini dimodifikasi untuk mengukur grup kontrak reasuransi yang dimiliki dan grup kontrak asuransi dengan fitur partisipasi diskresi. Namun, entitas dapat menggunakan pendekatan alokasi premi untuk mengukur kontrak asuransi jika kontrak tersebut memenuhi kriteria tertentu.

PSAK No. 74 juga mensyaratkan entitas untuk memisahkan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain ke dalam hasil jasa asuransi yang terdiri dari pendapatan asuransi dan biaya jasa asuransi, dan pendapatan atau beban keuangan. Pendapatan asuransi dan biaya jasa asuransi yang disajikan dalam laporan laba rugi tidak termasuk komponen investasi. Pendapatan asuransi adalah total perubahan kewajiban untuk sisa periode pertanggungjawaban dalam periode yang berkaitan dengan jasa yang pembayarannya diharapkan oleh entitas.

PSAK No. 74 ini akan menggantikan PSAK No. 62 “Kontrak Asuransi”.

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amandemen dan peyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Entitas telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam “Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting”.

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Entitas atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (ISAK) – Continued

b. Standards (SAKs) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAKs) Issued but not Effective in the Current Year (on or after January 1, 2021) - Continued

PSAK No. 74 also regulates that insurance contract groups are measured at the total value of fulfillment cash flows and contractual service margins. Compliance cash flows include estimates of future cash flows and adjustments to reflect the time value of money and financial risks related to future cash flows, as well as adjustments to non-financial risks. This approach was modified to measure the reinsurance contract group held and the insurance contract group with the discretionary participation feature. However, an entity can use a premium allocation approach to measure insurance contracts if the contract meets certain criteria.

PSAK No. 74 also requires the entity to separate the amount recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income into the results of insurance services consisting of insurance income and insurance service costs, and financial income or expenses. Insurance income and insurance service costs presented in profit or loss do not include any investment components. Insurance income is the total of the change in liability for the remaining coverage period in the period relating to the services for which the entity expects to receive payment.

This PSAK No. 74 will replace PSAK No. 62 “Insurance Contract”.

Several SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements that became effective in the current year and are relevant to the Entity operation have been adopted as disclosed in the “Summary of Significant Accounting Policies”.

Other SAKs and ISAKs that are not relevant to the Entity operation or might affect the accounting policies in the future are being evaluated by the management the potential impact that might arise from the adoption of these standards to the financial statements.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 yaitu sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk standar baru dan yang direvisi, amandemen dan penyesuaian tahunan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, serta Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yaitu Peraturan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2013) "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK revisi ini mengubah pengelompokan item-item yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain (OCI). Item-item yang akan direklasifikasi ke laba rugi akan disajikan terpisah dari item-item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Penerapan PSAK ini hanya berakibat pada penyajian saja dan tidak berdampak pada posisi keuangan dan kinerja Entitas.

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Entitas.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The accounting policies have been applied consistently in the preparation of financial statements except for the adoption of several new and revised SAKs and ISAKs that effective on or after January 1, 2020, as follows:

a. Compliance Statement

The financial statements have been prepared in accordance with SAK, which comprises the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, including applicable new and revised standards, effective on January 1, 2020 and Attachment to the Decision of the Chairman of Bapepam – LK (now becoming Indonesian Financial Services Authority or OJK) No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012 that is Regulation No.VIII.G.7 regarding Presentation and Disclosures of the Financial Statements of the Public Company that effective for the financial statements that ended on or after December 31, 2012.

b. Basis for the Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with PSAK No. 1 (Revised 2013) "Presentation of Financial Statements". This revised PSAK changes the grouping of items presented in OCI. Items that could be reclassified to profit or loss would be presented separately from items that will never be reclassified. The adoption of this PSAK affects presentation only and has no impact on the Entity's financial position or performance.

The financial statements have been prepared on the assumption of going concern and accrual basis except for statements of cash flows using cash basis.

The measurement in the preparation of financial statements is historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of respective account.

The statements of cash flows, which have been prepared using the direct method, present cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah (Rp) which also represents functional currency of the Entity.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan - Lanjutan

Ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka entitas menyajikan kembali laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan.

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Entitas melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual.

PSAK ini juga memberikan pengecualian dari persyaratan umum pengungkapan pihak berelasi atas transaksi dengan pemerintah dan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah (entitas berelasi dengan Pemerintah).

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - (iii) Personil manajemen kunci Perusahaan atau Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
- b. Suatu entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (i) Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari Grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (ii) Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

b. Basis for the Preparation of Financial Statements - Continued

When the entity adopts accounting policy retrospectively or restates items in its financial statements or the entity reclassifies the items in its financial statements, the statement of financial position at the beginning of comparative period is presented.

c. Transactions with Related Parties

The Entity deals transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010) "Related Party Disclosures" and PSAK No. 7 (Improvements 2015) "Related Party Disclosures".

This PSAK requires disclosure of relationships, transactions and balances related parties, including commitments in the consolidated financial statements and separate financial statements of the parent entity also applies to individual financial statements.

This PSAK also introduces an exemption from the general related party disclosure requirements for transactions with government and entities that are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the same Government as the reporting entity (Government related entities).

Related party is a person or an entity related to the entity who prepares financial statements (the reporting entity).

- a. *A person or a close member of that person's family is related to the reporting Entity if that person:*
- (i) has control or joint control over the reporting entity;*
 - (ii) has significant influence over the reporting entity; or*
 - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b. *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
- (i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi - Lanjutan

- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan.
- (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a.i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi tidak dikenakan bunga sedangkan kepada pihak ketiga belum tentu tidak dikenakan bunga.

d. Instrumen Keuangan

Sejak 1 Januari 2020, Entitas menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" termasuk Amandemen PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pembayaran dengan Kompensasi Negatif". Amandemen PSAK No. 71 mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur pelunasan dipercepat yang dapat mengakibatkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi karena arus kas kontraktual hanya berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok hutangnya dan Entitas juga menerapkan PSAK No. 60 (Revisi 2014) "Keuangan Instrumen: Pengungkapan". PSAK No. 71 menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES – Continued

c. Transactions with Related Parties - Continued

- (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- (vii) a person identified in a (i) has significant influence over the entity or is member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

The transaction was conducted on terms agreed by both parties, which terms may not be the same as other transactions conducted by parties who are not related.

All transactions and balances with significant related parties, whether or not conducted with the terms and conditions, as were done with the parties that have no relation to related parties, have been disclosed in the relevant notes to the financial statements.

Other receivables from related parties are not subject to interest, while third parties are not necessarily subject to interest.

d. Financial Instrument

Since January 1, 2020, the Entity adopted PSAK No. 71 "Financial Instruments" including Amendment to PSAK No. 71 "Financial Instruments: Features of Accelerating Repayment with Negative Compensation". Amendment to PSAK No. 71 regulates that financial assets with accelerated repayment features that can result in negative compensation meeting qualifications as contractual cash flows originating solely from payment of principal and interest from the principal amount owed and the Entity also applied PSAK 60 (Revised 2014) "Financial Instruments: Disclosures". PSAK No. 71 replaces PSAK No. 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

Selain itu, Entitas juga menerapkan ISAK No. 13, "Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri" dan ISAK No. 26 (2014), "Penilaian Ulang Derivatif Melekat".

PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", menguraikan persyaratan akuntansi penyajian dari instrumen keuangan, terutama untuk klasifikasi instrumen tersebut dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Standar ini juga memberikan panduan pada klasifikasi terkait dengan suku bunga, dividen dan keuntungan / kerugian, dan ketika aset keuangan dan kewajiban keuangan dapat di saling hapus.

PSAK No. 60 (Revisi 2014) mensyaratkan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan, dan sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas adalah terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut. Selain itu, standar ini menjelaskan persyaratan untuk pengungkapan risiko likuiditas.

(1) Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset keuangan diakui pada posisi keuangan ketika entitas menjadi pihak dalam penyediaan instrumen secara kontraktual. Semua aset keuangan diakui dan tidak diakui berdasarkan tanggal perdagangan di mana pembelian atau penjualan aset keuangan dilakukan berdasarkan kontrak yang persyaratannya mengharuskan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pasar yang bersangkutan.

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dalam hal investasi tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL, nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan.

Semua aset keuangan yang diakui kemudian diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES – Continued

d. Financial Instrument - Continued

In addition, the Entity also adopted ISAK No. 13, "Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation" and ISAK No. 26 (Revised 2014), "Reassessment of Embedded Derivatives".

PSAK No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", outlines the accounting requirements for the presentation of financial instruments, particularly as to the classification of such instruments into financial assets, financial liabilities and equity instruments. The standard also provides guidance on the classification of related interest, dividends and gains/losses, and when financial assets and financial liabilities can be offset.

PSAK No. 60 (Revised 2014) requires quantitative and qualitative disclosures in the financial statements that enable users to evaluate the significance of financial instruments on the financial position and performance, and the nature and extent of risks arising from financial instruments to which the entity is exposed during the period and at the end of the reporting period and how the entity manages such risks. In addition, this standard describes the requirement for disclosure of liquidity risk.

(1) Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

Financial assets are recognized on the financial position when the entity becomes a party to the contractual provision of the instrument. All financial assets are recognized and de-recognized on a trade date basis where the purchase or sale of financial assets is under a contract whose terms require delivery of assets within the time frame established by the market concerned.

Financial assets are initially measured at fair value, in the case of investments not classified as at FVTPL, fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets.

All recognized financial assets are subsequently measured in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(1) Aset Keuangan

Pengukuran Selanjutnya

Instrumen utang yang memenuhi kondisi berikut diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Semua aset keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL).

Entitas dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan berikut ini pada pengakuan awal aset keuangan:

- Entitas dapat memilih yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan perubahan berikutnya dalam nilai wajar dari investasi ekuitas dalam pendapatan komprehensif lain (tanpa klasifikasi kembali) jika memenuhi kriteria tertentu; dan
- Entitas dapat menetapkan investasi utang yang tidak dapat dibatalkan yang memenuhi biaya diamortisasi atau kriteria FVOCI sebagai yang diukur pada FVTPL jika tindakan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi akuntansi.

Dalam tahun berjalan, Entitas tidak ada penetapan investasi utang yang memenuhi biaya diamortisasi atau kriteria FVOCI sebagai yang diukur pada FVTPL maupun investasi ekuitas sebagai FVOCI.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES – Continued

d. Financial Instrument - Continued

(1) Financial Assets

Subsequent Measurement

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

All other financial assets that are not classified as amortized cost or FVOCI are subsequently measured at fair value through profit or loss (FVTPL).

The Entity may make the following irrevocable designation at initial recognition of a financial asset:

- the Entity may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income (no recycling) if meet certain criteria; and
- the Entity may irrevocably designate a debt investment that meets the amortized cost or FVOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch.

In the current year, the Entity has neither designated any debt investments that meet the amortized cost or FVOCI criteria as measured at FVTPL nor any equity investment as FVOCI.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(1) Aset Keuangan - Lanjutan

Biaya Perolehan Diamortisasi dan Metode Bunga Efektif

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah jumlah di mana aset keuangan diukur pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif dari setiap perbedaan antara jumlah awal dan jumlah jatuh tempo, disesuaikan dengan penyisihan kerugian. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto dari aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur kemudian pada biaya perolehan diamortisasi dan pada FVOCI. Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto dari aset keuangan (basis bruto), kecuali untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit. Untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif pada biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika, pada periode pelaporan berikutnya, risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit meningkat sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit, maka pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES – Continued

d. Financial Instrument - Continued

(1) Financial Assets - Continued

Amortized Cost and Effective Interest Method

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Interest income is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost and at FVOCI. For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset (gross basis), except for financial assets that have subsequently become credit-impaired. For financial assets that have subsequently become credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If, in subsequent reporting periods, the credit risk on the credit-impaired financial instrument improves so that the financial asset is no longer credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(1) Aset Keuangan - Lanjutan

Biaya Perolehan Diamortisasi dan Metode Bunga Efektif - Lanjutan

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (yaitu aset yang mengalami penurunan nilai kredit pada pengakuan awal), suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit yang diharapkan, selama perkiraan umur dari instrumen utang, atau, jika sesuai, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto dari instrumen hutang pada pengenalan awal.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, Entitas mengakui pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit ke biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut sejak pengakuan awal. Penghitungan tidak kembali ke basis bruto meskipun risiko kredit dari aset keuangan kemudian membaik sehingga aset keuangan tidak lagi memburuk.

Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan dimasukkan dalam item baris "Pendapatan Keuangan - Pendapatan Bunga".

Investasi dalam Instrumen Utang Yang Diklasifikasikan sebagai FVOCI

Instrumen utang pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, perubahan nilai tercatat instrumen utang sebagai akibat dari keuntungan dan kerugian selisih kurs, keuntungan atau kerugian penurunan nilai, dan pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, diakui dalam laporan laba rugi. Jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laporan laba rugi jika aset keuangan tersebut diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Semua perubahan lain dalam nilai tercatat dari aset keuangan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi dalam judul cadangan revaluasi investasi. Ketika aset keuangan ini dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES – Continued

d. Financial Instrument - Continued

(1) Financial Assets - Continued

Amortized Cost and Effective Interest Method - Continued

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets (i.e. assets that are credit-impaired on initial recognition), the effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition.

For purchased or originated credit-impaired financial assets, the Entity recognizes interest income by applying the credit-adjusted effective interest rate to the amortized cost of the financial asset from initial recognition. The calculation does not revert to the gross basis even if the credit risk of the financial asset subsequently improves so that the financial asset is no longer credit-impaired.

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "Finance Income – Interest Income" line item.

Investment in Debt Instruments Classified as at FVOCI

The debt instruments are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, changes in the carrying amount of the debt instruments as a result of foreign exchange gains and losses, impairment gains or losses, and interest income calculated using the effective interest method are recognized in profit or loss. The amounts that are recognized in profit or loss are the same as the amounts that would have been recognized in profit or loss if these financial assets had been measured at amortized cost. All other changes in the carrying amount of these financial assets are recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of investments revaluation reserve. When these financial assets are derecognized, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan

d. Instrumen Keuangan – Lanjutan

(1) Aset Keuangan – Lanjutan

Investasi dalam Instrumen Ekuitas yang Ditetapkan pada FVOCI

Pada pengakuan awal, Entitas dapat membuat pemilihan yang tidak dapat dibatalkan (atas dasar instrumen per instrumen) untuk menetapkan investasi pada instrumen ekuitas sebagai pada FVOCI. Penunjukan FVOCI tidak diizinkan jika investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan atau jika merupakan imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis yang menerapkan PSAK No. 22.

Aset keuangan disimpan untuk diperdagangkan jika:

- diakuisisi terutama untuk tujuan menjualnya dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal, ini merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan teridentifikasi yang dikelola bersama oleh Entitas dan memiliki bukti pola pengambilan laba jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif (kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

Investasi dalam instrumen ekuitas pada FVOCI pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, nilai wajar tersebut diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif tidak akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan investasi ekuitas, melainkan akan ditransfer ke saldo laba.

Pendapatan dividen dari investasi dalam instrumen ekuitas ini diakui dalam laporan laba rugi ketika hak Entitas untuk menerima dividen ditetapkan, kecuali dividen tersebut secara jelas mewakili pemulihan sebagian biaya investasi. Dividen disertakan dalam baris rincian "Pendapatan Keuangan - Pendapatan Dividen" dalam laporan laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES – Continued

d. Financial Instrument – Continued

(1) Financial Assets - Continued

Investment in Equity Instruments Designated as at FVOCI

On initial recognition, the Entity may make an irrevocable election (on an instrument-by-instrument basis) to designate investments in equity instruments as at FVOCI. Designation at FVOCI is not permitted if the equity investment is held for trading or if it is contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination to which PSAK No. 22 applies.

A financial asset is held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling it in the near term; or
- on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Entity manages together and has evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative (except for a derivative that is a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument).

Investments in equity instruments at FVOCI are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, they are measured at fair value with gains and losses arising from changes in fair value recognized in other comprehensive income and accumulated in the investments revaluation reserve. The cumulative gain or loss will not be reclassified to profit or loss on disposal of the equity investments, instead, they will be transferred to retained earnings.

Dividends income on these investments in equity instruments are recognized in profit or loss when the Entity's right to receive the dividends is established, unless the dividends clearly represent a recovery of part of the cost of the investment. Dividends are included in the "Finance Income – Dividend Income" line item in profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(1) Aset Keuangan - Lanjutan

Aset Keuangan pada FVTPL

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI diukur pada FVTPL.

Secara khusus:

- Investasi pada instrumen ekuitas diklasifikasikan sebagai FVTPL, kecuali Entitas menetapkan investasi ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau imbalan kontinjensi yang timbul dari kombinasi bisnis seperti pada FVOCI yang tidak dapat dibatalkan pada pengakuan awal.
- Instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau kriteria FVOCI diklasifikasikan sebagai FVTPL. Selain itu, instrumen utang yang memenuhi kriteria biaya diamortisasi atau kriteria FVOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal jika penetapan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan yang akan timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian pada mereka atas dasar yang berbeda.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan keuntungan atau kerugian nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan dan dimasukkan dalam item baris "Keuntungan dan Kerugian Lainnya".

Keuntungan dan Kerugian Selisih Kurs

Nilai tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan dengan kurs spot pada setiap tanggal pelaporan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Financial Instruments – Continued

(1) Financial Assets - Continued

Financial Assets at FVTPL

Financial assets that do not meet the criteria for being measured at amortized cost or FVOCI are measured at FVTPL.

Specifically:

- Investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the Entity designates an equity investment that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination as at FVOCI irrevocably on initial recognition.
- Debt instruments that do not meet the amortized cost criteria or the FVOCI criteria are classified as at FVTPL. In addition, debt instruments that meet either the amortized cost criteria or the FVOCI criteria may be designated as at FVTPL irrevocably upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on them on different bases.

Financial assets at FVTPL are measured at fair value as at each reporting date, with any fair value gains or losses recognized in profit or loss to the extent they are not part of a designated hedging relationship. The net gain or loss recognized in profit or loss includes any dividend or interest earned on the financial asset and is included in the "Other Gains and Losses" line item.

Foreign Exchange Gains and Losses

The carrying amount of financial assets that are denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate as at each reporting date.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(1) Aset Keuangan - Lanjutan

Keuntungan dan Kerugian Selisih Kurs - Lanjutan

Secara khusus,

- untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan, selisih kurs diakui dalam laporan laba rugi pada item baris "Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs";
- untuk instrumen utang yang diukur pada FVOCI yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan, selisih kurs atas biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang tersebut diakui dalam laporan laba rugi pada item baris "Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs";
- untuk aset keuangan yang diukur pada FVTPL yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan, selisih kurs diakui dalam laporan laba rugi pada item baris "Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs"; dan
- untuk instrumen ekuitas yang diukur dengan FVOCI, selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lain dalam cadangan revaluasi investasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Entitas mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas investasi dalam instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada FVOCI, piutang sewa, aset kontrak, serta komitmen pinjaman pada kontrak jaminan keuangan. Tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk investasi pada instrumen ekuitas. Jumlah kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal atas instrumen keuangan tersebut.

Entitas selalu mengakui ECL sepanjang umur untuk piutang usaha, aset kontrak dan piutang sewa. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan ini diestimasi dengan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Entitas, disesuaikan untuk faktor-faktor yang spesifik bagi debitur, kondisi ekonomi secara umum dan penilaian terhadap arah saat ini maupun arah kondisi perkiraan kerugian pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu uang jika sesuai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Financial Instruments – Continued

(1) Financial Assets - Continued

Foreign Exchange Gains and Losses - Continued

Specifically,

- for financial assets measured at amortized cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "Gains or Losses on Foreign Exchange" line item;
- for debt instruments measured at FVOCI that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences on the amortized cost of the debt instrument are recognized in profit or loss in the "Gains or Losses on Foreign Exchange" line item;
- for financial assets measured at FVTPL that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "Gains or Losses on Foreign Exchange" line item; and
- for equity instruments measured at FVOCI, exchange differences are recognized in other comprehensive income in the investments revaluation reserve.

Impairment of Financial Assets

The Entity recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on investments in debt instruments that are measured at amortized cost or at FVOCI, lease receivables, contract assets, as well as on loan commitments financial guarantee contracts. No impairment loss is recognized for investments in equity instruments. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

The Entity always recognizes lifetime ECL for trade receivables, contract assets and lease receivables. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Entity's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(1) Aset Keuangan - Lanjutan

Penurunan Nilai Aset Keuangan - Lanjutan

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Kelpompok Usaha mengakui ECL sepanjang umur ketika terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal. Sebaliknya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut dengan jumlah yang sama dengan ECL 12 bulan (12mECL). Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan atau risiko gagal bayar yang terjadi sejak pengakuan awal alih-alih pada bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit pada tanggal pelaporan atau terjadi gagal bayar (default) yang sebenarnya.

ECL sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan peristiwa gagal bayar (default) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, 12mECL merupakan porsi ECL sepanjang umur yang diharapkan dihasilkan dari peristiwa gagal bayar (default) pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Risiko Kredit Meningkat Signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Entitas membandingkan risiko gagal bayar (default) yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar (default) yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian ini, Entitas mempertimbangkan informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajar dan dapat didukung, termasuk pengalaman historis dan informasi berwawasan ke depan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Informasi berwawasan ke depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri tempat debitur Entitas beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah, lembaga pemikir (think-tanks) terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal dan memperkirakan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Entitas.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Financial Instruments – Continued

(1) Financial Assets - Continued

Impairment of Financial Assets - Continued

For all other financial instruments, the Entity recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Entity measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL (12mECL). The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit-impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12mECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Significant Increase in Credit Risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Entity compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Entity considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Entity's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Entity's core operations.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(1) Aset Keuangan - Lanjutan

Risiko Kredit Meningkat Signifikan - Lanjutan

Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, pada tanggal Entitas menjadi salah satu pihak dari komitmen yang tidak dapat dibatalkan dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk tujuan penilaian penurunan nilai instrumen keuangan. Dalam menilai apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal atas komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, Entitas mempertimbangkan perubahan risiko di mana debitur tertentu akan gagal bayar (default) dalam kontrak.

Entitas secara berkala memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlah tersebut jatuh tempo.

Jika Entitas telah mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan dengan jumlah yang sama dengan ECL sepanjang umur pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan saat ini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umur tidak lagi terpenuhi, Entitas mengukur penyisihan kerugian pada jumlah yang sama dengan 12mECL pada tanggal pelaporan saat ini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan yang disederhanakan.

Jika Entitas telah mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan dengan jumlah yang sama dengan ECL sepanjang umur pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan saat ini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umur tidak lagi terpenuhi, Entitas mengukur penyisihan kerugian pada jumlah yang sama dengan 12mECL pada tanggal pelaporan saat ini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan yang disederhanakan.

Entitas mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian yang sesuai dengan nilai tercatatnya melalui akun penyisihan kerugian, kecuali untuk investasi dalam instrumen hutang yang diukur pada FVOCI, di mana penyisihan kerugian diakui pada penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, dan tidak mengurangi nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES – Continued

d. Financial Instruments – Continued

(1) Financial Assets - Continued

Significant Increase in Credit Risk - Continued

For loan commitments and financial guarantee contracts, the date that the Entity becomes a party to the irrevocable commitment is considered to be the date of initial recognition for the purposes of assessing the financial instrument for impairment. In assessing whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition of a loan commitment and financial guarantee contract, the Entity considers the changes in the risk that the specified debtor will default on the contract.

The Entity regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

If the Entity has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Entity measures the loss allowance at an amount equal to 12mECL at the current reporting date, except for assets for which simplified approach was used.

If the Entity has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Entity measures the loss allowance at an amount equal to 12mECL at the current reporting date, except for assets for which simplified approach was used.

The Entity recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investments in debt instruments that are measured at FVOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and accumulated in the investment revaluation reserve, and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the statement of financial position.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(1) Aset Keuangan - Lanjutan

Kebijakan Penghapusan

Entitas menghapus aset keuangan jika terdapat informasi yang menunjukkan bahwa debitur berada dalam kesulitan keuangan yang parah dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis. Aset keuangan yang dihapuskan mungkin masih tunduk pada aktivitas penegakan hukum berdasarkan prosedur pemulihan Entitas, dengan mempertimbangkan advis hukum jika sesuai. Setiap pemulihan yang dilakukan diakui dalam laporan laba rugi.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan hanya jika hak kontraktual atas arus kas dari aset tersebut berakhir, atau saat aset keuangan tersebut dialihkan dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset kepada pihak lain. Jika Entitas tidak mengalihkan atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan dan terus mengendalikan aset yang dialihkan, Kelompok Usaha mengakui hak kepemilikannya atas aset dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Entitas memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang dialihkan, Entitas tetap mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar hasil yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laporan laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi direklasifikasi ke laba rugi. Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah ditetapkan Entitas pada pengakuan awal untuk diukur pada FVOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES -Continued

d. Financial Instruments - Continued

(1) Financial Assets - Continued

Write-off policy

The Entity writes off a financial asset when there is information indicating that the debtor is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Entity's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Derecognition of Financial Assets

The Entity derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another party. If the Entity neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Entity recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Entity retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Entity continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investments revaluation reserve is reclassified to profit or loss. In contrast, on derecognition of an investment in equity instrument which the Entity has elected on initial recognition to measure at FVOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investments revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(2) Liabilitas Keuangan

Semua liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif atau pada FVTPL.

Namun, liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat untuk penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, kontrak dan komitmen jaminan keuangan yang diterbitkan oleh Entitas, diukur sesuai dengan kebijakan akuntansi spesifik yang ditetapkan di bawah ini.

Liabilitas Keuangan Diukur pada FVTPL

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika liabilitas keuangan merupakan imbalan kontinjensi dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- telah diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal, ini merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang diidentifikasi yang dikelola bersama oleh Entitas dan memiliki pola pengambilan keuntungan jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif, kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau imbalan kontinjensi dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada pengakuan awal jika:

- penunjukan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi pengukuran atau pengakuan yang inkonsistensi, yang jika tidak maka akan timbul; atau

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Financial Instruments - Continued

(2) Financial Liabilities

All financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method or at FVTPL.

However, financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies, financial guarantee contracts and commitments issued by the Entity, are measured in accordance with the specific accounting policies set out below.

Financial Liabilities Subsequently Measured at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is contingent consideration of an acquirer in a business combination, held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing it in the near term; or
- on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative, except for a derivative that is a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument.

A financial liability other than a financial liability held for trading or contingent consideration of an acquirer in a business combination may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency, that would otherwise arise; or

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(2) Liabilitas Keuangan - Lanjutan

Liabilitas Keuangan Diukur pada FVTPL

- liabilitas keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas keuangan atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan oleh Entitas, dan informasi tentang pengelompokan tersebut adalah disediakan secara internal atas dasar tersebut; atau
- merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK No. 71 mengizinkan seluruh kontrak gabungan untuk ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan pada FVTPL disajikan sebesar nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi sepanjang hal tersebut bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi menggabungkan setiap bunga yang dibayarkan atas liabilitas keuangan dan dimasukkan dalam item baris "Keuntungan dan Kerugian Lain-lain".

Namun, untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL, jumlah perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit sendiri dari liabilitas tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam pendapatan komprehensif lain akan menciptakan atau memperbesar inkonsistensi akuntansi dalam laba rugi. Sisa perubahan nilai wajar karena selain risiko kredit sendiri dari liabilitas diakui dalam laporan laba rugi. Perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko kredit liabilitas keuangan diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan kemudian tidak direklasifikasi ke laba rugi; sebagai gantinya, dapat dipindahkan ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

Keuntungan atau kerugian dari kontrak jaminan keuangan dan komitmen pinjaman yang diterbitkan oleh Entitas yang ditetapkan oleh Entitas pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam laporan laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES – Continued

d. *Financial Instruments – Continued*

(2) *Financial Liabilities - Continued*

Financial Liabilities Subsequently Measured at FVTPL

- *the financial liability forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both, which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with the Entity's documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis; or*
- *it forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and PSAK No. 71 permits the entire combined contract to be designated as at FVTPL.*

Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value with any gains or losses arising on changes in fair value recognized in profit or loss to the extent that they are not part of a designated hedging relationship. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liabilities and is included in the "Other Gains and Losses" line item.

However, for financial liabilities that are designated as at FVTPL, the amount of change in the fair value of the financial liability that is attributable to changes in own credit risk of that liability is recognized in other comprehensive income, unless the recognition of the effects of changes in the liability's credit risk in other comprehensive income would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss. The remaining amount of change in the fair value due to other than own credit risk of liability is recognized in profit or loss. Changes in fair value attributable to a financial liability's credit risk that are recognized in other comprehensive income are not subsequently reclassified to profit or loss; instead, they are transferred to retained earnings upon derecognition of the financial liability.

Gains or losses on financial guarantee contracts and loan commitments issued by the Entity that are designated by the Entity as at fair value through profit or loss are recognized in profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(2) Liabilitas Keuangan - Lanjutan

Liabilitas Keuangan Selanjutnya Diukur pada Biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan imbalan kontinjensi dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, tidak dimiliki untuk diperdagangkan, atau ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran tunai di masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan premi atau diskon lainnya) selama perkiraan umur kewajiban keuangan, atau (jika sesuai) periode yang lebih singkat, untuk biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan.

Keuntungan dan Kerugian Selisih Kurs

Untuk liabilitas keuangan dalam mata uang asing dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan, keuntungan dan kerugian selisih kurs ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi instrumen tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs ini diakui dalam "Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs" dalam laporan laba rugi untuk liabilitas keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan. Untuk liabilitas yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai untuk lindung nilai atas risiko mata uang asing, keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah.

Nilai wajar dari liabilitas keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan dengan kurs spot pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL, komponen valuta asing merupakan bagian dari keuntungan atau kerugian nilai wajar dan diakui dalam laporan laba rugi untuk liabilitas keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Financial Instruments - Continued

(2) Financial Liabilities - Continued

Financial Liabilities Subsequently Measured at Amortized Cost

Financial liabilities that are not contingent consideration of an acquirer in a business combination, not held-for-trading, or designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period, to the amortized cost of a financial liability.

Foreign Exchange Gains and Losses

For financial liabilities that are denominated in a foreign currency and are measured at amortized cost as at each reporting date, the foreign exchange gains and losses are determined based on the amortized cost of the instruments. These foreign exchange gains and losses are recognized in the "Gains or Losses on Foreign Exchange" in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship. For those which are designated as a hedging instrument for a hedge of foreign currency risk, foreign exchange gains and losses are recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity.

The fair value of financial liabilities denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate at the end of the reporting period. For financial liabilities that are measured as at FVTPL, the foreign exchange component forms part of the fair value gains or losses and is recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan

d. Instrumen Keuangan – Lanjutan

(2) Liabilitas Keuangan – Lanjutan

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Entitas menghentikan pengakuan liabilitas keuangannya jika, dan hanya jika, kewajiban Entitas dilepaskan, dibatalkan, atau habis masa berlakunya. Selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan terutang, termasuk aset non tunai yang dialihkan atau liabilitas yang diambil alih, diakui dalam laporan laba rugi.

Ketika Entitas menukar dengan pemberi pinjaman yang eksis, suatu instrumen utang ke instrumen lain dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Entitas mencatat modifikasi substansial dari persyaratan liabilitas yang ada atau bagian darinya sebagai penghapusan liabilitas keuangan asli dan pengakuan liabilitas baru.

Diasumsikan bahwa persyaratannya secara substansial berbeda jika nilai sekarang yang didiskontokan dari arus kas menurut persyaratan baru, termasuk biaya yang dibayarkan setelah dikurangi biaya yang diterima dan didiskontokan menggunakan tarif efektif awal sekurang-kurangnya 10 persen berbeda dari nilai wajar yang didiskontokan atas nilai sisa arus kas dari liabilitas keuangan awal. Jika modifikasi tidak substansial, perbedaan antara: (1) nilai tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini arus kas setelah modifikasi harus diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lain.

(3) Instrumen Keuangan Derivatif

Untuk mengelola eksposur terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing, termasuk kontrak berjangka valuta asing dan swap suku bunga, Entitas dapat masuk ke dalam berbagai instrumen keuangan derivatif.

Derivatif pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan selanjutnya diukur kembali ke nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan segera diakui dalam laporan laba rugi kecuali derivatif tersebut ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai, di mana waktu pengakuan laba rugi tergantung pada sifat hubungan lindung nilai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Financial Instruments - Continued

(2) Financial Liabilities – Continued

Derecognition of Financial Liabilities

The Entity derecognizes financial liabilities when, and only when, the Entity's obligations are discharged, cancelled or they expire. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognized in profit or loss.

When the Entity exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Entity accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability.

It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10 percent different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification should be recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

(3) Derivative Financial Instruments

To manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risks, including foreign exchange forward contracts and interest rate swaps, the Entity can enter into a variety of derivative financial instruments.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contracts are entered into and are subsequently remeasured to their fair value as at each reporting date. The resulting gain or loss is recognized in profit or loss immediately unless the derivative is designated and effective as a hedging instrument, in which event the timing of the recognition in profit or loss depends on the nature of the hedge relationship.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan

d. Instrumen Keuangan – Lanjutan

(3) Instrumen Keuangan Derivatif – Lanjutan

Derivatif dengan nilai wajar positif diakui sebagai aset keuangan sedangkan derivatif dengan nilai wajar negatif diakui sebagai liabilitas keuangan. Derivatif tidak saling hapus dalam laporan keuangan kecuali Entitas memiliki hak hukum dan niat untuk saling hapus.

Derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas tidak lancar jika sisa jatuh tempo instrumen tersebut lebih dari 12 bulan dan diperkirakan tidak akan direalisasikan atau diselesaikan dalam 12 bulan. Derivatif lainnya disajikan sebagai aset lancar atau liabilitas lancar.

Derivatif Melekat

Derivatif melekat adalah komponen dari kontrak hibrida yang juga mencakup host non-derivatif dengan pengaruh bahwa beberapa arus kas dari instrumen gabungan bervariasi dengan cara yang serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri.

Derivatif yang melekat pada kontrak utama non-derivatif yang bukan merupakan aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 71 diperlakukan sebagai derivatif terpisah jika memenuhi definisi derivatif, risiko dan karakteristiknya tidak terkait erat dengan risiko dan karakteristik kontrak utama dan kontrak utama kontrak tidak diukur pada FVTPL.

Derivatif yang melekat pada kontrak hibrida yang mengandung aset keuangan utama dalam ruang lingkup PSAK No. 71 tidak dipisahkan. Seluruh kontrak hibrida diklasifikasikan dan selanjutnya diukur sebagai biaya perolehan diamortisasi atau FVTPL sebagaimana mestinya.

Berbeda dengan aset keuangan, ketentuan yang ada dalam PSAK 55 untuk pemisahan derivatif melekat tetap dilanjutkan untuk liabilitas keuangan, artinya liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi masih perlu dianalisis untuk menentukan apakah terdapat derivatif melekat yang harus dipertanggungjawabkan secara terpisah pada FVTPL.

Jika kontrak hibrida merupakan liabilitas keuangan kuotasian, alih-alih memisahkan derivatif melekat, Entitas biasanya menetapkan seluruh kontrak hibrida pada FVTPL.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Financial Instruments - Continued

(3) Derivative Financial Instruments – Continued

A derivative with a positive fair value is recognized as a financial asset whereas a derivative with a negative fair value is recognized as a financial liability. Derivatives are not offset in the financial statements unless the Entity has both legal right and intention to offset.

A derivative is presented as a non-current asset or a non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than 12 months and it is not expected to be realized or settled within 12 months. Other derivatives are presented as current assets or current liabilities.

Embedded Derivatives

An embedded derivative is a component of a hybrid contract that also includes a non-derivative host with the effect that some of the cash flows of the combined instrument vary in a way similar to a stand-alone derivative.

Derivatives embedded in non-derivative host contracts that are not financial assets within the scope of PSAK 71 are treated as separate derivatives when they meet the definition of a derivative, their risks and characteristics are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not measured at FVTPL.

Derivatives embedded in hybrid contracts that contain financial asset hosts within the scope of PSAK No. 71 are not separated. The entire hybrid contract is classified and subsequently measured as either amortized cost or FVTPL as appropriate.

In contrast to financial assets, the existing requirements in PSAK 55 for the separation of embedded derivatives have been continued for financial liabilities, meaning that financial liabilities to be measured at amortized cost would still need to be analyzed to determine whether they contain any embedded derivatives that are required to be accounted for separately at FVTPL.

If the hybrid contract is a quoted financial liability, instead of separating the embedded derivative, the Entity generally designates the whole hybrid contract at FVTPL.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(3) Instrumen Keuangan Derivatif – Lanjutan

Derivatif Melekat - Lanjutan

Derivatif melekat disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas tidak lancar jika sisa jatuh tempo instrumen hibrida yang terkait dengan derivatif melekat lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan akan direalisasikan atau diselesaikan dalam 12 bulan.

(4) Akuntansi Lindung Nilai

Entitas menetapkan derivatif tertentu sebagai instrumen lindung nilai sehubungan dengan risiko mata uang asing dan risiko suku bunga dalam lindung nilai nilai wajar, lindung nilai arus kas, atau lindung nilai atas investasi neto dalam operasi luar negeri yang sesuai. Lindung nilai atas risiko nilai tukar mata uang asing atas komitmen dicatat sebagai lindung nilai arus kas.

Pada awal hubungan lindung nilai, Entitas mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi nilai, bersama dengan tujuan manajemen risiko dan strateginya untuk melakukan berbagai transaksi lindung nilai. Selanjutnya, pada awal lindung nilai dan secara berkelanjutan, Entitas mendokumentasikan apakah instrumen lindung nilai efektif dalam mengimbangi perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindungi nilai yang disebabkan oleh risiko lindung nilai, yaitu ketika hubungan lindung nilai memenuhi semua dari persyaratan efektivitas lindung nilai berikut:

- ada hubungan ekonomi antara item yang dilindungi nilai dan instrumen lindung nilai;
- pengaruh risiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomi tersebut; dan
- rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah sama dengan yang dihasilkan dari jumlah item yang dilindungi nilai yang sebenarnya dilindungi nilai oleh Entitas dan jumlah instrumen lindung nilai yang sebenarnya digunakan Entitas untuk lindung nilai atas jumlah item yang dilindungi nilai tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Financial Instruments – Continued

(3) Derivative Financial Instruments – Continued

Embedded Derivatives - Continued

An embedded derivative is presented as a non-current asset or non-current liability if the remaining maturity of the hybrid instrument to which the embedded derivative relates is more than 12 months and is not expected to be realized or settled within 12 months.

(4) Hedge Accounting

The Entity designates certain derivatives as hedging instruments in respect of foreign currency risk and interest rate risk in fair value hedges, cash flow hedges, or hedges of net investments in foreign operations as appropriate. Hedges of foreign exchange risk on firm commitments are accounted for as cash flow hedges.

At the inception of the hedge relationship, the Entity documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, along with its risk management objectives and its strategy for undertaking various hedge transactions. Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing basis, the Entity documents whether the hedging instrument is effective in offsetting changes in fair values or cash flows of the hedged item attributable to the hedged risk, which is when the hedging relationships meet all of the following hedge effectiveness requirements:

- there is an economic relationship between the hedged item and the hedging instrument;
- the effect of credit risk does not dominate the value changes that result from that economic relationship; and
- the hedge ratio of the hedging relationship is the same as that resulting from the quantity of the hedged item that the Entity actually hedges and the quantity of the hedging instrument that the entity actually uses to hedge that quantity of hedged item.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(4) Akuntansi Lindung Nilai - Lanjutan

Jika hubungan lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai yang berkaitan dengan rasio lindung nilai tetapi tujuan manajemen risiko untuk hubungan lindung nilai yang ditentukan tetap sama, Entitas menyesuaikan rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai (yaitu menyeimbangkan kembali lindung nilai) sehingga memenuhi kriteria kualifikasi lagi.

Entitas hanya menetapkan nilai intrinsik kontrak opsi sebagai item lindung nilai. Perubahan nilai wajar dari nilai waktu selaras dari opsi diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam biaya penyisihan lindung nilai. Jika item yang dilindungi nilainya terkait dengan transaksi, nilai waktunya direklasifikasi ke laba rugi ketika item yang dilindungi nilainya mempengaruhi laba rugi. Jika item yang dilindungi nilai terkait dengan periode waktu, maka jumlah yang terakumulasi dalam biaya penyisihan lindung nilai direklasifikasi ke laba rugi secara basis rasional – Entitas menerapkan amortisasi garis lurus. Jumlah yang direklasifikasi tersebut diakui dalam laporan laba rugi pada baris yang sama dengan item yang dilindungi nilai. Jika item yang dilindungi nilai adalah item non-keuangan, maka jumlah yang terakumulasi dalam biaya penyisihan lindung nilai dihapus langsung dari ekuitas dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatat awal item non-keuangan yang diakui. Selanjutnya, jika Entitas mengharapkan sebagian atau seluruh kerugian yang terakumulasi dalam biaya penyisihan lindung nilai tidak akan dipulihkan di masa depan, jumlah tersebut segera direklasifikasi ke laba rugi.

Lindung Nilai - Nilai Wajar

Perubahan nilai wajar atas instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat diakui dalam laporan laba rugi kecuali jika instrumen lindung nilai tersebut melakukan lindung nilai atas instrumen ekuitas yang ditetapkan pada FVOCI dalam hal ini diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Financial Instruments - Continued

(4) Hedge Accounting - Continued

If a hedging relationship ceases to meet the hedge effectiveness requirement relating to the hedge ratio but the risk management objective for that designated hedging relationship remains the same, the Entity adjusts the hedge ratio of the hedging relationship (i.e. rebalances the hedge) so that it meets the qualifying criteria again.

The Entity designates only the intrinsic value of option contracts as a hedged item. The changes in the fair value of the aligned time value of the option are recognized in other comprehensive income and accumulated in the cost of hedging reserve. If the hedged item is transaction-related, the time value is reclassified to profit or loss when the hedged item affects profit or loss. If the hedged item is time-period related, then the amount accumulated in the cost of hedging reserve is reclassified to profit or loss on a rational basis – the Entity applies straight-line amortization. Those reclassified amounts are recognized in profit or loss in the same line as the hedged item. If the hedged item is a non-financial item, then the amount accumulated in the cost of hedging reserve is removed directly from equity and included in the initial carrying amount of the recognized non-financial item. Furthermore, if the Entity expects that some or all of the loss accumulated in cost of hedging reserve will not be recovered in the future, that amount is immediately reclassified to profit or loss.

Fair Value Hedges

The fair value change on qualifying hedging instruments is recognized in profit or loss except when the hedging instrument hedges an equity instrument designated at FVOCI in which case it is recognized in other comprehensive income.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(4) Akuntansi Lindung Nilai - Lanjutan

Lindung Nilai - Nilai Wajar - Lanjutan

Nilai tercatat item yang dilindungi nilai yang belum diukur pada nilai wajar disesuaikan dengan perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko lindung nilai dengan entri yang sesuai dalam laba rugi. Untuk instrumen utang yang diukur pada FVOCI, nilai tercatatnya tidak disesuaikan karena telah diukur pada nilai wajarnya, tetapi keuntungan atau kerugian lindung nilai diakui dalam laba rugi, bukan penghasilan komprehensif lain. Jika item lindung nilai merupakan instrumen ekuitas yang ditetapkan pada FVOCI, keuntungan atau kerugian lindung nilai tetap berada dalam penghasilan komprehensif lain agar sesuai dengan instrumen lindung nilai.

Entitas menghentikan akuntansi lindung nilai hanya jika hubungan lindung nilai (atau bagian darinya) tidak lagi memenuhi kriteria kualifikasi (setelah penyeimbangan kembali, jika berlaku). Ini termasuk contoh ketika instrumen lindung nilai kedaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan. Penghentian diperhitungkan secara prospektif. Penyesuaian nilai wajar atas nilai tercatat item yang dilindungi nilai yang timbul dari risiko lindung nilai diamortisasi ke laba rugi sejak tanggal tersebut.

Lindung Nilai - Arus Kas

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif dan instrumen lindung nilai lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dan memenuhi syarat sebagai lindung nilai arus kas, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam akun penyisihan lindung nilai arus kas, terbatas pada perubahan kumulatif nilai wajar dari item yang dilindungi nilai sejak dimulainya lindung nilai. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif segera diakui dalam laba rugi, dan dimasukkan dalam baris "Keuntungan dan Kerugian Lainnya".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Financial Instruments - Continued

(4) Hedge Accounting - Continued

Fair Value Hedges - Continued

The carrying amount of a hedged item not already measured at fair value is adjusted for the fair value change attributable to the hedged risk with a corresponding entry in profit or loss. For debt instruments measured at FVOCI, the carrying amount is not adjusted as it is already at fair value, but the hedging gain or loss is recognized in profit or loss instead of other comprehensive income. When the hedged item is an equity instrument designated at FVOCI, the hedging gain or loss remains in other comprehensive income to match that of the hedging instrument.

The Entity discontinues hedge accounting only when the hedging relationship (or a part thereof) ceases to meet the qualifying criteria (after rebalancing, if applicable). This includes instances when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised. The discontinuation is accounted for prospectively. The fair value adjustment to the carrying amount of the hedged item arising from the hedged risk is amortized to profit or loss from that date.

Cash Flow Hedges

The effective portion of changes in the fair value of derivatives and other qualifying hedging instruments that are designated and qualify as cash flow hedges is recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of cash flow hedging reserve, limited to the cumulative change in fair value of the hedged item from inception of the hedge. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss, and is included in the "Other Gains and Losses" line item.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(4) Akuntansi Lindung Nilai - Lanjutan

Lindung Nilai - Arus Kas - Lanjutan

Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada periode ketika item yang dilindungi nilai mempengaruhi laba rugi, di baris yang sama dengan item yang dilindungi nilai yang diakui. Namun, ketika prakiraan transaksi lindung nilai menghasilkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas dikeluarkan dari ekuitas dan dimasukkan dalam pengukuran awal biaya aset non-keuangan atau kewajiban non-keuangan. Transfer ini tidak mempengaruhi penghasilan komprehensif lain. Lebih lanjut, jika Entitas memperkirakan bahwa sebagian atau seluruh kerugian yang diakumulasi dalam penghasilan komprehensif lain tidak akan dipulihkan di masa depan, jumlah tersebut segera direklasifikasi ke laba rugi.

Entitas menghentikan akuntansi lindung nilai hanya jika hubungan lindung nilai (atau bagian darinya) tidak lagi memenuhi kriteria kualifikasi (setelah penyeimbangan kembali, jika berlaku). Ini termasuk contoh ketika instrumen lindung nilai kedaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan. Penghentian diperhitungkan secara prospektif. Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas pada saat itu tetap berada dalam ekuitas dan diakui pada saat prakiraan transaksi akhirnya diakui dalam laba rugi. Ketika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan terjadi, keuntungan atau kerugian yang diakumulasi dalam ekuitas segera diakui dalam laba rugi.

Lindung Nilai Investasi Bersih dalam Operasi Asing

Lindung nilai atas investasi bersih dalam operasi asing dicatat serupa dengan lindung nilai arus kas. Keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai yang terkait dengan bagian efektif dari lindung nilai diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam akun penyesuaian penjabaran mata uang asing. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif segera diakui dalam laba rugi, dan dimasukkan dalam baris "Keuntungan dan Kerugian Lainnya".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Financial Instruments - Continued

(4) Hedge Accounting - Continued

Cash Flow Hedges - Continued

Amounts previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified to profit or loss in the periods when the hedged item affects profit or loss, in the same line as the recognized hedged item. However, when the hedged forecast transaction results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, the gains and losses previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are removed from equity and included in the initial measurement of the cost of the non-financial asset or non-financial liability. This transfer does not affect other comprehensive income. Furthermore, if the Entity expects that some or all of the loss accumulated in other comprehensive income will not be recovered in the future, that amount is immediately reclassified to profit or loss.

The Entity discontinues hedge accounting only when the hedging relationship (or a part thereof) ceases to meet the qualifying criteria (after rebalancing, if applicable). This includes instances when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised. The discontinuation is accounted for prospectively. Any gain or loss recognized in other comprehensive income and accumulated in equity at that time remains in equity and is recognized when the forecast transaction is ultimately recognized in profit or loss. When a forecast transaction is no longer expected to occur, the gain or loss accumulated in equity is recognized immediately in profit or loss.

Hedges of Net Investments in Foreign Operations

Hedges of net investments in foreign operations are accounted for similarly to cash flow hedges. Any gain or loss on the hedging instrument relating to the effective portion of the hedge is recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of foreign currency translation reserve. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss, and is included in the "Other Gains and Losses" line item.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

(4) Akuntansi Lindung Nilai- Lanjutan

Lindung Nilai Investasi Bersih dalam Operasi Asing - Lanjutan

Keuntungan dan kerugian dari instrumen lindung nilai terkait dengan bagian efektif dari lindung nilai yang diakumulasi dalam penyisihan penjabaran mata uang asing direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan atau pelepasan sebagian operasi luar negeri.

(5) Pengaturan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah bersih disajikan di laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Entitas memiliki hak yang dapat diberlakukan secara hukum untuk menghapus jumlah yang diakui; dan bermaksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak untuk kompensasi harus tersedia saat ini daripada bergantung pada peristiwa di masa depan dan harus dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak lawan, baik dalam kegiatan bisnis normal dan dalam hal terjadi gagal bayar (*default*), keadaan tidak dapat membayar (*insolvency*) atau kebangkrutan.

(6) Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Untuk aset keuangan, diperlukan reklasifikasi antara FVTPL, FVOCI dan biaya perolehan diamortisasi, jika dan hanya jika tujuan model bisnis entitas untuk aset keuangannya berubah sehingga penilaian model sebelumnya tidak berlaku lagi.

Jika reklasifikasi sudah sesuai, maka harus dilakukan secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi yang ditetapkan sebagai hari pertama periode pelaporan pertama setelah perubahan model bisnis. Entitas tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian, atau bunga yang diakui sebelumnya.

PSAK 71 tidak mengizinkan reklasifikasi:

- untuk investasi ekuitas yang diukur pada FVOCI, atau
- di mana opsi nilai wajar telah dilaksanakan dalam kondisi apapun untuk aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan tidak dapat direklasifikasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Financial Instruments - Continued

(4) Hedge Accounting - Continued

Hedges of Net Investments in Foreign Operations - Continued

Gains and losses on the hedging instrument relating to the effective portion of the hedge accumulated in the foreign currency translation reserve are reclassified to profit or loss on the disposal or partial disposal of the foreign operation.

(5) Offsetting Arrangements

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when, and only when, the Entity has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

(6) Reclassification of Financial Instruments

For financial assets, reclassification is required between FVTPL, FVOCI and amortized cost, if and only if the entity's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If reclassification is appropriate, it must be done prospectively from the reclassification date which is defined as the first day of the first reporting period following the change in business model. The Entity does not restate any previously recognized gains, losses, or interest.

PSAK 71 does not allow reclassification:

- for equity investments measured at FVOCI, or
- where the fair value option has been exercised in any circumstance for a financial assets or financial liability.

The financial liability shall not be reclassified.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

f. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang entitas yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, dimana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

g. Aset Tetap

Entitas menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011) "Aset Tetap", termasuk PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015) "Aset Tetap" dan Amandemen 2015 PSAK No. 16 "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi". Selain itu, Entitas juga menerapkan ISAK No. 25 (2011) "Hak Atas Tanah".

PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

Amandemen 2015 PSAK No. 16 memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset dan juga memberikan klarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

Entitas telah memilih model biaya (*cost model*) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, kecuali tanah, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama umur manfaat aset.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and Cash Equivalent are cash on hand, cash in banks (demand deposits), and time deposits with maturity periods of 3 months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

f. Gross Amount Due from Customers

Gross amount due from customers represents the entity receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the statement of financial position date.

g. Property, Plant and Equipment

The Entity adopted PSAK No. 16 (Revised 2011) "Property, Plant and Equipment", including PSAK No. 16 (Improvement 2015) "Property, Plant and Equipment" and Amendment 2015 to PSAK No. 16 "Property, Plant and Equipment on Clarification Method Received for Depreciation and Amortization". Besides, the Entity also adopted ISAK No. 25 (2011) "Land Rights".

This PSAK No. 16 (Improvement 2015) provides clarification of paragraph 35 related to the revaluation model, that when an entity uses the revaluation model, the carrying amount of the asset is restated on its revaluation amount.

This Amendment 2015 to PSAK No. 16 provides an additional explanation of the approximate indication of technical or commercial obsolescence of an asset and also clarifies that the use of the depreciation method based on income is not appropriate.

The Entity has chosen the cost model for measurement of their property, plant and equipment.

Property, plant and equipment are stated at cost, except land, less accumulated depreciation and impairment losses. Depreciation is computed using the straight-line method over the useful life of the assets.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

g. Aset Tetap – Lanjutan

g. Property, Plant and Equipment - Continued

Taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

Estimated useful lives as follows:

	<u>% per tahun</u>	<u>Tahun</u>	
Kendaraan alat berat	12,5	8	<i>Heavy equipment vehicles</i>
Perabot dan peralatan kantor	25	4	<i>Furnitures and office equipments</i>
Kendaraan	25 – 12,5	4 - 8	<i>Vehicle</i>

Berdasarkan ISAK No. 25, biaya yang berhubungan dengan perpanjangan hak-hak kepemilikan tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah atau umur ekonomis tanah (jika dapat ditentukan), mana yang lebih pendek. Beban-beban ini disajikan sebagai bagian dari "Beban Ditangguhkan" dalam kelompok aset takberwujud pada laporan posisi keuangan.

Under ISAK No. 25, the costs associated with the extension of land rights are deferred and amortized over the life of legal rights to land or economic life of the land (if it can be determined), which is shorter. Such burdens are presented as part of "Deferred Charges" as intangible assets component in the statement of financial position.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya; Biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya, dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of repairs and maintenance is charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred; replacement or inspection costs are capitalized when incurred, and if it is probable future economic benefits associated with the item will flow to the entity, and the cost of the asset can be measured reliably.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying amount of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

h. Sewa

h. Lease

Sejak 1 Januari 2020, Entitas menerapkan PSAK No. 73 "Sewa" yang menggantikan PSAK No. 30 "Sewa" dan interpretasinya ISAK No. 8 "Menentukan apakah suatu Perjanjian mengandung Sewa", ISAK No. 23 "Sewa Operasi - Insentif", ISAK No. 24 "Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Bentuk Hukum Sewa" dan ISAK No. 25 "Hak Atas Tanah".

Since January 1, 2020, the Entity adopts PSAK No. 73 "Leases" which replaces PSAK No. 30 "Leases" and its interpretation under ISAK No. 8 "Determining whether an Arrangement contains a Lease", ISAK No. 23 "Operating Lease – Incentives", ISAK No. 24 "Evaluation of Substance of Several Transactions Involving an Legal Form of Lease" and ISAK No. 25 "Landrights".

Entitas sebagai Penyewa

Entity as a Lessee

Pada insepisi kontrak, Entitas menilai apakah kontrak adalah, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak adalah atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

At the inception oa contract, the Entity assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

h. Sewa - Lanjutan

Entitas sebagai Penyewa - Lanjutan

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang identifikasian, Entitas harus menilai apakah:

- Entitas memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan; dan
- Entitas memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Entitas memiliki hak ini ketika Entitas memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah cara dan tujuan penggunaan aset telah ditentukan sebelumnya:
 1. Entitas memiliki hak untuk mengoperasikan aset identifikasian;
 2. Entitas telah mendesain aset identifikasian dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset itu akan digunakan.

Pada insepisi atau penilaian kembali kontrak yang berisi komponen sewa, Entitas mengalokasikan imbalan dalam kontrak untuk setiap komponen sewa atas dasar harga tersendiri relative dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Akan tetapi, untuk sewa perbaikan di mana Entitas adalah penyewa, Entitas telah memilih untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa sebagai komponen sewa tunggal

Pada saat permulaan sewa, penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada harga perolehan, yang terdiri dari jumlah awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah biaya langsung awal yang timbul dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, Entitas mengukur aset hak-guna dengan menggunakan model biaya yang berkaitan aset tetap sesuai PSAK No. 16.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

h. Lease - Continued

Entity as a Lessee - Continued

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Entity shall assesses whether:

- The Entity has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Entity has the right to direct the use of the asset. The Entity has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how asset and for what purpose the is used are predetermined:
 1. The Entity has the right to operate the asset;
 2. The Entity has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Entity allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components. However, for the leases of improvements in which the Entity is a lessee, the Entity has elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

Upon lease commencement a lessee recognizes a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

After lease commencement, The Entity measures the right-of-use asset using a cost model that relates to Property, Plant and Equipment" under PSAK No. 16.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

h. Sewa - Lanjutan

Entitas sebagai Penyewa - Lanjutan

Berdasarkan model biaya, aset hak-guna diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Entitas pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna mencerminkan bahwa penyewa akan mengeksekusi opsi beli, Entitas mendepresiasi hak-guna sejak tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, Entitas mendepresiasi aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang terutang selama masa sewa, didiskontokan pada suku bunga implisit dalam sewa jika hal itu dapat segera ditentukan. Jika suku bunga implisit tersebut tidak dapat segera ditentukan, Entitas menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh Entitas dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli yang cukup pasti Entitas akan mengeksekusi; dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa lebih awal kecuali Entitas cukup pasti untuk tidak menghentikan kontrak lebih awal.

Pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran, kecuali biaya tersebut dimasukkan dalam nilai tercatat aset lain menurut Pernyataan lain.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur kembali untuk mencerminkan perubahan dalam:

- masa sewa (menggunakan tingkat diskonto yang direvisi);
- penilaian opsi beli (menggunakan tingkat diskonto yang direvisi);
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan dalam jaminan nilai residual (menggunakan tingkat diskonto yang tidak berubah); atau
- pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut (menggunakan tingkat diskonto yang tidak berubah).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

h. Lease - Continued

Entity as a Lessee - Continued

Under the cost model, a right-of-use asset is measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment. If the lease transfers ownership of the underlying assets to the Entity at the end of the lease period or if the acquisition cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will make a purchase option, the Entity depreciates the right-of-use asset from the commencement date until the end of the useful life of the asset underlying assets.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments payable over the lease term, discounted at the rate implicit in the lease if that can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the Entity uses its incremental borrowing rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable by the Entity under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the Entity is reasonably certain to exercise; and*
- *penalties payment for early termination of a lease unless the Entity is reasonably certain not to terminate early.*

Variable lease payments that are not included in the measurement of the lease liability are recognized in profit or loss in the period in which the event or condition that triggers payment occurs, unless the costs are included in the carrying amount of another asset under another Standard.

The lease liability is subsequently remeasured to reflect changes in:

- *the lease term (using a revised discount rate);*
- *the assessment of a purchase option (using a revised discount rate);*
- *the amounts expected to be payable under residual value guarantees (using an unchanged discount rate); or*
- *future lease payments resulting from a change in an index or a rate used to determine those payments (using an unchanged discount rate).*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

h. Sewa - Lanjutan

Entitas sebagai Penyewa - Lanjutan

Sewa jangka pendek dan aset pendasar bernilai rendah

Entitas telah memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang. Entitas mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Entitas belum menentukan ambang batas aset bernilai rendah, oleh karena itu Entitas tidak menggunakan pengecualian ini dan menerapkan PSAK No. 73 sebagaimana mestinya.

Modifikasi sewa

Modifikasi sewa juga dapat meminta pengukuran kembali liabilitas sewa kecuali jika diperlakukan sebagai sewa terpisah.

Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika keduanya:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu atau lebih aset pendasar; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat terhadap harga tersendiri tersebut untuk mencerminkan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan dalam kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa yang direvisi menggunakan tingkat diskonto revisian atas dasar sisa masa sewa dan sisa pembayaran sewa dengan penyesuaian yang sesuai dengan aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan nilai tercatat aset hak-guna untuk mencerminkan penghentian parsial atau penuh dari sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk semua modifikasi sewa lainnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

h. Lease - Continued

Entity as a Lessee - Continued

Short-term leases and low value underlying assets

The Entity has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Entity recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

The Entity has not determined the threshold of low value assets, accordingly the Entity does not use this exemption and applies PSAK No. 73 as appropriate.

Lease modification

Lease modifications may also prompt remeasurement of the lease liability unless they are to be treated as separate leases.

The lessee accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the lessee:

- remeasure and allocate the consideration in the modified contract;
- determine the lease term of the modified lease;
- remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the lessee's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;
- decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee recognizes in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

h. Sewa - Lanjutan

Entitas sebagai Pesewa

Ketika Entitas bertindak sebagai pesewa, maka setiap sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika tidak, sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai bagian dari penilaian ini, Entitas mempertimbangkan indikator-indikator tertentu seperti:

- a. sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa;
- b. penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pendasar dengan harga yang diperkirakan cukup lebih rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi tersebut dapat dieksekusi sehingga menjadi cukup pasti, pada tanggal insepasi, bahwa opsi tersebut akan dieksekusi;
- c. masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset pendasar, meskipun hak milik tidak dialihkan;
- d. pada tanggal insepasi, nilai kini dari pembayaran sewa setidaknya mencakup secara substansial seluruh nilai wajar aset pendasar;
- e. aset pendasar bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi signifikan.

Pada permulaan sewa, Entitas mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa.

Investasi neto sewa adalah investasi sewa bruto yang didiskontokan pada tingkat bunga implisit dalam sewa. Investasi bruto dalam sewa adalah jumlah dari:

1. piutang pembayaran sewa oleh Entitas dalam sewa pembiayaan, dan
2. nilai residual yang tidak dijamin yang diperoleh Entitas. Nilai residual yang tidak dijamin adalah bagian dari nilai residual aset pendasar, yang realisasinya oleh Entitas tidak diyakini atau dijamin hanya oleh satu pihak yang terkait dengan Entitas.

Entitas mengakui pendapatan keuangan selama masa sewa dari sewa pembiayaan, berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian investasi neto periodik yang konstan. Hal ini dicapai dengan mengalokasikan sewa yang diterima (setelah dikurangi biaya jasa, dll.) oleh Entitas antara pendapatan keuangan (bunga) kepada Entitas dan pembayaran kembali saldo debitur (pokok), yaitu metode biaya perolehan diamortisasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

h. Lease - Continued

Entity as a Lessor

When the Entity acts as a lessor, it shall classify each lease as either an operating lease or a finance lease.

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an underlying asset. Otherwise a lease is classified as an operating lease.

As part of this assessment, the Entity considers certain indicators such as :

- a. the lease transfers ownership of the asset to the lessee by the end of the lease term;
- b. the lessee has the option to purchase the asset at a price which is expected to be sufficiently lower than fair value at the date the option becomes exercisable that, at the inception of the lease, it is reasonably certain that the option will be exercised
- c. the lease term is for the major part of the economic life of the asset, even if title is not transferred;
- d. at the inception of the lease, the present value of the minimum lease payments amounts to at least substantially all of the fair value of the leased asset;
- e. the leased assets are of a specialized nature such that only the lessee can use them without major modifications being made.

Upon lease commencement, The Entity recognizes assets held under a finance lease as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease.

The net investment in the lease is the gross investment in the lease discounted at the interest rate implicit in the lease. The gross investment in the lease is the sum of:

1. lease payments receivable by the Entity under a finance lease, and
2. any unguaranteed residual value accruing to the Entity. The unguaranteed residual value is the portion of the residual value of the underlying asset, the realization of which by the Entity is not assured or is guaranteed solely by a party related to the Entity.

The Entity recognizes finance income over the lease term of a finance lease, based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the net investment. This is achieved by allocating the lease received (net of any charges for services etc.) by the Entity between finance (interest) income to the Entity and repayment of the debtor balance (principal), that is amortized cost method.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

h. Sewa - Lanjutan

Entitas sebagai Pesewa - Lanjutan

Entitas mengakui pembayaran sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus atau, jika lebih merepresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun, maka dengan dasar sistematis lain.

Transaksi Jual dan Sewa-Balik

Untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan, Entitas menerapkan ketentuan PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" untuk menentukan kapan kewajiban pelaksanaan terpenuhi.

Jika pengalihan aset memenuhi persyaratan PSAK No. 72 untuk dicatat sebagai penjualan, penjual mengukur aset hak-guna sesuai proporsi jumlah tercatat sebelumnya yang terkait dengan hak-guna yang masih dipertahankan. Oleh karena itu, penjual hanya mengakui keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak yang dialihkan kepada pembeli.

Jika nilai wajar imbalan penjualan tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran sewa tidak pada harga pasar, hasil penjualan disesuaikan ke nilai wajar, baik dengan memperhitungkan pembayaran di muka atas pembayaran sewa jika berada di bawah harga pasar atau pembiayaan tambahan yang diberikan oleh pembeli kepada Entitas jika berada di atas harga pasar.

Entitas tidak melakukan transaksi penjualan dan sewa-balik selama tahun berjalan.

Subsewa

Berdasarkan PSAK 73, Entitas sebagai pesewa-antara memperhitungkan sewa utama dan subsewa sebagai dua kontrak terpisah. Entitas disyaratkan untuk mengklasifikasikan subsewa sebagai sewa pembiayaan atau operasi dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa utama. Jika sewa utama adalah sewa jangka pendek yang diperhitungkan dengan menerapkan tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa, maka subsewa tersebut harus diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Ketika Entitas melakukan sewa pembiayaan, Entitas:

- menghentikan pengakuan aset hak-guna terkait dengan sewa utama yang dialihkan ke subpenyewa dan mengakui investasi neto sewa;
- mengakui perbedaan antara aset hak-guna dan investasi neto dalam subsewa dalam laba atau rugi; dan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

h. Lease - Continued

Entity as a Lessor - Continued

The Entity recognizes operating lease payments as income on a straight-line basis or, if more representative of the pattern in which benefit from use of the underlying asset is diminished, another systematic basis.

Sale and Leaseback Transactions

To determine whether the transfer of an asset is accounted for as a sale the Entity applies the requirements of PSAK No. 72 "Revenue from Contracts with Customers" for determining when a performance obligation is satisfied.

If an asset transfer satisfies the requirements of PSAK No. 72 to be accounted for as a sale the seller measures the right-of-use asset at the proportion of the previous carrying amount that relates to the right of use retained. Accordingly, the seller only recognizes the amount of gain or loss that relates to the rights transferred to the buyer.

If the fair value of the sale consideration does not equal the asset's fair value, or if the lease payments are not market rates, the sales proceeds are adjusted to fair value, either by accounting for prepayments of lease payments if any below-market term or additional financing provided by the buyer to the Entity if any above-market term.

The Entity has not entered into sale and leaseback transactions during the year.

Subleases

Under PSAK 73, the Entity as an intermediate lessor accounts for the head lease and the sublease as two separate contracts. The Entity is required to classify the sublease as a finance or operating lease by reference to the right-of-use asset arising from the head lease. If the head lease is a short term lease has accounted applying not to recognize right-of-use asset and lease liability, the sublease should be classified as an operating lease.

When the Entity enters into the finance sublease, the Entity:

- derecognizes the right-of-use asset relating to the head lease that it transfers to the sublessee and recognizes the net investment in the sublease;
- recognizes any difference between the right-of-use asset and the net investment in the sublease in profit or loss; and

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

h. Sewa - Lanjutan

Subsewa - Lanjutan

- mempertahankan liabilitas sewa terkait dengan sewa utama dalam laporan posisi keuangannya, yang merupakan pembayaran sewa yang terutang kepada pesewa utama.

Selama masa sewa, Entitas mengakui pendapatan keuangan dari subsewa dan beban bunga dari sewa utama.

Ketika Entitas melakukan subsewa operasi, Entitas tetap memiliki liabilitas sewa dan aset hak-guna yang terkait dengan sewa utama di laporan posisi keuangannya. Selama masa sewa, Entitas mengakui biaya penyusutan atas aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dan mengakui pendapatan sewa dari subsewa.

i. Properti Investasi

Entitas menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2011) "Properti Investasi" dan PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015) "Properti Investasi".

PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi bahwa PSAK No. 13 dan PSAK No. 22 saling mempengaruhi. Entitas dapat mengacu pada PSAK No. 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Entitas juga dapat mengacu pada PSAK No. 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis".

Properti investasi terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana, yang dikuasai untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Entitas telah memilih model biaya (*cost model*) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran properti investasi.

Penyusutan bangunan dan prasarana dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama umur manfaat aset antara 10 dan 20 tahun.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

h. Lease - Continued

Subleases - Continued

- retains the lease liability relating to the head lease in its statement of financial position, which represents the lease payments owed to the head lessor.

During the term of the sublease, the Entity recognizes both finance income on the sublease and interest expense on the head lease.

When the Entity enters into the operating sublease, the Entity retains the lease liability and the right-of-use asset relating to the head lease in its statement of financial position. During the term of the sublease, the Entity recognizes a depreciation charge for the right-of-use asset and interest on the lease liability and recognizes lease income from the sublease.

i. Investment Property

The Entity adopted PSAK No. 13 (Revised 2011) "Investment Property" and PSAK No. 13 (Improvement 2015) "Investment Property".

This PSAK No. 13 (Improvement 2015) clarifies that PSAK No. 13 and PSAK No. 22 are interaction. The entity can refer to PSAK No. 13 to distinguish between investment property and owner-occupied property. The entity may also refer to PSAK No. 22 as a guide whether the acquisition of an investment property is a business combination.

Investment properties consist of land and buildings and improvements, which held to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business activities.

The Entity has chosen the cost model as the accounting policy of measurement of investment property.

Depreciation of buildings and improvements is computed using the straight-line method over the asset's useful life between 10 and 20 years.

Investment property is derecognised upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gain or loss arising from the retirement or disposal of an investment property is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year of retirement or disposal.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

i. Properti Investasi - Lanjutan

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan yang di masa depan akan digunakan sebagai properti investasi.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan jasa konstruksi diakui berdasarkan metode presentase penyelesaian pekerjaan. Presentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan kemajuan fisik proyek yang dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Opname Proyek (BAOP) yang ditandatangani kedua belah pihak. Terhadap pendapatan usaha konstruksi yang belum diterbitkan fakturnya diakui sebagai tagihan bruto pemberi kerja. Sedangkan yang telah diterbitkan fakturnya diakui sebagai piutang usaha.

Entitas mengakui pendapatan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 72, Entitas mengakui pendapatan pada saat dan sejauh pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan akan mencerminkan jumlah yang diharapkan akan diterima Entitas dalam pertukaran untuk barang atau jasa tersebut. Dalam menerapkan Standar ini, Entitas mempertimbangkan syarat-syarat kontrak dan semua fakta dan keadaan yang relevan. Pendapatan diakui menggunakan penilaian 5 langkah:

1. Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan

Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

i. Investment Property - Continued

Transfer to investment properties if, and only if, there is a change in use, evidenced by the end of the use by the owner, commencement of an operating lease to another party or completion of construction or development. Transfer from investment properties if, and only if, there is a change in use, evidenced by commencement of owner occupation or commencement of development for sale.

Investment property includes properties in the process of development in the future will be used as an investment property.

j. Revenue and Expense Recognition

Construction business income is recognize on percentage of completion method. Percentage of completion of construction set based on the physical progress of the project that expressed in the Minutes of Project Observation (BAOP) signed by both parties. Construction of the revenues that have not been publish recognized as gross which invoice that has been issued is recognized as trade receivables. Whereas the invoice issued recognized as trade receivable.

the Entity recognizes revenue in accordance with the provisions of PSAK No. 72, the Entity recognizes revenue at the time and to the extent that the transfer of goods or services to customers would reflect an amount that the Entity expects to receive in exchange for those goods or services. In applying this Standard, the Entity takes into account the terms of the contract and all relevant facts and circumstances. Revenue is recognized using the 5-step assessment:

1. Identification of the Contract with the Customer

Contract is an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban - Lanjutan

2. Identifikasi Kewajiban Pelaksanan dalam Kontrak

Kewajiban pelaksanaan adalah janji kepada pelanggan untuk mengalihkan barang atau jasa (atau sekumpulan barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan; atau serangkaian barang atau jasa bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Bersifat dapat dibedakan artinya dapat dipisahkan, atau dapat diidentifikasi secara terpisah

3. Penetapan Harga Transaksi

Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak Entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (misalnya, pajak pertambahan nilai). Jika imbalan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Entitas mengestimasi jumlah imbalan yang diharapkan menjadi haknya dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi estimasi jumlah variabel yang akan dibayar selama kontrak.

4. Alokasi Harga Transaksi untuk Kewajiban Pelaksanaan

Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relative perlu diestimasi.

5. Pengakuan Pendapatan ketika Kewajiban Pelaksanaan Dipenuhi

Pendapatan dari penjualan diakui sebagai representasi penyerahan barang atau jasa dengan jumlah yang secara tepat mewakili kewajiban yang dilakukan dan hak untuk menerima imbalan sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa tersebut. Pengakuan pendapatan tergantung pada apakah pengalihan diselesaikan sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Pengalihan kendali diperhitungkan.

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, pendapatan diakui dengan mengukur kemajuan penyelesaian kewajiban pelaksanaan tersebut berdasarkan pengukuran kemajuan yang tepat baik "Metode Keluaran" atau "Metode Masukan".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

j. Revenue and Expense Recognition - Continued

2. Identification of the Performance Obligation in the Contract

A performance obligation is a promise to a customer to transfer good or service (or a bundle of goods or services) that is distinct; or a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the customer. Distinct means separable, or separately identifiable.

3. Determination of the Transaction Price

The transaction price is the amount of consideration that the Entity expects to be entitled to in exchange for the goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties (for example, value added tax). If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Entity estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated variable amount which will be paid during the contract period.

4. Allocation Transaction Price to Performance Obligations

Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price is required to be estimated.

5. Recognition of Revenue when Performance Obligation is Satisfied

Revenue from sales is recognized as a representation of the delivery of goods or the rendering of services at the amount that correctly represents the performed obligation and the right to receive consideration in exchange for the goods and/or services. Revenue recognition depends on whether the transfer is being settled over time or at a certain point in time. In any case, the transfer of control is taken into account.

For each performance obligation that is satisfied over time, revenue is recognized by measuring progress towards completion of that performance obligation based on appropriate measurement of progress either "Output Method" or "Input Method"

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban - Lanjutan

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu titik waktu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi dari waktu ke waktu:

- pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh kinerja Entitas sebagaimana yang dilakukan Entitas;
- Kinerja Entitas menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Kinerja Entitas tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Entitas dan Entitas memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk kinerja yang diselesaikan hingga saat ini.

Kriteria berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan Konstruksi dan Beban Konstruksi

Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sepanjang waktu yang dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada keadaan fisik kemajuan pekerjaan.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

j. Revenue and Expense Recognition - Continued

A performance obligation may be satisfied at the following:

- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.*

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- *the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Entity's performance as the Entity performs;*
- *the Entity's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and,*
- *the Entity's performance does not create an asset with an alternative use to the Entity and the Entity has an enforceable right to payment for performance completed to date.*

The following recognition criteria must also be met before revenue is recognized.

Construction Revenues and Construction Costs

Revenues related to construction contracts are recognized over time which accounted for using the percentage of completion method. Under this method, the revenue recognized equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the physical state of progress of the works.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be reliably measured.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban - Lanjutan

Pendapatan Konstruksi dan Beban Konstruksi – Lanjutan.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan konsolidasian. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Beban langsung dan beban tidak langsung proyek yang dapat dialokasikan ke suatu proyek tertentu, diakui sebagai beban pada proyek yang bersangkutan, sedangkan beban yang tidak dapat didistribusikan atau tidak dapat dialokasikan ke aktivitas proyek menjadi beban non proyek (beban usaha).

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual, kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

j. Revenue and Expense Recognition - Continued

Construction Revenues and Construction Costs – Continued.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognized as a current provision in the consolidated financial statements. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

Contract costs that are not probable of being recovered are recognized as current year expenses in profit or loss.

Direct and indirect costs of projects which can be allocated to a particular project, are recognized as an expense on the related projects, while the expenses that cannot be distributed or cannot be allocated to the project activities are recognized as non-project expenses (operating expenses).

Expense Recognition

Expenses are recognized when incurred (accrual basis), unless they create an assets related to future contract activity.

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental on obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

k. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

l. Pajak Penghasilan

Entitas menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2013), "Pajak Penghasilan". Selain itu, Entitas juga menerapkan ISAK No. 20, "Pajak Penghasilan: Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham".

Pengakuan

Jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya, yang belum dibayar, diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terhutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aset.

Pengukuran

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

k. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Entity undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred

Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

l. Income Taxes

The Entity adopted PSAK No. 46 (Revised 2013) "Income Taxes". Besides, the Entity also adopted ISAK No. 20 "Income Taxes: Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders".

Recognition

Current tax for current and prior periods, to the extent unpaid, is recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess is recognized as an asset.

Measurement

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods is measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted for the reporting period.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

l. Pajak Penghasilan - Lanjutan

Alokasi

Untuk transaksi atau peristiwa lainnya yang diakui dalam laba rugi, setiap pengaruh pajak terkait juga diakui dalam laba rugi. Untuk transaksi atau peristiwa lainnya yang diakui diluar laba rugi (baik dalam OCI maupun langsung dalam ekuitas), setiap pengaruh pajak terkait juga diakui diluar laba rugi (baik dalam OCI maupun langsung dalam ekuitas, masing-masing). Demikian juga, pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam kombinasi bisnis mempengaruhi jumlah goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis tersebut atau keuntungan dari pembelian dengan diskon.

Saling Hapus

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika, dan hanya jika, memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait entitas kena pajak yang sama, atau entitas berniat untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak Final

Beban pajak final sehubungan dengan penghasilan yang menjadi subjek pajak final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode/tahun berjalan dan dicatat sebagai bagian dari beban operasi. Selisih antara jumlah pajak final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak final diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur dalam PSAK No. No. 46: Pajak Penghasilan.

m. Imbalan Kerja

Entitas menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2014) "Imbalan Kerja" dan Amandemen 2015 PSAK No. 24 "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja", termasuk Penyesuaian 2016 PSAK No. 24. Selain itu, Entitas juga mengadopsi ISAK No. 15 "PSAK No. 24: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

l. Income Taxes - Continued

Allocation

For transactions and other events recognized in profit or loss, any related tax effects are also recognized in profit or loss. For transactions and other events recognized outside profit or loss (either in OCI or directly in equity), any related tax effects are also recognized outside profit or loss (either in OCI or directly in equity, respectively). Similarly, the recognition of deferred tax assets and liabilities in a business combination affects the amount of goodwill arising in that business combination or the amount of the bargain purchase gain recognized.

Offset

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the entity intends to settle its current tax assets and liabilities on a net basis

Final Tax

Final tax expense related to income subject to final tax is recognized in proportion to total income recognized during the current period/year for accounting purposes and recorded as part of operating expenses. The differences between the final tax paid and the amount changed as final tax expense is recognized as prepaid tax or tax payable.

Final tax is scoped out from PSAK No. 46: Income Tax.

m. Employee Benefit

The Entity adopted PSAK No. 24 (Revised 2014) "Employee Benefits" and Amendment 2015 to PSAK No. 24 "Employee Benefits on a Defined Benefit Program: Workers Contribution", including Improvement 2016 to PSAK No. 24. Besides, the Entity also adopted ISAK No. 15 "PSAK No. 24: The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interactions".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

m. Imbalan Kerja - Lanjutan

PSAK ini memperkenalkan persyaratan untuk sepenuhnya mengakui perubahan dalam kewajiban (aset) imbalan pasti termasuk pengakuan segera dari biaya imbalan pasti termasuk biaya jasa lalu yang belum menjadi hak (vested), dan memerlukan pemilahan dari biaya imbalan pasti keseluruhan menjadi komponen-komponen dan membutuhkan pengakuan pengukuran kembali OCI (menghilangkan pendekatan "koridor"), meningkatkan pengungkapan tentang program imbalan pasti, modifikasi akuntansi untuk pesangon, termasuk membedakan antara imbalan yang diberikan dalam pemberian jasa dan imbalan yang diberikan dalam pemutusan hubungan kerja, dan mengubah pengakuan dan pengukuran imbalan pesangon.

Amandemen 2015 PSAK No. 24 menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.

Entitas mengadopsi program imbalan pasti yang tidak didanai dan mencatat imbalan kerja untuk memenuhi imbalan di bawah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Pengakuan

Beban imbalan kerja untuk pekerja harus diakui pada periode dimana imbalan diperoleh oleh pekerja, daripada ketika dibayar atau terutang.

Komponen biaya imbalan pasti diakui sebagai berikut:

1. biaya jasa diatribusikan ke periode sekarang dan masa lalu diakui dalam laporan laba rugi;
2. bunga neto pada liabilitas atau aset imbalan pasti ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto pada awal periode diakui dalam laporan laba rugi;
3. pengukuran kembali dari liabilitas atau aset imbalan pasti terdiri dari:
 - keuntungan dan kerugian aktuarial;
 - imbal balik aset program;
 - setiap perubahan dalam dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.diakui di OCI (tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

m. Employee Benefit - Continued

This PSAK introduces a requirement to fully recognize changes in the net defined benefit liability (asset) including immediate recognition of defined benefit costs including unvested past service cost, and require disaggregation of the overall defined benefit cost into components and requiring the recognition of remeasurements in OCI (eliminating the "corridor" approach), enhancing disclosures about defined benefit plans, modifications to the accounting for termination benefits, including distinguishing between benefits provided in exchange for service and benefits provided in exchange for the termination of employment, and changing the recognition and measurement of termination benefits.

Amendment 2015 to PSAK No. 24 simplifies accounting for dues contributions from employees or third parties that do not depend on the number of years of service, for example, worker contributions are calculated based on a fixed percentage of salary.

The Entity adopts an unfunded defined benefit plan and records employee benefits to cover adequately the benefits under the Law No. 13 year 2003.

Recognition

The cost of providing employee benefits should be recognized in the period in which the benefit is earned by the employee, rather than when it is paid or payable.

The components of defined benefit cost are recognized as follows:

1. service cost attributable to the current and past periods is recognized in profit or loss;
2. net interest on the net defined benefit liability or asset, determined using the discount rate at the beginning of the period is recognized in profit or loss;
3. remeasurements of the net defined benefit liability or asset, comprising
 - actuarial gains and losses;
 - return on plan assets;
 - Any changes in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset).

is recognized in OCI (not reclassified to profit or loss in a subsequent period).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

m. Imbalan Kerja - Lanjutan

Pengukuran

Pengukuran liabilitas (aset) imbalan pasti bersih mensyaratkan penerapan metode penilaian aktuarial, atribusi imbalan untuk periode jasa, dan penggunaan asumsi aktuarial. Nilai wajar aset program dikurangi dari nilai kini liabilitas imbalan pasti dalam menentukan defisit bersih atau surplus.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti entitas dan biaya jasa terkait ditentukan dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", yang menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan dari imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan liabilitas akhir. Hal ini mensyaratkan entitas untuk mengatribusikan imbalan pada periode kini (untuk menentukan biaya jasa kini) dan periode kini dan periode lalu (untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti). Imbalan tersebut diatribusikan sepanjang periode jasa menggunakan formula imbalan yang dimiliki program, kecuali jasa pekerja di tahun-tahun akhir akan meningkat secara material dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dalam hal ini menggunakan dasar metode garis lurus.

Biaya jasa lalu adalah perubahan liabilitas imbalan pasti atas jasa pekerja pada periode-periode lalu, yang timbul sebagai akibat dari perubahan pengaturan program dalam periode kini (yaitu memperkenalkan perubahan program atau mengubah imbalan yang akan dibayar, atau kurtailmen yang secara signifikan mengurangi jumlah pekerja yang disertakan).

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada awal tanggal ketika perubahan program atau kurtailmen terjadi dan tanggal ketika entitas mengakui setiap pesangon, atau biaya terkait restrukturisasi dalam PSAK No. 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi".

Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti diakui pada saat penyelesaian terjadi.

Sebelum biaya jasa lalu ditentukan, atau keuntungan atau kerugian pada penyelesaian diakui, liabilitas imbalan pasti atau aset disyaratkan untuk diukur kembali, namun entitas tidak disyaratkan untuk membedakan antara biaya jasa lalu yang dihasilkan dari kurtailmen dan keuntungan dan kerugian pada penyelesaian di mana transaksi ini terjadi bersama-sama

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

m. Employee Benefit - Continued

Measurement

The measurement of a net defined benefit liabilities or assets requires the application of an actuarial valuation method, the attribution of benefits to periods of service, and the use of actuarial assumptions. The fair value of any plan assets is deducted from the present value of the defined benefit liabilities in determining the net deficit or surplus.

The present value of an entity's defined benefit liabilities and related service costs is determined using the "Projected Unit Credit" method, which sees each period of service as giving rise to an additional unit of benefit entitlement and measures each unit separately in building up the final liabilities. This requires an entity to attribute benefit to the current period (to determine current service cost) and the current and prior periods (to determine the present value of defined benefit obligations). Benefit is attributed to periods of service using the plan's benefit formula, unless an employee's service in later years will lead to a materially higher of benefit than in earlier years, in which case a straight-line basis is used.

Past service cost is the change in a defined benefit liability for employee service in prior periods, arising as a result of changes to plan arrangements in the current period (i.e. plan amendments introducing or changing benefits payable, or curtailments which significantly reduce the number of covered employees).

Past service cost is recognized as an expense at the earlier of the date when a plan amendment or curtailment occurs and the date when an entity recognizes any termination benefits, or related restructuring costs under PSAK No. 57 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets".

Gains or losses on the settlement of a defined benefit plan are recognized when the settlement occurs.

Before past service costs are determined, or a gain or loss on settlement is recognized, the net defined benefit liability or asset is required to be remeasured, however an entity is not required to distinguish between past service costs resulting from curtailments and gains and losses on settlement where these transactions occur together.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

n. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah akhir periode laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi pada periode laporan keuangan Entitas (*adjusting events*) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode laporan keuangan yang bukan merupakan *adjusting events* telah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

o. Pelaporan Segmen

Entitas melaporkan informasi segmen yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

Sebuah segmen operasi adalah sebuah komponen dari entitas yang:

- a. terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Entitas melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam entitas.

Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

p. Laba Bersih per Saham Dasar dan Dilusi

Entitas menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2011), "Laba per Saham". PSAK ini menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham, sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas berbeda pada periode pelaporan sama dan antar periode pelaporan berbeda untuk entitas yang sama.

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama periode berjalan setelah dikurangi dengan saham yang diperoleh kembali.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

n. Events after the Reporting Period

Post period-end events that provide additional information about the position at the Entity's period financial statements (*adjusting events*) are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

o. Segment Reporting

The Entity discloses segment information that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and economic environments in which it operates.

An operating segment is a component of an entity:

- a. that engages in business activities which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
- b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c. for which discrete financial information is available.

Segment reporting made by the entity is based on the financial information used by operating decision makers in evaluating operating segment performance and determining the allocation of its resources. Segmentation based on the activity of each legal entity operating activities in the entity.

All transactions between segments are eliminated.

p. Earnings per Share and Dilution

The Entity adopted PSAK No. 56 (Revised 2011), "Earnings per Share". This PSAK establishes the principle of the determination and presentation of earnings per share, thus increasing the comparability of performance between different entities in the same reporting period and between different reporting periods for the same entity.

Earnings per share is calculated by dividing the profit attributable to owners of the entity by the weighted average number of shares outstanding during the period net of repurchased shares.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

p. Laba Bersih per Saham Dasar dan Dilusian - Lanjutan

Saham biasa dapat diterbitkan atau jumlah saham biasa dapat berkurang, tanpa disertai perubahan pada arus kas atau aset lain atau pada liabilitas. Perubahan tersebut dapat berbentuk dividen saham, saham bonus, pemecahan saham atau penggabungan saham. Untuk perhitungan laba per saham, perubahan tersebut dianggap seolah-olah sudah terjadi pada awal tahun laporan keuangan yang disajikan.

Dalam menghitung laba per saham dilusian, jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar harus disesuaikan dengan memperhitungkan dampak semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Tidak terdapat efek dilusi per 31 Desember 2020 dan 2019 karena tidak ada efek berpotensi saham biasa yang beredar.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen Entitas untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai pertimbangan, estimasi dan asumsi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan dibawah ini.

Entitas mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Entitas. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Entitas yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

p. Earnings per Share and Dilution - Continued

Common shares may be issued or the number of shares of common stock may be reduced, without accompanying changes in cash flows or other assets or liabilities. These changes may take the form of stock dividends, bonus shares, stock splits or stock merger. For the calculation of earnings per share, the change is considered as if it had occurred at the beginning of the financial statements presented.

In calculating diluted earnings per share, the weighted average number of common shares outstanding should be adjusted to take into account the effects of all dilutive potential common shares.

There is no dilution effect by December 31, 2020 and 2019 because there are no dilutive potential common shares outstanding.

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

Judgments, Estimates and Assumptions

The preparation of financial statements requires management of the Entity to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about the judgment, estimates and assumptions could result in material adjustments to the carrying value of assets and liabilities in future period.

The key assumptions of the future and the other key source of uncertainty in estimation at the reporting date that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the future period described below.

The Entity bases its estimates and assumptions on the parameters available at the time the financial statements are prepared. Assumptions and situation concerning the future development may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Entity. The changes are reflected in the related assumptions as incurred.

The following judgments, estimates and assumptions made by management in implementing accounting policies of the Entity have the most significant effect on the amount recognized in the financial statements:

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi - Lanjutan

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Entitas menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Entitas seperti diungkapkan pada catatan 3d dan catatan 27.

Menentukan Nilai Wajar dan Perhitungan Amortisasi Biaya Perolehan dari Instrumen Keuangan

Entitas mencatat aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Entitas menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Entitas.

Menentukan Jumlah Terpulihkan dari Aset Keuangan

Entitas mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Entitas menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu dan hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Entitas. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang.

Menentukan Jumlah Terpulihkan dari Aset Non-Keuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan.

Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING - Continued

Judgments, Estimates and Assumptions - Continued

Determining Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Entity determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK No. 71 are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Entity's accounting policies as disclosed in the note 3d and note 27.

Determining Fair Value and Calculation of Cost Amortization of Financial Instruments

The Entity records certain assets and financial liabilities at fair value and at amortized cost, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization is determined using verifiable objective evidence, the amount of the fair value or amortized cost may differ if the Entity uses different valuation methodologies or assumptions. These changes directly affect the Entity's profit or loss.

Determining Recoverable Amount of Financial Assets

The Entity evaluates specific accounts where it has information that a particular customer cannot meet its financial liabilities. In this case, the Entity uses judgment based on available facts and circumstances, including but not limited to, terms and relationships with customers and the credit status of customers based on available credit records from third parties and known market factors, to record specific allowance for the customer against the amount owed in order to reduce the amount of the receivables that the Entity expects to collect. Specific allowance is re-evaluated and adjusted if additional information received affects the amount of allowance for impairment of receivables.

Determining Recoverable Amount of Non-financial Assets

Provision for decline in market value and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the physical condition of inventory on hand, the selling price of the market, estimated costs of completion and the estimated costs incurred for the sale.

Provision re-evaluated and adjusted if additional information that affect the estimated amounts.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi - Lanjutan

Menentukan Jumlah Terpulihkan dari Aset Non-Keuangan - Lanjutan

Jumlah pemulihan atas aset tetap dan properti investasi didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan.

Menentukan Metode Penyusutan dan Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Entitas mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar.

Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Entitas terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset serta perkembangan teknologi.

Namun demikian, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 8 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Entitas menjalankan bisnisnya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam catatan 10 untuk aset tetap.

Menentukan Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Entitas mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING - Continued

Judgments, Estimates and Assumptions - Continued

Determining Recoverable Amount of Non-financial Assets - Continued

The recovery amounts of property, plant and equipment and investment properties are based on estimates and assumptions especially about market prospects and cash flows associated with the asset. Estimates of future cash flows include estimates of future revenues. Any changes in these assumptions may have a material impact on the measurement of recoverable amount and could result in adjustments to the allowance for impairment already booked.

Determining Depreciation Method and Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment

The Entity estimates the useful lives of property, plant and equipment based on the expected utilization of assets and supported by plans and business strategy and market behavior.

Estimation of useful lives of property, plant and equipment are provided based on the Entity's evaluation on industry practice, internal technical evaluation and experience for assets equivalent.

The estimated useful lives are reviewed at least at each year end reporting and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other restrictions on the use of assets as well as technological developments.

However, it is possible, future results of operations could be materially affected by changes in the estimates due to changes in the factors mentioned above, and therefore the future depreciation charges may be revised.

The costs of property, plant and equipment are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of property, plant and equipment between 4 to 8 years. This is the age that is generally expected in the industry in which the Entity does business. More detailed information disclosed in the note 10 for property, plant and equipment.

Determining Income Taxes

Significant judgments made in determining the provision for income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business activities. The Entity recognizes a liability for corporate income tax based on estimates of whether there will be an additional income tax.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi - Lanjutan

Menentukan Pajak Penghasilan - Lanjutan

Dalam situasi tertentu, Entitas tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Entitas menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi". Entitas membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam catatan 13

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas atas pensiun dan kewajiban imbalan kerja Entitas bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut.

Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Sementara Entitas berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Entitas dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam catatan 16.

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING - Continued

Judgments, Estimates and Assumptions - Continued

Determining Income Taxes - Continued

In certain situations, the Entity cannot determine the exact amount of their current or future tax liability due to on going investigation, or the negotiations with tax authorities. Uncertainties arise concerning the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of the taxable income in the future.

In determining the amount to be recognized related to uncertain tax liabilities, the Entity applies the similar consideration that they will use in determining the amount of provision that must be recognized in accordance with PSAK No. 57 (Revised 2009) "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". The Entity makes the analysis to all tax positions related to income taxes to determine if tax liability for unrecognized tax benefits should be recognized. More detailed information disclosed in the note 13

Estimated Pension Costs and Employee Benefits

The determination of liability for pension and employee benefits obligation and net employee benefits expense is subject to the selection of certain assumptions used by independent actuaries in calculating such amounts.

The assumptions include, among others, the discount rate, the rate of annual salary increases, annual employee resignation rate, degree of disability, retirement age and mortality.

While the Entity believes that the assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions defined by the Entity can materially affect the estimated liability for employee benefits and pensions and net employee benefits expense. More detailed information disclosed in the note 16.

5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

PSAK No. 71 menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK No. 71, Entitas memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Entitas, tidak terdapat dampak yang signifikan atas penerapan awal PSAK No. 71: Instrumen Keuangan dan tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK No. 72 menggantikan PSAK No. 23: "Pendapatan" dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

Entitas menerapkan PSAK No. 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Entitas terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK No. 72, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

5. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

PSAK No. 71: Financial Instrument

PSAK No. 71 replaces PSAK No. 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on financial instruments using an expected credit loss model, which replaces incurred credit loss model and provides a simpler approach for hedge accounting.

In accordance with the transitional requirements on PSAK No. 71, the Entity chose to apply retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

Based on the review of the Entity, there is no significant impact on the initial implementation of PSAK No. 71: Financial Instrument and does not require adjustments in the beginning balance on January 1, 2020.

PSAK No. 72: Revenue from Contracts with Customers

PSAK No. 72 replaces PSAK No. 23: "Revenue" and introduces 5 (five)-step model of revenue recognition and determines that the revenue is recognized when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).

The Entity applies PSAK No 72 retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

Based on the review that the Entity has conducted on revenue contracts with customers with reference to the 5 (five) stages in PSAK No. 72, there is no significant impact on the consolidated financial statements so it does not require adjustments in the opening balance on January 1, 2020.

5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI – Lanjutan

PSAK No. 73: Sewa

PSAK No. 73 menggantikan PSAK No. 30: "Sewa" yang mensyaratkan Entitas sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah.

Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal penerapan awal, Perusahaan juga menggunakan beberapa kebijakan praktis sebagai berikut:

- Menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- Mengandalkan penilaian sebelumnya tentang apakah sewa memberatkan sebagai alternatif untuk melakukan peninjauan penurunan nilai, bahwa tidak ada kontrak yang memberatkan pada 1 Januari 2020;
- Memilih tidak menerapkan persyaratan untuk sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal penerapan awal. Mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang terkait dengan sewa tersebut dalam pengungkapan beban sewa jangka pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Entitas, tidak terdapat dampak yang signifikan atas penerapan awal PSAK No. 73: Sewa terhadap laporan keuangan dan tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

5. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES - Continued

PSAK No. 73: Leases

PSAK No. 73 replace PSAK No. 30: "Leases", which requires the Entity as the lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to leases transaction that were previously classified as operating leases under PSAK No. 30, except for short-term leases or leases with low-value assets.

The Company has implemented PSAK No. 73 using a modified retrospective approach without restating the comparative period. Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, which are discounted using the Company's incremental loan interest rate as of January 1, 2020. Right-of-use assets are measured at the same amount as the lease liabilities adjusted for the amount of prepayments or lease payments accrued in connection with a lease recognized in the statement of financial position as of December 31, 2019.

At the initial implementation date, the Company also adopted the following practical policies:

- *Using a single discount rate on lease portfolios with fairly similar characteristics;*
- *Rely on previous assessments of whether leases are onerous as an alternative to undertaking an impairment review, that there are no aggravating contracts as of 1 January 2020;*
- *Opting out of the requirement for leases whose leases expire within 12 months from the date of initial application. Record these leases in the same manner as short-term leases and include the costs associated with those leases in the disclosure of short-term lease expenses in the annual reporting period covering the date of initial application.*

Based on the review of the Entity, there is no significant impact on the initial implementation of PSAK No. 73: Leases on the financial statements and does not require adjustments in the beginning balance on January 1, 2020.

6. KAS DAN SETARA KAS

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2020	2019	
Kas	10.500.000	6.400.000	Cash
Bank - Pihak Ketiga			Bank - Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Panin Tbk	549.547.257	1.042.400.891	PT Bank Panin Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	346.915.300	117.086.815	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.763.582	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Sahabat Sampoerna	6.829.532	303.875.075	PT Bank Sahabat Sampoerna
PT Bank Mayapada Indonesia Tbk	2.620.687	-	PT Bank Mayapada Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	1.910.176	136.910.043	PT Bank Central Asia Tbk
Sub Jumlah	920.586.534	1.600.272.824	Sub Total
Deposito - Pihak Ketiga			Deposito - third parties
PT Bank Panin Tbk	-	91.474.514	PT Bank Panin Tbk
Jumlah kas dan bank	931.086.534	1.698.147.338	Total cash and bank

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.

The bank account has a floating interest rate in accordance with the level of offer at each bank.

Tingkat suku bunga deposito berjangka untuk tahun – tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar nihil dan 5,5%.

The interest rates on time deposits for the years ended December 31, 2020 and 2019 were nihil and 5.5%, respectively.

7. PIUTANG USAHA

7. TRADE RECEIVABLE

	2020	2019	
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Bina Sawit Makmur	587.601.800	2.511.935.200	PT Bina Sawit Makmur
PT Primafood International	555.490.500	-	PT Primafood International
PT Hutan Ketapang Industri	33.412.092	1.690.783.440	PT Hutan Ketapang Industri
PT Aek Tarum	18.898.910	227.630.910	PT Aek Tarum
PT The Master Steel	-	4.400.000.000	PT The Master Steel
PT Sungai Rangit	-	126.750.000	PT Sungai Rangit
Jumlah	1.195.403.302	8.957.099.550	Total
Pihak berelasi (Catatan 25)	57.796.406	1.194.077.474	Related parties (Note 25)
Jumlah	1.253.199.708	10.151.177.024	Total

7. PIUTANG USAHA - Lanjutan

7. TRADE RECEIVABLE - Continued

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The age details of trade receivables are as follows:

	2020	2019	
< 30 hari	246.653.000	6.312.668.802	< 30 days
30 - 60 hari	308.855.500	818.789.700	30 - 60 days
60 - 90 hari	587.601.800	412.824.796	60 - 90 days
90 - 120 hari	57.796.406	1.323.941.573	90 - 120 days
> 120 hari	52.293.002	1.282.952.153	> 120 days
Jumlah - bersih	<u>1.253.199.708</u>	<u>10.151.177.024</u>	Total - Netto

Piutang usaha yang diungkapkan di atas termasuk jumlah yang telah lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan dimana Entitas tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang karena belum ada perubahan yang signifikan dalam kualitas kredit dan jumlah piutang masih dapat dipulihkan.

Trade receivables disclosed above include amounts past due at the end of the reporting period where the Entity did not establish an allowance for impairment losses on receivables because there has not been a significant change in credit quality and the amount of receivables is still recoverable.

Piutang usaha dijadikan jaminan atas utang bank (Catatan 14).

Trade receivables are used as collateral for bank loans (Note 14).

8. TAGIHAN BRUTO PEMBERI KERJA

8. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS

	2020	2019	
Biaya konstruksi	17.729.660.415	4.190.454.165	Construction Cost
Laba yang diakui	11.456.500.485	1.965.995.801	Recognized Profit
Sub jumlah	29.186.160.900	6.156.449.966	Sub Total
Penagihan	22.885.570.000	5.195.866.240	Progress Billing
Tagihan Bruto Pemberi Kerja	6.300.590.900	960.583.726	Gross Amount Due From Customers
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	Allowance for Impairment Losses
Jumlah	<u>6.300.590.900</u>	<u>960.583.726</u>	Total

Rincian saldo tagihan bruto pemberi kerja berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

The details of the gross amount due from customers based on type of business are as follows:

	2020	2019	
Bangunan	2.205.206.815	960.583.726	Building
Infrastruktur	4.095.384.085	-	Infrastructure
Sub jumlah	6.300.590.900	960.583.726	Sub Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	Allowance for Impairment Losses
Jumlah	<u>6.300.590.900</u>	<u>960.583.726</u>	Total

8. TAGIHAN BRUTO PEMBERI KERJA - Lanjutan

8. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS - Continued

Rincian saldo tagihan bruto pemberi kerja berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of the employer's gross bill balance based on customers are as follows:

	2020	2019	
Pihak ketiga:			<i>Third Parties:</i>
PT The Master Steel	4.095.384.085	-	<i>PT The Master Steel</i>
PT Primafood International	2.205.206.815	-	<i>PT Primafood International</i>
PT Bina Sawit Makmur	-	606.202.816	<i>PT Bina Sawit Makmur</i>
PT Usaha Agro Indonesia	-	354.380.910	<i>PT Usaha Agro Indonesia</i>
Sub jumlah	<u>6.300.590.900</u>	<u>960.583.726</u>	<i>Sub Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	<i>Allowance for Impairment Losses</i>
Jumlah	<u><u>6.300.590.900</u></u>	<u><u>960.583.726</u></u>	<i>Total</i>

Manajemen berpendapat bahwa tagihan bruto dapat ditagihkan. Sehingga Manajemen juga berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan pencadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto.

Management believes that gross bills can be collected. So that Management also believes that there is no need to carry out provision for impairment losses on gross bills.

9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSE

	2020	2019	
Pembelian	4.570.183.800	4.570.183.800	<i>Supplier</i>
Uang muka IPO	-	1.589.375.000	<i>Advance Payments on IPO</i>
Asuransi	89.844.907	-	<i>Insurance</i>
Jumlah	<u><u>4.660.028.707</u></u>	<u><u>6.159.558.800</u></u>	<i>Total</i>

Uang muka pembelian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp4.570.183.000 merupakan uang muka pembelian peralatan dan perlengkapan untuk properti investasi (catatan 10).

Advances for purchases as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp4,570,183,000 represent advances for the purchase of equipment and supplies for investment properties (note 10).

10. PROPERTI INVESTASI

10. INVESTMENT PROPERTY

	31 Desember 2020/ December 31, 2020				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga perolehan					<i>Acquisition Cost</i>
Tanah	27.571.900.000	20.174.550.795	-	47.746.450.795	<i>Land</i>
Bangunan	-	7.130.555.077	-	7.130.555.077	<i>Building</i>
Aset dalam penyelesaian					<i>Assets under construction</i>
Bangunan	79.691.849.419	13.070.981.557	-	92.762.830.976	
Jumlah	<u>107.263.749.419</u>	<u>40.376.087.429</u>	<u>-</u>	<u>147.639.836.848</u>	<i>Total</i>
Akumulasi penyusutan					<i>Accumulated Depreciation</i>
<u>Pemilikan langsung</u>					<i>Direct Ownership</i>
Bangunan	-	237.685.168	-	237.685.168	<i>Building</i>
Jumlah	<u>-</u>	<u>237.685.168</u>	<u>-</u>	<u>237.685.168</u>	<i>Total</i>
Nilai Tercatat	<u><u>107.263.749.419</u></u>			<u><u>147.402.151.680</u></u>	<i>Carrying amount</i>

10. PROPERTI INVESTASI - Lanjutan

10. INVESTMENT PROPERTY - Continued

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga perolehan					<i>Acquisition Cost</i>
Tanah	8.000.000.000	19.571.900.000	-	27.571.900.000	<i>Land</i>
Aset dalam penyelesaian					<i>Assets under</i>
Bangunan	40.921.875.964	38.769.973.455	-	79.691.849.419	<i>construction</i>
Jumlah	48.921.875.964	58.341.873.455	-	107.263.749.419	<i>Total</i>

Properti investasi berupa tanah dan bangunan dalam penyelesaian yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 51 dan 52, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang terbagi dalam SHGB No. 01558, 01559, 01560 dan SHGB No. 01552, 01553, 01579 dan di Jalan Pakubuwono VI No. 99 A-B Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang terbagi dalam SHGB No. 1916 dan 1917.

Investment property in the form of land and buildings in progress which is located at Jalan Sultan Hasanuddin No. 51 and 52, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, which is divided into SHGB No. 01558, 01559, 01560 and SHGB No. 01552, 01553 and 01579 and at Jalan Pakubuwono VI No. 99 A-B Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan which is divided into SHGB No. 1916 dan 1917.

Properti investasi sedang dalam proses pembangunan yang dilakukan dengan kegiatan membangun sendiri. Progress pembangunan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 90% dan diperkirakan selesai pada tahun 2021. Tidak ada hambatan dalam kelanjutan penyelesaian properti investasi.

Investment property is under the process of being itself constructed. The progress of development up to 31 December 2020 is 90% and is estimated to be completed in 2021. There are no obstacles in the continuation of investment property completion.

Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp4.735.983.628 dan Rp1.736.144.011.

Interest on loans which are capitalized into assets under construction as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp4,735,983,628 and Rp1,736,144,011, respectively.

Properti Investasi kecuali tanah telah diasuransikan kepada PT Asuransi Central Asia Syariah, PT Asuransi Umum Mega dan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp103.417.100.000 pada tanggal 31 Desember 2020. Menurut pendapat manajemen Entitas cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Investment Properties except for land have been insured with PT Asuransi Central Asia Syariah, PT Asuransi Umum Mega and PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, against fire and other risks with a sum insured of Rp103,417,100,000 as of December 31, 2020. In the opinion of the entity's management sufficient to cover possible losses on the assets insured.

Properti investasi dijadikan jaminan atas utang bank (Catatan 14).

Investment property is used as collateral for bank loans (Note 14).

Manajemen melakukan penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari properti investasi dan berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Management reviews the value that can be recovered from investment properties and believes that there were no events or changes that indicate a decline in the value of investment properties as of December 31, 2020 and 2019.

11. ASET TETAP

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

31 Desember 2020/December 31, 2020					
	Saldo awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending Balanced</i>	
Biaya perolehan					Acquisition cost
<u>Pemilikan langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
					<i>Vehicles and</i>
Kendaraan dan alat berat	11.163.000.000	-	-	11.163.000.000	<i>heavy equipment</i>
Perabot dan peralatan					<i>Furnitures and Office</i>
kantor	655.488.688	79.307.620	-	734.796.308	<i>equipment</i>
Kendaraan	4.217.265.500	-	-	4.217.265.500	<i>Vehicles</i>
Sub-jumlah	16.035.754.188	79.307.620	-	16.115.061.808	<i>Sub-total</i>
<u>Sewa pembiayaan</u>					<u>Financial lease</u>
Kendaraan	2.925.666.790	-	-	2.925.666.790	<i>Vehicles</i>
Jumlah	18.961.420.978	79.307.620	-	19.040.728.598	<i>Total</i>
Akumulasi penyusutan					Accumulated Depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
					<i>Vehicles and</i>
Kendaraan dan alat berat	6.529.770.833	1.395.375.000	-	7.925.145.833	<i>heavy equipment</i>
Perabot dan peralatan					<i>Furnitures and Office</i>
kantor	519.331.757	73.298.163	-	592.629.920	<i>equipment</i>
Kendaraan	2.677.546.599	487.720.687	-	3.165.267.286	<i>Vehicles</i>
Sub-jumlah	9.726.649.189	1.956.393.850	-	11.683.043.039	<i>Sub-total</i>
<u>Sewa pembiayaan</u>					<u>Financial lease</u>
Kendaraan	149.629.578	365.708.349	-	515.337.927	<i>Vehicles</i>
Jumlah	9.876.278.767	2.322.102.199	-	12.198.380.966	<i>Total</i>
Nilai Tercatat	9.085.142.211			6.842.347.632	Carrying amount
31 Desember 2019/December 31, 2019					
	Saldo awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending Balanced</i>	
Harga perolehan					Acquisition cost
<u>Pemilikan langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
					<i>Vehicles and</i>
Kendaraan dan alat berat	11.163.000.000	-	-	11.163.000.000	<i>heavy equipment</i>
Perabot dan peralatan					<i>Furnitures and Office</i>
kantor	559.734.000	95.754.688	-	655.488.688	<i>equipment</i>
Kendaraan	4.942.265.500	-	725.000.000	4.217.265.500	<i>Vehicles</i>
Sub-jumlah	16.664.999.500	95.754.688	725.000.000	16.035.754.188	<i>Sub-total</i>
Aset sewa pembiayaan					<i>Financial leased assets</i>
Kendaraan	2.814.888.000	295.666.790	184.888.000	2.925.666.790	<i>Vehicles</i>
Jumlah	19.479.887.500	391.421.478	909.888.000	18.961.420.978	<i>Total</i>

11. ASET TETAP - Lanjutan

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - Continued

	31 Desember 2019/December 31, 2019				
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending Balanced	
Akumulasi penyusutan					Accumulated Depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
					<i>Vehicles and heavy equipment</i>
Kendaraan dan alat berat	5.134.395.833	1.395.375.000	-	6.529.770.833	
Perabot dan peralatan kantor	463.081.349	56.250.408	-	519.331.757	<i>Furnitures and Office equipment</i>
Kendaraan	2.348.419.661	495.272.771	166.145.833	2.677.546.599	<i>Vehicles</i>
Sub-jumlah	7.945.896.843	1.946.898.179	166.145.833	9.726.649.189	<i>Sub-total</i>
Aset sewa pembiayaan					<i>Financial leased assets</i>
Kendaraan	67.407.095	157.333.233	75.110.750	149.629.578	<i>Vehicles</i>
Jumlah	8.013.303.938	2.104.231.412	241.256.583	9.876.278.767	<i>Total</i>
Nilai Tercatat	11.466.583.562			9.085.142.211	Carrying amount

Beban Penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.322.102.199 dan Rp2.104.231.412 yang dialokasikan pada beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi.

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp2,322,102,199 and Rp2,104,231,412, respectively, allocated to cost of revenue and general and administrative expenses.

Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of the sale of property, plant and equipment are as follows:

	2020	2019	
Harga Jual	-	403.290.384	<i>Sales on vehicles</i>
Nilai Buku	-	(668.631.417)	<i>Book value</i>
Rugi Penjualan Aset Tetap	-	(265.341.033)	<i>Loss on sale of property, plant and equipment</i>

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen mengkaji ulang nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan, disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

At the end of each financial year, management reviews residual values, useful lives and methods of depreciation, adjusted prospectively if necessary.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Based on the results of management reviews, there were no events or changes in circumstances that indicate a decline in the value of property, plant and equipment as of December 31, 2020 and 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Aset sewa pembiayaan kendaraan telah diasuransikan terhadap risiko kehilangan dan lainnya kepada PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (pihak ketiga).

As of December 31, 2020, and 2019, vehicle finance lease assets were insured against loss and other risks to PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (third party).

Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai perolehan aset tetap Entitas yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah sebesar Rp393.556.000 (31 Desember 2019 sebesar Rp393.556.000), yang terdiri dari perabot dan peralatan kantor.

As of December 31, 2020, the acquisition value of the Entity's property, plant and equipment which had been fully depreciated but still in use was Rp393,556,000 (December 31, 2019 was Rp393,556,000), consisting of furnitures and office equipments.

12. BIAYA YANG MASIH HARUS

12. ACCRUED EXPENSES

	2020	2019	
Jasa profesional	7.782.500	452.182.500	<i>Professional fee</i>
Gaji dan tunjangan	-	60.000.000	<i>Salaries and allowance</i>
Lain-lain	239.342.035	239.375.080	<i>Others</i>
Jumlah	<u>247.124.535</u>	<u>751.557.580</u>	<i>Total</i>

13. PERPAJAKAN

13. TAXATION

a. Utang Pajak

a. Tax Payable

	2020	2019	
Pajak Penghasilan:			<i>Income Taxes:</i>
Pasal 21	5.221.519	20.319.682	<i>Article 21</i>
Pasal 23	10.632	12.450.396	<i>Article 23</i>
Pajak Pertambahan Nilai	272.588.707	548.688.688	<i>Value Added Tax</i>
Jumlah	<u>277.820.858</u>	<u>581.458.766</u>	<i>Total</i>

b. Pajak Kini

b. Current Tax

	2020	2019	
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(4.045.224.902)	1.587.817.053	<i>Income (Loss) before tax according to statements of profit or loss and other comprehensif income</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(25.638.148.687)	(41.462.868.447)	<i>Revenue already Subjected to final tax</i>
Beban yang berkaitan dengan pajak final	29.683.373.589	39.875.051.394	<i>Expense according to final tax</i>
Laba (Rugi) fiskal tahun berjalan	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Fiscal Profit (Loss) current year</i>

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2020 seperti yang disebutkan di atas dan utang PPh terkait akan dilaporkan oleh Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") PPh badan tahun 2020 ke Kantor Pajak.

The amounts of the Company's taxable income and current income tax expense for 2020, as stated in the foregoing, and the related tax payables will be reported by the Company in its 2020 annual income tax return ("SPT") to be submitted to the Tax Office.

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2019 seperti yang disebutkan di atas dan utang PPh terkait telah dilaporkan oleh Perusahaan dalam SPT PPh badan tahun 2019 ke Kantor Pajak.

The amounts of the Company's taxable income and current income tax expense for 2019, as stated in the foregoing, and the related tax payables have been reported by the Company in its 2019 SPT as submitted to the Tax Office.

14. UTANG BANK

14. BANK LOAN

	2020	2019	
Jangka pendek:			<i>Short - term</i>
PT Bank Panin Tbk	31.954.622.794	31.986.369.995	<i>PT Bank Panin Tbk</i>
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	30.659.649.996	17.667.648.716	<i>PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.499.999.980	1.494.898.333	<i>Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Sahabat Sampoerna	-	1.921.977.410	<i>PT Bank Sahabat Sampoerna</i>
Jumlah jangka pendek	<u>64.114.272.770</u>	<u>53.070.894.454</u>	<i>Total Short - term</i>
Jangka panjang:			<i>Long term:</i>
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	47.470.528.701	49.942.840.269	<i>PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk</i>
PT Bank Panin Tbk	5.312.554.024	6.906.468.309	<i>PT Bank Panin Tbk</i>
PT Bank Sahabat Sampoerna	-	1.255.909.917	<i>PT Bank Sahabat Sampoerna</i>
Jumlah jangka panjang	<u>52.783.082.725</u>	<u>58.105.218.495</u>	<i>Total long-term</i>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun	<u>(4.138.547.987)</u>	<u>(4.360.713.527)</u>	<i>Less current maturity within 1 (one) year:</i>
Bagian jangka panjang	<u><u>48.644.534.738</u></u>	<u><u>53.744.504.968</u></u>	<i>Long Term Portion</i>

PT Bank Sahabat Sampoerna

Entitas memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Sahabat Sampoerna berupa:

- a. Pinjaman Angsuran sebesar Rp1.133.360.743 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Angsuran No. 10 tertanggal 3 Juli 2015 oleh Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Jakarta dengan jangka waktu pinjaman selama 84 bulan sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022, tingkat suku bunga 16% per tahun.
- b. Pinjaman Angsuran sebesar Rp1.366.639.257 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Angsuran No. 11 tertanggal 3 Juli 2015 oleh Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Jakarta dengan jangka waktu pinjaman selama 84 bulan sejak tanggal 19 Juni 2015 dan jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022, dengan tingkat suku bunga 16% per tahun.
- c. Pinjaman Tetap Revolving (PTR) sebesar Rp3.000.000.000 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Revolving No. 13 tanggal 31 Oktober 2016 oleh Kelaswara Chandrakirana, S.H., dengan jangka waktu 12 bulan dan tingkat suku bunga 16% per tahun. Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.622/SPPK-CPT/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 dan diperpanjang dengan No.542/BSS-JKT/PPJ/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019, pinjaman ini berakhir pada tanggal 1 Januari 2020.

PT Bank Sahabat Sampoerna

The entity obtains credit facilities from PT Bank Sahabat Sampoerna in the form of:

- a. Installment Loans amounting to Rp1,133,360,743 based on the Deed of Installment Loan Credit Agreement No. 10 dated July 3, 2015 of Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notary in Jakarta with a loan term of 84 months from June 19, 2015 to June 19, 2022, an interest rate of 16% per annum.
- b. Installment Loans amounting to Rp1,366,639,257 based on the Deed of Installment Loan Credit Agreement No. 11 dated July 3, 2015 of Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notary in Jakarta with a loan term of 84 months from June 19, 2015 and due on January 19, 2022, with an interest rate of 16% per annum.
- c. Revolving Fixed Loan (PTR) of Rp3,000,000,000 based on the Revolving Fixed Loan Credit Agreement No. 13 dated 31 October 2016 of Classwara Chandrakirana, S.H., with a term of 12 months and an interest rate of 16% per year. In accordance with the Notification Credit Approval Letter No. 622/SPPK-CPT/X/2018 dated October 2, 2018 and extended with No. 542/BSS-JKT/PPJ/X/2019 dated October 30, 2019, this loan will expire on January 1, 2020.

14. UTANG BANK - Lanjutan

PT Bank Sahabat Sampoerna - Lanjutan

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) No. 3415/XVII/ABELIA, terdaftar atas nama Tuan Alex Widjaja (pemegang saham) seluas 98,44 m2 yang terletak di Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen Permata Hijau Jalan Arteri Permata Hijau RT 006 RW 09 dan RT 005 RW 09, Lantai 19 Nomor A/19/AG-Blok Abelia Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Jakarta Selatan. Terhadap jaminan ini dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan Rp2.600.000.000.
- Semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dimiliki oleh Pemberi Fidusia dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga siapapun juga berdasarkan perjanjian-perjanjian yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh Pemberi Fidusia dengan pihak ketiga manapun juga, satu dan lain menjadi milik Pemberi Fidusia sebagaimana diuraikan dalam Daftar Piutang (*Account Receivable*) dengan nilai sebesar Rp4.655.504.075.

Tanpa persetujuan Bank, Entitas tidak diperbolehkan untuk:

1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset Entitas, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Entitas, kecuali dalam rangka menjalankan usaha entitas sehari-hari.
2. Melakukan atau menyebabkan dilakukannya penarikan modal disetor.
3. Memperoleh pinjaman baru atau menyebabkan terjadinya utang baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jaminan atau tidak, dari Bank, lembaga keuangan maupun pihak lain, kecuali pinjaman subordinasi dari pemegang saham atau pinjaman yang memang biasa dan harus dilakukan dalam rangka kegiatan operasional Entitas.
4. Mengalihkan atau menyebabkan beralihnya usaha kepada siapapun.
5. Melakukan pembayaran pokok, bunga maupun pembayaran lain atas utang Pemegang Saham.
6. Melakukan pembelian barang tidak bergerak, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan usaha Entitas.
7. Menjaminkan dengan cara apapun, harta kekayaan entitas kepada pihak lain, kecuali menjaminkan harta kekayaan kepada Bank.
8. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Entitas untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Entitas sehari-hari.

14. BANK LOAN - Continued

PT Bank Sahabat Sampoerna - Continued

These loan facilities are guaranteed by:

- *Certificate of Ownership on Flat Units (SHMSRS) No. 3415/XVII/ABELIA, registered in the name of Mr. Alex Widjaja (a shareholder) covering an area of 98.44 m2 located in Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen Permata Hijau Jalan Arteri Permata Hijau RT 006 RT RW 09 and RT 005 RW 09, Floor 19 Number A/19/AG-Blok Abelia Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan. For this collateral, a Mortgage Right I is charged with a guarantee value of Rp2,600,000,000.*
- *All and every right, authority, bills and claims that are now owned by the Fiduciary Giver and/or in the future will be owned, obtained and can be carried out by the Fiduciary Giver against any third party also based on the agreements that have now been and / or in the future will be made by the Fiduciary Giver with any third party, one and another will become the property of the Fiduciary Giver as described in the Account Receivable List with a value of Rp4,655,504,075.*

Subject to Bank approval, the Entity is not allowed to:

1. *Sell or otherwise transfer the rights or lease/usage surrender all or part of wealth/assets of the Entity, whether goods movable or immovable owned Entity, except in the course of doing the daily Entity business.*
2. *Conduct or cause a withdrawal of paid up capital.*
3. *Obtain new loans or cause new loans, incurred either directly or indirectly, with guarantees or not, from banks, financial institutions or other parties, except for subordinated loans from shareholders or loans that are normal and must be carried out within the framework of the Entity's operational activities.*
4. *Transfer or cause the transfer of the business to anyone.*
5. *Payment of principal, interest or other payments on the debt of Shareholders.*
6. *Purchase immovable goods, except those related to the Entity's business activities.*
7. *Guarantee in any way, the Entity's assets to other parties, except to guarantee assets to the Bank.*
8. *Enter into an agreement that could result in Entity liability to pay to third parties, except to run the daily entity's business.*

14. UTANG BANK - Lanjutan

PT Bank Sahabat Sampoerna - Lanjutan

9. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.
10. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Entitas sehari-hari.
11. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Entitas seperti yang sedang dijalankan saat ini.
12. Melakukan merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) dan akuisisi (pengambilalihan).
13. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham entitas baik berupa jumlah pokok, bunga atau biaya lainnya.
14. Melakukan perubahan Anggaran Dasar, susunan pengurus (Direksi/Pengurus dan Dewan Komisaris/Pengawas), susunan para pemegang saham Entitas tanpa mendapat persetujuan atau melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank.

Berdasarkan suat keterangan lunas SKL No. 09/056/BSS-LNS/KR/VI/20 tanggal 15 Juni 2020 dan SKL No. 09/123/BSS-LNS/KR/III/21 tanggal 18 Maret 2021 Utang bank kepada PT Bank Sahabat Sampoerna telah di lunas.

PT Bank Panin Tbk

Entitas memperoleh pinjaman dari PT Bank Panin Tbk berupa:

- a. Kredit Dengan Memakai Jaminan (Fasilitas Pinjaman Berulang) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan oleh Fenny Tjitra, S.H., No. 65 tanggal 17 Juni 2013, Notaris di Jakarta, telah mengalami perubahan yang telah diaktakan dengan akta Notaris Henggawati, S.H. No. 22 tanggal 13 November 2020, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Pinjaman Berulang dari PT Bank Panin Tbk atas nama PT Lancartama Sejati Tbk dengan nilai fasilitas kredit pinjaman berulang sebesar Rp30.000.000.0000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2021.
- b. Kredit Dengan Memakai Jaminan (Fasilitas Pinjaman Rekening Koran) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan oleh Fenny Tjitra, S.H., No. 64 tanggal 17 Juni 2013, Notaris di Jakarta. Telah mengalami perubahan atas perjanjian kredit yang telah diaktakan dengan akta Notaris Henggawati, S.H. No. 21 tanggal 13 November 2020, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dari PT Bank Panin Tbk atas nama PT Lancartama Sejati Tbk dengan nilai plafond Rp2.000.000.0000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2021.

14. BANK LOAN – Continued

PT Bank Sahabat Sampoerna – Continued

9. Guarantee directly or indirectly to other third parties, except for endorsement of tradable documents for the purpose of payment or collection of other transactions that are commonly carried out in conducting business.
10. Give loans to or receive loans from other parties except to run the daily Entity's business.
11. Make changes of nature and business activities of the entity as currently carried out.
12. Conduct merger consolidation and acquisition (takeover).
13. Pay or repay the bills or receivables in any form that is current and/or in the future will be provided by the shareholders of the Entity either in the form of the principal amount, interest or other costs.
14. Making changes to the Articles of Association, board of management (Board of Directors /Careteker and Board of Commissioners /Comptroller), the composition of the shareholders of the Entity without obtaining the approval or giving prior written notice to the Bank.

Based on the full SKL statement No. 09/056/BSS-LNS/KR/VI/20 dated 15 June 2020 and SKL No. 09/123/BSS-LNS/KR/III/21 dated 18 March 2021 The bank loan to PT Bank Sahabat Sampoerna has been paid off.

PT Bank Panin Tbk

The entity obtained a loan from PT Bank Panin Tbk in the form of:

- a. Credit With Collateral (Recurring Loan Facility) based on the Deed of Credit Agreement with Collateral Agreement of Fenny Tjitra, S.H., No. 65 on June 17, 2013, Notary in Jakarta, has been the amendment to the notarized credit agreement with the deed of Notary Henggawati, S.H. No. 22 dated 13 November 2020, the Company obtained an additional Recurring Loan facility from PT Bank Panin Tbk on behalf of PT Lancartama Sejati Tbk with a recurring loan credit facility amounting to Rp30,000,000.0000 and will mature on 18 June 2021.
- b. Credit with Colleteral (Current Account Loan Facility) based on the Deed of Credit With Colleteral Agreement of Fenny Tjitra, S.H., No. 64 dated June 17, 2013, Notary in Jakarta. Has been the amendment to the notarized credit agreement with the deed of Notary Henggawati, S.H. No. 21 dated 13 November 2020, the Company obtained an additional Current Account Loan facility from PT Bank Panin Tbk in the name of PT Lancartama Sejati Tbk with a ceiling value of Rp2,000,000.0000 and will mature on 18 June 2021.

14. UTANG BANK - Lanjutan

PT Bank Panin - Lanjutan

- c. Kredit Dengan Memakai Jaminan (Fasilitas Pinjaman Rekening Koran) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan oleh Paulus Widodo Sugeng Haryono No. 39 tanggal 20 September 2016 Notaris di Jakarta. Telah mengalami perubahan atas perjanjian kredit No. 39 Notaris Paulus. Yang telah diubah oleh Notaris Henggawati, S.H. No. 23 tanggal 13 November 2020, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dari PT Bank Panin Tbk atas nama PT Lancartama Sejati Tbk dengan nilai Rp8.300.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 September 2023.
- d. Pinjaman Tetap Modal Angsuran Berdasarkan akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan oleh Henggawati S.H., No. 15 tanggal 11 Februari 2019 Notaris di Jakarta. Berdasarkan perubahan atas perjanjian kredit No. 15 yang telah diubah oleh Notaris Henggawati, S.H. No. 24 tanggal 13 November 2020, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dari PT Bank Panin Tbk atas nama PT Lancartama Sejati Tbk dengan nilai Rp2.000.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2023.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. 340/JAP-CBG/EXT/20 tanggal 6 November 2020, Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan Pinjaman Berulang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2021. Dan seluruh fasilitas kredit dikenakan Bunga 9,75% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Sertifikat Hak Milik No. 6959/Pluit, seluas 165 m² terletak di Jalan Raya Pluit Timur No. 29 Blok H Kav. 30A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta atas nama Jumina Widjaja, Surjanto, Susanto Widjaja, Kathrin Widjaja, Alex Widjaja, yang telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sebesar Rp11.000.000.000.
- SHGB 1917 dan 1916 APHT I Rp35.000.000.000 atas tanah seluas 241 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 99A dan B (d/h No. 82), Kel Gunung, Kec Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terdaftar an. PT Lancartama Sejati Tbk.
- Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 1410/Gadog, seluas 369 m² yang terletak di Villa Green Apple Garden, Kelurahan Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, atas nama Yuliana (pihak berelasi), yang telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sebesar Rp1.323.180.000.

14. BANK LOAN – Continued

PT Bank Panin – Continued

- c. Credit with Collateral (Current Account Loan Facility) based on the Deed of Credit with Collateral Agreement of Paulus Widodo Sugeng Haryono nor 39 dated September 20, 2016 Notary in Jakarta. Based on the changes to the credit agreement No. 39 Notary Paulus. Which has been amended by Notary Henggawati, S.H. No. 23 dated November 13, 2020, the Company obtained an additional Current Account Loan facility from PT Bank Panin Tbk in the name of PT Lancartama Sejati Tbk with a value of Rp8,300,000,000 and will mature on September 21, 2023.

Fixed Capital Loan Installment based on the Deed of Credit with Collateral Agreement of Henggawati S.H., No. 15 dated February 11, 2019 Notary in Jakarta. Based on the changes to the credit agreement No. 15 which has been amended by Notary Henggawati, S.H. No. 24 dated 13 November 2020, the Company obtained an additional Current Account Loan facility from PT Bank Panin Tbk in the name of PT Lancartama Sejati Tbk with a value of Rp2,000,000,000 and will mature on 11 October 2023.

Based on the Notification Credit Approval Letter (SPPK) No. 340/JAP-CBG/EXT/20 dated November 6, 2020, Current Account Loan Facility and Recurring Loan Facility will mature on June 18, 2021- and all credit facilities bear interest at 9,75% per annum.

These loan facilities are guaranteed by:

- Right of Ownership Certificate No. 6959/Pluit covering an area of 165 m², located on Jalan Raya Pluit Timur No. 29 Blok H Kav. 30A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta Province in the name of Jumina Widjaja, Surjanto, Susanto Widjaja, Kathrin Widjaja, Alex Widjaja, which has been bounded with First (I) Rank Mortgage in the amount of Rp11,000,000,000.
- SHGB 1917 and 1916 APHT I Rp35,000,000,000 for a land area of 241 m² along with the building that stands on it which is located on Jl. Pakubuwono VI No. 99A and B (d / h No. 82), Kel Gunung, Kec Kebayoran Baru, Jakarta Selatan are registered. PT Lancartama Sejati Tbk.
- Right of Ownership Certificate land No. 1410/Gadog, covering an area of 369 m² located in Villa Green Apple Garden, Kelurahan Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Province, in the name of Yuliana (related parties), which has been bounded with First (I) Rank Mortgage in the amount of Rp1,323,180,000.

14. UTANG BANK - Lanjutan

PT Bank Panin Tbk - Lanjutan

Tanpa persetujuan Bank, Entitas tidak diperbolehkan untuk:

1. Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga siapapun, selain yang bertalian dengan usaha sehari-hari dari Entitas.
2. Bertindak sebagai penjamin (*borg*) atas utang pihak ketiga.
3. Menjaminkan atau menggadaikan atau menyewakan kepada pihak ketiga manapun juga Tanah dan Bangunan yang telah dijaminkan kepada Bank.
4. Menyewakan/ menjual/ mengoperkan/ memindah-tangankan atau menjaminkan tanah yang diberikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;
5. Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan susunan para pemegang saham Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank
6. Melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Debitur tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit Modal Kerja No. 49 tanggal 24 September 2018, Entitas memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja berupa Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp1.500.000.000, dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan. Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) No. B.48-SH/RTL/KRD/09/2020, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyetujui perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sampai dengan tanggal 24 September 2021.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Sertifikat Hak Milik No. 03560/Rengas dengan luas sebesar 71 m² atas nama Alex Widjaja (pemegang saham), dengan membebaskan Hak Tanggungan dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp1.650.000.000.

Tanpa persetujuan tertulis Bank, Entitas tidak diperbolehkan untuk:

1. Melakukan pembayaran/melunasi utang pada pemegang saham sebelum seluruh kewajiban/kredit di Bank dilunasi.
2. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (*Borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.
3. Merubah bentuk atau status hukum perusahaan serta merubah komposisi modal.
4. Melakukan pembagian keuntungan/dividen.
5. Menyewakan barang agunan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.
6. Memasuki bisnis baru dan atau melakukan penggabungan usaha dengan pihak lain.
7. Membubarkan usaha atau minta dinyatakan pailit.
8. Melakukan perubahan pemilik, pengurus dan pemegang saham Entitas.

14. BANK LOAN - Continued

PT Bank Panin Tbk - Continued

Subject to Bank approval, the Entity is not allowed to:

1. *Borrow from or lend money to any third party, other than those related to the daily business of the Entity.*
2. *Acting as guarantor (borg) for third party debt.*
3. *Guarantee or mortgage or lease to any third-party Land and Buildings that have been pledged to the Bank.*
4. *Renting/selling/passing/transferring/handover or pledging land granted as collateral in any form whatsoever to third parties without prior written approval from the Bank.*
5. *Making changes to the Articles of Association and composition of the Debtor's shareholders without prior written approval from the Bank.*
6. *Change the composition of the Directors and Commissioners of the Debtor without written notice to the Bank.*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Deed of Approval to Working Capital Loan No. 49 dated September 24, 2018, the Entity has obtained Working Capital Credit Facility Loan in the form of Current Account Loan of Rp1,500,000,000 with an interest rate 12.50% p.a with a term of 12 months Based on Credit Decision Offering Letter (SPPK) No. B.48-SH/RTL/KRD/09/2020, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk approved the extension agreement of Working Capital Credit Facility until September 24, 2021

The Loan facility is guaranteed with:

- *Right of Ownership Certificate No. 03560/Rengas, land with area of 71 sqm in the name of Alex Widjaja (a shareholder), with the Deed First (I) Rank Mortgage Rights of Rp1,650,000,000.*

Subject to written approval from the Bank, the Entity is not allowed to:

1. *Make payment/settle debts to shareholder before all obligation/credit to the Bank are paid.*
2. *Bind itself as guarantor (Borg), to guarantee asset in any form and purpose to other parties.*
3. *Change the legal form of corporate and change the capital composition structure.*
4. *Distributing profits and dividends.*
5. *Lease assets that are pledged to the bank in any form or purpose to the other party.*
6. *Entering a new business and or merger with other party.*
7. *Dissolve business or apply for bankruptcy.*
8. *Change the ownership, the board, and shareholder of the Entity.*

14. UTANG BANK - Lanjutan

14. BANK LOAN – Continued

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Berdasarkan Akta No. 1619, 2069, 2070, 783, 784, dan 1016 pada tanggal 19 Agustus 2019, 23 September 2019, 9 Oktober 2019, dan 15 November 2019 yang telah dibuat oleh Notaris Recky Francky Limpele. Berdasarkan Akta terbaru mengenai Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah oleh Adi Triharso, S.H., No. 23 tanggal 26 Mei 2020, Notaris di Jakarta.

Based on the Deed No. 1619, 2069, 2070, 783, 784, and 1016 on 19 August 2019, 23 September 2019, 9 October 2019, and 15 November 2019 which have been made by Notary Recky Francky Limpele. Based on the latest Deed regarding the Musyarakah Financing Akad Addendum by Adi Triharso, S.H., No. 23 dated 26 May 2020, Notary in Jakarta.

Perusahaan memperoleh perpanjangan secara permanen Fasilitas Musyarakah PRKS 1, Fasilitas Musyarakah PRKS,2 dan Fasilitas Musyarakah PRKS 3, Penggabungan Fasilitas PRKS tersebut, dan menambah plafond pembiayaan Fasilitas Musyarakah PRKS sebesar Rp13.005.015.838 sehingga jumlah keseluruhan plafond Fasilitas Musyarakah PRKS menjadi sebesar Rp30.750.000.000

The company obtained a permanent extension of the PRKS 1 Musyarakah Facility, the PRKS Musyarakah Facility, 2 and the PRKS 3 Musyarakah Facility, the PRKS Facility Merger, and increased the financing limit for the PRKS Musyarakah Facility by Rp13,005,015,838, bringing the total ceiling of the PRKS Musyarakah Facility to Rp30,750,000,000

Berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No. 088/WFC/OL/V/2020 tertanggal 14 Mei 2020, Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebagai berikut:

Based on the Letter of Affirmation of Approval of Financing (SP3) No.088/WFC/OL/V/2020 dated 14 May 2020, the entity obtains the following financing facilities from PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk:

1. Fasilitas Musyarakah PRKS

1. Fasilitas Musyarakah PRKS

Skim Pembiayaan	:	Musyarakah PRKS	:	Financing Scheme
Tujuan Pembiayaan	:	Modal kerja usaha dan operasional/	:	Purpose of Financing
		<i>Business and operational working capital</i>		
Plafond Maksimal	:	Rp30.750.000.000	:	Maximum Ceiling
Outstanding per 31-12-2020	:	Rp30.659.649.996	:	Outstanding per 31-12-2020
Sifat Pembiayaan	:	Revolving	:	Nature of Financing
Jumlah Nilai Obyek Akad	:	Rp108.593.114.080	:	Total Working Capital Needs
Porsi Syirkah PDSB	:	Rp30.750.000.000 (28,3%)	:	Portion of Syirkah PDSB
Porsi Syirkah Nasabah	:	Rp77.843.114.080 (71,7%)	:	Portion of Debtor Syirkah
Objek Bagi Hasil	:	Seluruh pendapatan usaha	:	Revenue Share
		<i>nasabah/All debtor operating revenues</i>		
Nisbah Bagi Hasil	:	Multinisbah	:	Profit Sharing Ratio
Jangka Waktu	:	26-05-2020 s/d 22-06-2021	:	Period of time

2. Fasilitas Line Facility Musyarakah I

2. Fasilitas Line Facility Musyarakah I

Skim Pembiayaan	:	Line Facility Musyarakah I	:	Financing Scheme
Tujuan Pembiayaan	:	Take over fasilitas modal kerja	:	Purpose of Financing
		<i>nasabah di Bank Mayora/Take over the debtor's working capital facility at Bank Mayora</i>		
Outstanding per 31-12-2020	:	Rp8.079.336.923	:	Outstanding per 31-12-2020
Plafond Maksimal	:	Rp8.079.336.923	:	Maximum Ceiling
Sifat Pembiayaan	:	Revolving	:	Nature of Financing
Jumlah Kebutuhan Modal kerja	:	Rp67.268.574.394	:	Total Working Capital Needs
Porsi Syirkah PDSB	:	Rp8.079.336.923 (12,01%)	:	Portion of Syirkah PDSB
Porsi Syirkah Nasabah	:	Rp59.189.237.471 (87,99%)	:	Portion of Debtor Syirkah
Objek Bagi Hasil	:	Seluruh pendapatan usaha	:	Revenue Share
		<i>nasabah/All debtor operating revenues</i>		
Nisbah Bagi Hasil	:	Multinisbah	:	Profit Sharing Ratio
Jangka Waktu	:	9-10-2019 s/d 9-10-2021	:	Period of time

14. UTANG BANK - Lanjutan

14. BANK LOAN – Continued

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk - Lanjutan

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk - Continued

3. Fasilitas Line Facility Musyarakah II

3. Fasilitas Line Facility Musyarakah II

Skim Pembiayaan	:	Line Facility Musyarakah II	:	<i>Financing Scheme</i>
Tujuan Pembiayaan	:	Take over fasilitas modal kerja di Bank BNP Parahyangan / Bank Danamon/Take over working capital facilities at Bank BNP Parahyangan / Bank Danamon	:	<i>Purpose of Financing</i>
Outstanding per 31-12-2020	:	Rp12.160.459.423	:	<i>Outstanding per 31-12-2020</i>
Plafond	:	Rp12.160.459.423	:	<i>Ceiling</i>
Sifat Pembiayaan	:	Non Revolving	:	<i>Nature of Financing</i>
Nilai Objek Syirkah	:	Rp65.371.508.100	:	<i>Syirkah Object Value</i>
Porsi Syirkah PDSB	:	Rp12.160.459.423 (18,60%)	:	<i>Portion of Syirkah PDSB</i>
Porsi Syirkah Nasabah	:	Rp 53.211.048.676 (81,40%)	:	<i>Portion of Debtor Syirkah</i>
Objek Bagi Hasil	:	Pendapatan sewa objek Syirkah/Syirkah object rental income	:	<i>Revenue Share</i>
Nisbah Bagi Hasil	:	Multinisbah	:	<i>Profit Sharing Ratio</i>
Jangka Waktu	:	20-11-2019 s/d 20-11-2021	:	<i>Period of time</i>

4. Fasilitas Line Facility Musyarakah Mutanaqisah I

4. Fasilitas Line Facility Musyarakah Mutanaqisah I

Skim Pembiayaan	:	Line Facility Musyarakah Mutanaqisah I	:	<i>Financing Scheme</i>
Tujuan Pembiayaan	:	Take over fasilitas kredit Investasi nasabah di Bank Danamon/Take over the debtor investment credit facility at Bank Danamon	:	<i>Purpose of Financing</i>
Outstanding per 31-12-2020	:	10.768.748.504	:	<i>Outstanding per 31-12-2020</i>
Plafond	:	Rp11.824.508.159	:	<i>Ceiling</i>
Sifat Pembiayaan	:	Non Revolving	:	<i>Nature of Financing</i>
Nilai Objek Syirkah	:	Rp21.464.747.664	:	<i>Syirkah Object Value</i>
Porsi Syirkah PDSB	:	Rp11.824.508.159 (55,09%)	:	<i>Portion of Syirkah PDSB</i>
Porsi Syirkah Nasabah	:	Rp9.640.239.505 (44,91%)	:	<i>Portion of Debtor Syirkah</i>
Objek Bagi Hasil	:	Pendapatan sewa objek Syirkah/Syirkah object rental income	:	<i>Revenue Share</i>
Nisbah Bagi Hasil	:	Multinisbah	:	<i>Profit Sharing Ratio</i>
Jangka Waktu	:	23-09-2019 s/d 23-09-2026	:	<i>Period of time</i>

5. Fasilitas Line Facility Musyarakah Mutanaqisah II – Baru

5. Fasilitas Line Facility Musyarakah Mutanaqisah II – New

Skim Pembiayaan	:	Line Facility Musyarakah Mutanaqisah II	:	<i>Financing Scheme</i>
Tujuan Pembiayaan	:	Take over fasilitas kredit investasi nasabah di Bank Danamon/Take over the debtor investment credit facility at Bank Danamon	:	<i>Purpose of Financing</i>
Outstanding per 31-12-2020	:	Rp1.932.608.856	:	<i>Outstanding per 31-12-2020</i>
Plafond	:	Rp2.251.170.756	:	<i>Ceiling</i>
Sifat Pembiayaan	:	Non Revolving	:	<i>Nature of Financing</i>
Nilai Objek Syirkah	:	Rp21.464.747.664	:	<i>Syirkah Object Value</i>
Porsi Syirkah PDSB	:	Rp2.251.170.756 (10,49%)	:	<i>Portion of Syirkah PDSB</i>
Porsi Syirkah Nasabah	:	Rp19.213.576.908 (89,51%)	:	<i>Portion of Debtor Syirkah</i>
Objek Bagi Hasil	:	Pendapatan sewa objek Syirkah/Syirkah object rental income	:	<i>Revenue Share</i>
Nisbah Bagi Hasil	:	Multinisbah	:	<i>Profit Sharing Ratio</i>
Jangka Waktu Line Facility	:	23-09-2019 s/d 23-02-2024	:	<i>Duration of Line Facility</i>

14. UTANG BANK - Lanjutan

14. BANK LOAN – Continued

PT Bank Panin Dubai Svriah Tbk - Lanjutan

PT Bank Panin Dubai Svriah Tbk - Continued

6. Fasilitas Line Facility Musyarakah Mutanaqisah III – Baru

6. Fasilitas Line Facility Musyarakah Mutanaqisah III – Baru

Skim Pembiayaan	:	Line Facility Musyarakah Mutanaqisah III	:	Financing Scheme
Tujuan Pembiayaan	:	Take over fasilitas kredit investasi nasabah di Bank BNP Parahyangan /Bank Danamon/ Take over the debtor investment credit facility at Bank BNP Parahyangan / Bank Danamon	:	Purpose of Financing
Outstanding per 31-12-2020	:	Rp14.529.374.995	:	Outstanding per 31-12-2020
Plafond	:	Rp16.016.633.846	:	Ceiling
Sifat Pembiayaan	:	Non Revolving	:	Nature of Financing
Nilai Objek Syirkah	:	Rp85.064.000.000	:	Syirkah Object Value
Porsi Syirkah PDSB	:	Rp16.016.633.846 (18,83%)	:	Portion of Syirkah PDSB
Porsi Syirkah Nasabah	:	Rp69.047.366.154 (81,17%)	:	Portion of Debtor Syirkah
Objek Bagi Hasil	:	Pendapatan sewa objek Syirkah/ Syirkah object rental income	:	Revenue Share
Nisbah Bagi Hasil	:	Multinisbah	:	Profit Sharing Ratio
Jangka Waktu	:	20-11-2019 s/d 23-02-2025	:	Period of time

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

The Loan facility is guaranteed with:

- Tanah dan Bangunan (Ruko) yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 51C, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta HGB No. 01579 dan No. 01560 Seluas 40m² dan 21m² atas nama Entitas dengan Hak Tanggungan Rp8.114.754.099 dan Rp7.785.058.985 yang berlaku sampai dengan 29 Oktober 2040 dan 21 September 2029.
 - Tanah dan Bangunan (Ruko) yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 51E, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta HGB No. 01558 Seluas 81m² atas nama Entitas dengan Hak Tanggungan yang berlaku sampai dengan 29 Oktober 2040.
 - Tanah dan Bangunan (Ruko) yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 51D, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta HGB No. 01559 Seluas 61m² atas nama Entitas dengan Hak Tanggungan yang berlaku sampai dengan 29 Oktober 2040.
 - Tanah dan Bangunan (Ruko) yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 52A, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta HGB No. 01552 Seluas 59m² atas nama Entitas dengan Hak Tanggungan yang berlaku sampai dengan 21 September 2029.
 - Tanah dan Bangunan (Ruko) yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 52B, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta HGB No. 01553 Seluas 59m² atas nama Entitas dengan Hak Tanggungan yang berlaku sampai dengan 21 September 2029.
 - Personal guarantee dari Bapak Alex Widjaja (pemegang saham).
- Land and Buildings (Ruko) located at Jalan Sultan Hasanuddin No. 51C, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, DKI Jakarta HGB No. 01579 and No. 01560 Covering an area of 40m² and 21m² in the name of the entity with Mortgage Rights of Rp8,114,754,099 and Rp7,785,058,985 valid until 29 October 2040 and September 21, 2029.
 - Land and Buildings (Ruko) located at Jalan Sultan Hasanuddin No. 51E, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta HGB No. 01558 Covering an area of 81m² in the name of the Entity with Mortgage Rights valid until October 29, 2040.
 - Land and Buildings (Ruko) located at Jalan Sultan Hasanuddin No. 51D, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta HGB No. 01559 Covering an area of 61m² in the name of the Entity with Mortgage Rights valid until October 29, 2040.
 - Land and Buildings (Ruko) located at Jalan Sultan Hasanuddin No. 52A, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta HGB No. 01552 Covering an area of 59m² in the name of the Entity with Mortgage Rights valid until September 21, 2029.
 - Land and Buildings (Ruko) located at Jalan Sultan Hasanuddin No. 52B, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta HGB No. 01553 Covering an area of 59m² in the name of the Entity with Mortgage Rights valid until September 21, 2029.
 - Personal guarantee from Mr Alex Widjaja (a shareholder).

14. UTANG BANK - Lanjutan

PT Bank Panin Dubai Svriah Tbk - Lanjutan

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

Seluruh jaminan diikat secara *cross collateral dan cross default* terhadap seluruh fasilitas dan paripasu antara jaminan Entitas dengan PT Permata Indo Makmur (pihak berelasi).

Tanpa persetujuan tertulis Bank, Entitas tidak diperbolehkan untuk:

1. Menggubah Anggaran Dasar terutama struktur permodalan/ susunan pengurus/ struktur pemegang saham/ kepemilikan usaha Nasabah.
2. Menarik kembali modal yang telah disetor atau yang telah tercatat dalam laporan keuangan pada saat pengajuan pembiayaan.
3. Menjaminkan kembali asset yang telah dijaminkan di PDSB kepada pihak lain.
4. Membagikan atau membayarkan dividen/ keuntungan.
5. Melakukan penjualan, menjaminkan dan mentransfer sebagian atau seluruh asset Entitas kecuali dalam hal transaksi bisnis yang normal/ wajar, asset yang menjadi barang dagangan & bukan merupakan jaminan Nasabah di PDSB.
6. Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari Bank maupun pihak ketiga lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali dalam rangka transaksi harian yang wajar.
7. Melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, dan penjualan atau pemindahtanganan sebagian besar asset atau saham milik nasabah.
8. Mengubah sifat atau luas lingkup usaha nasabah.
9. Mengikatkan diri sebagai penjaminan pemegang saham/ pemilik usaha.
10. Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham/ pemilik usaha.
11. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah pembiayaan nasabah kepada PDSB.
12. Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan.
13. Membubarkan badan hukum/ usaha nasabah atau meminta dinyatakan pailit kepada pihak yang berwenang.
14. Menyewakan obyek pembiayaan dan atau obyek jaminan pembiayaan kepada pihak lain.

14. BANK LOAN – Continued

PT Bank Panin Dubai Svriah Tbk - Continued

The Loan facility is guaranteed with:

All guarantees are bounded by *cross collateral and cross default* againtsall facility and related to Entity;s collateral with PT Permata Indo Makmur (acrelated party).

Subject to written approval from the Bank, the Entity is not allowed to:

1. Change the Article of Association mainly to capital structure/ compositition of the board/ shareholder structure/ business ownership.
2. Withdraw all of paid up capital or which has been recorded in the financial statements by the time financing proposal.
3. Give assets that have been pladged as collateral to PDSB to other parties.
4. Distributing or paying dividends / profits.
5. Selling, guaranteeing and transferring part or all of the Entity's assets except in the case of normal / reasonable business transactions, merchandise assets and are not guaranteed to PDSB.
6. Obtain financing or loan facilities from the Bank or other third parties, both directly and indirectly, except in the context of a reasonable daily transaction.
7. Merge, consolidate, acquire and sell or transfer most of the assets or shares owned by the debtor.
8. Change the nature or extent of the debtor's business scope.
9. Bind itself as guarant or of shareholders / business owners.
10. Paying the loan of shareholder / business owner.
11. Doing business expansion or narrowing that can affect the payment of the debtor financing to PDSB.
12. Carry out other investments and / or run a business that has no relationship with the business that is being run.
13. Dissolve the debtor's legal entity / business or request for bankruptcy from the authorized party.
14. Lease financing objects and / or financing collateral objects to other parties.

15. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

15. FINANCE LEASE PAYABLE

	2020	2019	
PT Maybank Indonesia Finance	805.864.256	1.570.457.436	PT Maybank Indonesia Finance
Jumlah jangka panjang	805.864.256	1.570.457.436	Total long term
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun	(736.139.023)	(764.593.181)	Less current maturity within 1 (one) year:
Bagian jangka panjang	69.725.233	805.864.255	Long Term Portion

PT Maybank Indonesia Finance

PT Maybank Indonesia Finance

- a. Berdasarkan Surat Perjanjian No. 51701182033 tanggal 7 Desember 2018, Entitas telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT Maybank Indonesia Finance atas kendaraan bermotor sebesar Rp2.388.672.000, dengan jangka waktu 36 bulan sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan 10 November 2021.
- b. Berdasarkan Surat Perjanjian No. 51701190515 tanggal 29 Maret 2019, Entitas telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT Maybank Indonesia Finance atas kendaraan bermotor sebesar Rp237.072.000, dengan jangka waktu 48 bulan sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 1 Maret 2023.

- a. Based on Letter of Agreement No. 51701182033 dated December 7, 2018, the Entity has entered into a Financing Agreement with PT Maybank Indonesia Finance for motor vehicle with in amount Rp2,388,672,000 with time periode of 36 months since December 10, 2018 until November 10, 2021.
- b. Based on Letter of Agreement No. 51701190515 dated March 29, 2019, the Entity has entered into a Financing Agreement with PT Maybank Indonesia Finance for motor vehicle with in amount Rp237,072,000 with time period of 48 months since April 1, 2019 until March 1, 2023.

PT Mizuho Balimor Finance

PT Mizuho Balimor Finance

Berdasarkan Surat Perjanjian No. 045319/CV16/000302 tanggal 28 Januari 2016, Entitas telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT Mizuho Balimor Finance atas kendaraan bermotor sebesar Rp159.888.000, dengan jangka waktu 48 bulan sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 22 Desember 2019 dengan tingkat suku bunga 6,70% per tahun.

Based on Letter of Agreement No. 045319/CV16/000302 dated January 28, 2016, the Entity has entered into a Financing Agreement with PT Mizuho Balimor Finance, for motor vehicle with in amount of Rp159,888,000 with time period of 48 months since January 22, 2016 until December 22, 2019 with interest rate of 6,70% per annum.

16. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA KARYAWAN

16. LIABILITY FOR POST EMPLOYEES' BENEFITS

Entitas mencatat liabilitas imbalan pasca kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh PT Kappa Konsultan Utama, yang dalam laporannya tertanggal 22 Februari 2021 dan 6 Maret 2020, menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The Entity recorded a liability for post employees' benefits for the period 2020 and 2019 based on independent actuarial calculations performed by PT Kappa Konsultan Utama, whose report dated February 22, 2021 and March 6, 2020, using the "Projected Unit Credit" method and the following assumptions:

	2020	2019	
Tingkat diskonto	6,82%	8,20%	Annual discount rate
Tingkat Kenaikan Gaji jangka Panjang	5%	5%	Annual rate salary increase
Tingkat pengunduran diri	6%	6%	Resignation Rate
Tingkat cacat total permanent	10% TMI IV	10% TMI 2011	Mortality rate
Usia pensiun	60 tahun/year	60 tahun/year	Retirement age

16. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA KARYAWAN – Lanjutan

Tabel berikut menyajikan komponen liabilitas imbalan pasca kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Mutasi liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Saldo awal	336.632.000	254.391.000	<i>Beginning balanced</i>
Perubahan yang dibebankan ke laporan laba rugi	74.707.000	82.241.000	<i>Changes are charged to statement profit loss</i>
Pengukuran kembali laba (rugi) yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	(29.647.000)	129.513.000	<i>Remeasurement profit (Loss) charged to other comprehensive income</i>
Saldo akhir	381.692.000	466.145.000	<i>Balance at End of Year</i>

Jumlah beban imbalan pasca-kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Diakui pada laba rugi			<i>Recognized in profit or loss</i>
Beban jasa kini	39.560.000	56.936.000	<i>Current Service Cost</i>
Beban jasa lalu	35.147.000	25.305.000	<i>Past service cost</i>
Sub Jumlah	74.707.000	82.241.000	<i>Sub total</i>
Diakui pada penghasilan komprehensif lain Laba (rugi) neto aktuarial -tahun berjalan	(159.160.000)	75.306.000	<i>Amount recognized in other comprehensive income</i>
Jumlah	(84.453.000)	157.547.000	<i>Total</i>

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Saldo awal	129.513.000	54.207.000	<i>Beginning balanced</i>
Pengukuran kembali laba (rugi) yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	(159.160.000)	75.306.000	<i>Remeasurement profit (Loss) charged to other comprehensive income</i>
Saldo akhir	(29.647.000)	129.513.000	<i>Balance at End of Year</i>

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan kematian. Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan perubahan asumsi masing-masing yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, sementara semua asumsi lain diasumsikan konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefits liability are discount rate, expected salary increase and mortality. The sensitivity analysis below has been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

16. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA KARYAWAN – Lanjutan

16. LIABILITY FOR POST EMPLOYEES' BENEFITS - Continued

Analisa Sensitivitas

Sensitivity Analysis

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasca-kerja terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the post-employment benefit obligations to changes in actuarial assumptions is as follows:

	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Nilai Kini Liabilitas		
		Imbalan Kerja / Present Value of Liabilities Employee Benefits	Imbalan Jasa Kini / Rewards Current Services	
31 Desember 2020				December 31, 2020
Tingkat Diskonto	Kenaikan 1%/Increase 1%	343.097.000	35.532.000	Discount Rate
	Penurunan 1%/Decrease 1%	426.693.000	44.303.000	
Tingkat Kenaikan Gaji	Kenaikan 1%/Increase 1%	427.070.000	44.343.000	Salary Increment Rate
	Penurunan 1%/Decrease 1%	342.129.000	35.431.000	
31 Desember 2019				December 31, 2019
Tingkat Diskonto	Kenaikan 1%/Increase 1%	421.942.000	51.583.000	Discount Rate
	Penurunan 1%/Decrease 1%	517.208.000	63.167.000	
Tingkat Kenaikan Gaji	Kenaikan 1%/Increase 1%	518.007.000	63.264.000	Salary Increment Rate
	Penurunan 1%/Decrease 1%	420.543.000	51.415.000	

17. MODAL SAHAM

17. CAPITAL STOCK

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Akta Notaris Nomor 65 Tanggal 13 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, SH., M.HUM., M.KN, berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0032845.AH.01.11. TAHUN 2020 pada tanggal 18 Pebruari 2020 yang isinya meyetujui tentang peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor.

The Articles of Association of the Entity have been amended several times, most recently as stated in the Deed No. 65 dated February 13, 2020 Christina Dwi Utami, SH., M.HUM., M.KN Notary in This deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0032845.AH.01.11. TAHUN 2020 dated February 18, 2020- which agree on the increase in authorized capital, issued and paid up capital.

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

The composition of shareholders as at December 31, 2020

31 Desember 2020/December 31, 2020			
Pemegang saham/ Shareholder	Jumlah saham/ Amount share	Persentase kepemilikan (%) percentage ownership (%)	Jumlah modal saham/ Total amount of share
Alex Widjaja	792.000.100	79%	19.800.002.500
Kathrin Widjaja	8.000.000	1%	200.000.000
Masyarakat/Public	199.999.905	20%	4.999.997.625
Jumlah/Total	1.000.000.005	100%	25.000.000.125

17. MODAL SAHAM - Lanjutan

17. CAPITAL STOCK - Continued

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut: *The composition of shareholders as at December 31, 2019*

31 Desember 2019/December 31, 2019			
Pemegang saham/ <i>Shareholders</i>	Jumlah saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase kepemilikan (%) <i>Percentage ownership (%)</i>	Jumlah modal saham/ <i>Total amount</i>
Alex Widjaja	792.000.000	99%	19.800.000.000
Kathrin Widjaja	8.000.000	1%	200.000.000
Jumlah/ <i>Total</i>	800.000.000	100%	20.000.000.000

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR

18. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	2020	2019	
Penawaran Umum Saham Perdana	30.000.000.000	-	<i>Initial Public Offering</i>
Biaya emisi	(3.670.891.796)	-	<i>Share issuance cost</i>
Penerbitan saham baru melalui pelaksanaan waran	(125)	-	<i>Issuance of new shares through warrant exercised</i>
Jumlah	26.329.108.079	-	<i>Total</i>

19. PENDAPATAN

19. REVENUE

	2020	2019	
Konstruksi			<i>Constructions:</i>
Infrastruktur	20.000.000.000	24.000.000.000	<i>Infrastructure</i>
Bangunan	5.162.832.800	17.432.210.341	<i>Building</i>
Sewa bangunan	213.750.000	-	<i>Building rent</i>
Jumlah	25.376.582.800	41.432.210.341	<i>Total</i>

Rincian pemberi kerja dengan nilai kontribusi pendapatan melebihi 10% dari pendapatan usaha tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of customers with income contribution values exceeding 10% of operating revenues for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
Pihak ketiga			<i>Thrid parties</i>
PT The Master Steel	20.000.000.000	24.000.000.000	<i>PT The Master Steel</i>
PT Primafood International	2.885.570.000	-	<i>PT Bina Sawit Makmur</i>

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN

20. COST OF GOODS SOLD

	2020	2019	
Infrastruktur	10.208.190.450	12.738.199.840	<i>Infrastructure</i>
Bangunan	4.113.186.765	10.991.039.147	<i>Building</i>
Jumlah	<u>14.321.377.215</u>	<u>23.729.238.987</u>	<i>Total</i>

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2020	2019	
Gaji dan tunjangan	2.099.998.999	1.576.426.790	<i>Salaries and allowance</i>
Penyusutan	1.164.412.367	708.856.412	<i>Depreciations</i>
Jasa profesional	417.337.000	454.088.182	<i>Professional fee</i>
Keamanan	298.875.000	253.691.469	<i>Security</i>
Perlengkapan kantor	284.084.513	291.510.794	<i>Office equipment</i>
Telepon, air dan listrik	174.975.243	296.997.449	<i>Telephone, water and electricity</i>
Perijinan dan lisensi	128.585.891	237.717.287	<i>Permits and licenses</i>
Perbaikan dan pemeliharaan	110.685.110	234.719.642	<i>Repair and maintenance</i>
Imbalan kerja	74.707.000	82.241.000	<i>Employees benefit</i>
Asuransi	64.518.903	214.757.526	<i>Insurance</i>
Jamuan	62.932.671	263.636.893	<i>Entertainment</i>
Transportasi	60.688.700	60.431.000	<i>Transportations</i>
Pajak	44.849.035	-	<i>Tax</i>
Sumbangan	27.500.000	280.000.000	<i>Donations</i>
Sewa	-	531.600.000	<i>Rent</i>
Legal Consultant	-	2.000.000	<i>Legal Consultant</i>
Lain-lain	-	290.893	<i>Others</i>
Jumlah	<u>5.014.150.432</u>	<u>5.488.965.337</u>	<i>Total</i>

22. PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA

22. OTHER INCOME (EXPENSES)

	2020	2019	
Rugi penjualan aset tetap	-	265.341.033	<i>Loss on sales of property, plant and equipment</i>
Lain-lain	(95.686.803)	(28.332.139)	<i>Others</i>
Jumlah	<u>(95.686.803)</u>	<u>237.008.894</u>	<i>Total</i>

23. PENDAPATAN KEUANGAN

23. FINANCE INCOME

	2020	2019	
Pendapatan bunga	261.565.887	30.658.106	<i>Interest income</i>

24. BEBAN KEUANGAN

24. FINANCE EXPENSES

	2020	2019	
Administrasi bank	400.448.445	782.736.987	<i>Bank administration</i>
Beban bunga:			<i>Interest expense:</i>
Pinjaman bank	9.042.350.496	8.154.405.198	<i>Bank loans</i>
Sewa pembiayaan	90.898.820	209.729.681	<i>finance lease</i>
Jumlah	9.533.697.761	9.146.871.866	<i>Total</i>

25. LABA PER SAHAM DASAR

25. EARNINGS PER SHARE

	2020	2019	
Laba yang digunakan dalam perhitungan	(4.045.224.902)	1.587.817.053	<i>Earnings Used in Calculation</i>
Jumlah rata-rata tertimbang saham	976.111.111	133.447.188	<i>Weighted Average Number of Shares</i>
Laba bersih per saham dasar	(4)	12	<i>Earnings per Share</i>

26. TRANSAKSI PIHAK BERELASI

26. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usahanya, Entitas mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi penjualan, pembelian dan transaksi keuangan lainnya.

In the normal course of business, the Entity entered into transactions with related parties, mainly covering sale transactions, purchases and other financial transactions.

a. Sifat hubungan dan transaksi

a. The nature of relationships and transactions

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Entitas, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

The following table is a summary of related parties that have transaction with the Entity, including the nature of the relationship and the nature of the transaction:

Pihak berelasi/ Related Parties	Sifat hubungan/ Nature of Relationship	Sifat transaksi / Nature of Transaction
Alex Widjaja	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>
PT Mastertama Adhi Propertindo	Kesamaan manajemen kunci / <i>same key Management</i>	Jasa konstruksi/ <i>construction services</i>
PT Permata Indo Makmur	Kesamaan manajemen kunci / <i>same key Management</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>

26. TRANSAKSI PIHAK BERELASI - Lanjutan

26. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES – Continued

b. Rincian saldo piutang/utang pihak berelasi

b. Details of accounts receivable/payable with related parties

Entitas mempunyai transaksi di luar usaha dengan pihak berelasi seperti diungkapkan dibawah ini:

The Entity has transactions outside the business with related parties as disclosed below:

Piutang Usaha

Trade receivable

	2020	2019	
PT Mastertama Adhi Propertindo	57.796.406	1.194.077.474	PT Mastertama Adhi Propertindo

Piutang Lain-Lain

Other receivable

	2020	2019	
Alex Widjaja	1.140.225.000	-	Alex Widjaja
PT Permata Indo Makmur	-	1.582.893.310	PT Permata Indo Makmur
Jumlah	1.140.225.000	1.582.893.310	Total

Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normal Entitas yang merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi.

Other receivables are receivables that arise and transactions outside the normal course of business of the Entity which are loans given to related parties.

piutang lain-lain pihak berelasi tidak dikenakan jaminan dan bunga.

Other receivables-related parties are without interest and collateral.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak berelasi.

Management believes that there is no significantly concentrated risk on receivables to related parties.

Tidak ada pencadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain karena manajemen berpendapat seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

There is no provision for impairment of other receivables because management believes that all other receivables are collectible.

Tidak ada piutang lain-lain yang dijadikan jaminan kredit.

There are no other receivables which are used as collateral.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Entitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp666.960.000 dan Rp1.020.500.000.

Remuneration of the Entity's Board of Commissioners and Directors for the year ended on December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp666,960,000 and Rp1,020,500,000, respectively.

Beban sewa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dialokasikan ke beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Nihil dan Rp531.600.000 (catatan 20).

Rental expenses for the years ended December 31, 2020 and 2019 are allocated to general and administrative expenses amounting to Nihil and Rp531,600,000 respectively (note 20).

27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan

Pengelolaan Modal

Kebijakan pengelolaan modal Entitas adalah untuk memastikan bahwa rasio modal selalu dalam keadaan kondisi sehat agar dapat mendukung kinerja usaha dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham.

Entitas mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya.

Entitas secara hati-hati (*prudent*) melakukan diversifikasi sumber permodalan untuk mengantisipasi rencana strategis jangka panjang dan mengalokasikan modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki potensi untuk memberikan profil pengembalian risiko (*risk return*) yang optimal, termasuk penempatan pada entitas asosiasi dalam rangka memenuhi ekspektasi pemegang kepentingan (*stakeholder*). Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*).

Pada tanggal 31 Desember 2020, akun-akun Entitas yang membentuk rasio utang terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

Utang jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun/ <i>Long-term debt due within one year</i>	69.689.655.173
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun <i>Long-term debt net of current portion due within one year</i>	<u>49.095.951.971</u>
Jumlah Utang/ <i>Amount of Debt</i>	118.785.607.144
Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	<u><u>49.917.690.089</u></u>
Rasio Utang Terhadap Ekuitas/ <i>Debt to Equity Ratio</i>	238%

Manajemen Risiko Keuangan

Entitas dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Entitas secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan Entitas. Manajemen meriviu dan menyetujui kebijakan untuk mengendalikan setiap risiko, yang diringkas dibawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar dari semua instrumen keuangan.

27. POLICY AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES - Continued

Capital Management

The Entity's capital management policy is to ensure that the capital ratio is always in a state of good health in order to support business performance and maximize value for shareholders.

The Entity manages its capital structure and makes adjustments in light of changes in economic conditions and the risk characteristics of the business.

The Entity carefully (*prudent*) diversifies sources of capital in anticipation of a long-term strategic plans and allocates capital more efficiently in the business segment that has the potential to provide optimal risk return profile (*risk-return*), including the placement of the associate entities in order to meet expectations of stakeholders (*stakeholders*). No change in the objectives, policies and processes and the same as in previous years.

Management monitors capital using some measure of financial leverage as debt-to-equity ratio and debt service ratio.

As of December 31, 2020, the accounts that make up the Entity's debt to equity ratio are as follows:

Financial Risk Management

The Entity is influenced by various financial risks, including credit risk, foreign currency exchange risk, interest rate risk, liquidity risk. The purpose of risk management the Entity as a whole is to effectively control these risks and minimize the adverse effects that can occur to the financial performance of the Entity. Management reviews and approves policies to control any risks, which are summarized below, and also monitors the market price risk of all financial instruments.

**27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN - Lanjutan**

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Entitas gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Entitas. Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha yang diberikan kepada pelanggan.

Instrumen keuangan Entitas yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Rincian umur piutang usaha dapat dilihat pada Catatan 6 dalam laporan keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2020 piutang usaha entitas tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

Entitas mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Entitas memiliki eksposur terhadap fluktuasi tingkat suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas.

Eksposur Entitas terhadap risiko tingkat suku bunga terutama sehubungan dengan pinjaman serta aset dan liabilitas berbunga. Kebijakan Entitas adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan.

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Entitas memiliki pinjaman jangka pendek dengan bunga mengambang. Tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan terjadi secara tiba-tiba dapat berpengaruh terhadap menurunnya laba Entitas.

Analisis Sensitivitas Untuk Risiko Tingkat Suku Bunga

Sensitivitas analisis di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk baik derivatif maupun instrumen non-derivatif pada akhir periode pelaporan dan perubahan yang ditetapkan berlangsung di awal tahun pelaporan keuangan dan terjadi konstan sepanjang periode pelaporan dalam kasus instrumen yang memiliki tingkat bunga mengambang.

**27. POLICY AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES - Continued**

Credit Risk

Credit risk is the risk of financial losses incurred if the Entity's customer fails to meet the contractual obligations to the Entity. Credit risk mainly from trade receivables provided to the customers.

Entity's financial instruments that have the potential for credit risk consist of cash and cash equivalents, trade receivables, retention receivables, gross receivables and other receivables. The maximum amount of credit risk exposure is equal to the carrying value of these accounts.

Details of the age of trade receivables can be seen in Notes 6 in the financial statements. As of December 31, 2020, the entity's trade receivables are not concentrated in certain customers.

The entity manages credit risk by setting limits on the amount of risk that is acceptable for each customer and being more selective in the selection of banks and financial institutions, i.e., only reputable and reputable banks and financial institutions are chosen.

Interest Rate Risk

The Entity has exposure to fluctuations in prevailing interest rates either fair value risk or cash flow risk.

The Entity's exposure to interest rate risk primarily with respect to loans and interest-bearing assets and liabilities. The Entity's policy is to get the interest rate at most favorable.

Cash flow interest rate risk is the risk that future cash flows from a financial instrument fluctuate because of changes in market interest rates. The entity has a short-term loan with a floating interest rate. Interest rates that are high enough and occur suddenly can affect the decline in profit of the Entity.

Sensitivity Analysis for Interest Rate Risk

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period and the stipulated change taking place at the beginning of the financial year and held constant throughout the reporting period in the case of instruments that have floating rates.

27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan

Analisis Sensitivitas Untuk Risiko Tingkat Suku Bunga

Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada manajemen kunci dan mewakili penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam suku bunga.

Jika suku bunga telah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba Entitas dan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 akan meningkat (menurun) sebesar Rp584.486.777 dan Rp555.880.565.

Hal ini terutama disebabkan eksposur pinjaman yang diterima dan pinjaman yang diberikan Entitas dengan suku bunga variabel.

Rasio Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Entitas tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati (prudent) termasuk mengatur kas dan setara kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu.

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memonitor pinjaman dan sumber pendanaan dan menjaga saldo kecukupan kas serta memastikan tersedianya pendanaan dari sejumlah fasilitas kredit yang mengikat, dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Entitas mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang andal.

28. INSTRUMEN KEUANGAN

Aset keuangan Entitas meliputi kas dan setara kas, piutang usaha - neto dan piutang lain-lain - neto yang timbul dari kegiatan usahanya. Liabilitas keuangan Entitas meliputi pinjaman jangka pendek, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang tujuan utamanya untuk pembiayaan kegiatan usaha.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Entitas yang dinyatakan dalam posisi keuangan 31 Desember 2020 dan 2019:

27. POLICY AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES - Continued

Sensitivity Analysis for Interest Rate Risk

A 50-basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

If interest rates had been 50 basis points higher or lower and all other variables were held constant, the Entity's profit and equity for the year ended December 31, 2020 and 2019 would increase (decrease) by Rp584,486,777 and Rp555,880,565 respectively.

This is mainly attributable to the Entity's exposure to interest rates on its variable rate of debt and borrowings.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Entity cannot meet obligations as they fall due. Prudent liquidity risk management includes managing sufficient cash and cash equivalents to support the business activities in a timely manner.

Liquidity risk management is conducted, among others by monitoring loans and funding sources, maintaining sufficient cash balances and marketable securities as well as ensuring the availability of funding from a number of binding credit facilities, and the readiness to maintain its market position. The Entity maintains its ability to binding finance from a reliable lender.

28. FINANCIAL INSTRUMENTS

The Entity's financial assets include cash and cash equivalents trade receivables - net and other receivables - net arising from its business activities. The Entity's financial liabilities include accrued liabilities, long-term loans due within one year and long-term debt net of current maturities of one year for the primary purpose financing activities.

The table below summarizes the carrying amounts and estimated fair values of financial instruments of the Entity that are stated in the financial position December 31, 2020 and 2019:

28. INSTRUMEN KEUANGAN - Lanjutan

28. FINANCIAL INSTRUMENTS - Continued

	Nilai tercatat/ <i>Carrying Value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair Value</i>	
31 Desember 2020			Desember 31, 2020
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	931.086.534	931.086.534	<i>Cash and Cash Equivalents</i>
Piutang usaha	1.253.199.708	1.253.199.708	<i>Trade Accounts Receivable</i>
Piutang lain-lain	1.313.892.072	1.313.892.072	<i>Other Receivable</i>
Jumlah	<u>3.498.178.314</u>	<u>3.498.178.314</u>	<i>Total</i>
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank	116.897.355.495	116.897.355.495	<i>Bank loans</i>
Biaya yang masih harus dibayar	247.124.535	247.124.535	<i>Accrued expenses</i>
Utang pembiayaan konsumen	805.864.256	805.864.256	<i>Finance Lease Liabilities</i>
Jumlah	<u>117.950.344.286</u>	<u>117.950.344.286</u>	<i>Total</i>
31 Desember 2019			Desember 31, 2019
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	1.698.147.338	1.698.147.338	<i>Cash and Cash Equivalents</i>
Piutang usaha	8.957.099.550	8.957.099.550	<i>Trade Accounts Receivable</i>
Piutang lain-lain	1.702.020.000	1.702.020.000	<i>Other Receivable</i>
Jumlah	<u>12.357.266.888</u>	<u>12.357.266.888</u>	<i>Total</i>
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank	111.176.112.949	111.176.112.949	<i>Bank loans</i>
Utang pembiayaan konsumen	1.570.457.436	1.570.457.436	<i>Finance Lease Liabilities</i>
Jumlah	<u>112.746.570.385</u>	<u>112.746.570.385</u>	<i>Total</i>

Berdasarkan PSAK 60 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" dan PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar" terdapat tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (level 1);
- input selain harga kuotasi yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Nilai wajar untuk instrumen yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Entitas untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini masuk dalam level 1.

Based on PSAK 60 (Revised 2014) "Financial Instruments: Disclosures" and PSAK 68 "Fair Value Measurement", fair value hierarchy levels are as follows:

- quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);
- inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (e.g. prices) or indirectly (e.g. derivation from prices) (level 2); and
- inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

The fair value of instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used by the Entity for financial assets is the offering price (*bid price*), while for financial liabilities using the selling price (*ask price*). These financial instruments are included in level 1.

28. INSTRUMEN KEUANGAN - Lanjutan

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin tidak mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam level 2, antara lain dengan mendiskontokan arus kas masa depan menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, kas yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar) sangat mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk kedalam level 3.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan disajikan dalam jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi kini antara pihak-pihak yang berkeinginan (“willing parties”), bukan dalam penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

1. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha -neto, piutang non usaha – neto

Seluruh aset keuangan di atas merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas (12) bulan sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajar dari aset keuangan tersebut.

2. Pinjaman bank jangka pendek, Pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga variabel dan tetap yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai tercatat kewajiban keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.

28. FINANCIAL INSTRUMENTS - Continued

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. The technique uses observable market data as long as available, and as little as possible does not refer to an estimate. If all significant inputs in the fair value are observable, these financial instruments are included in level 2, among others by discounting future cash flows using current interest rates from observable current market transactions for the instrument with terms, credit risk and the same maturity.

Short-term financial instruments with maturities of one year or less (cash and cash equivalents, accounts receivable, restricted cash, short-term investments, accounts payable, debt and other accrued expenses) are very close to the carrying amount since the impact of discounting were not significant.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, the instruments are included in level 3.

The fair value of financial assets and liabilities are presented in the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between willing parties, not in the sale due to financial difficulties or a forced liquidation.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value for each class of financial instruments that are practical to estimate that value:

1. *Cash and cash equivalents, accounts receivable-net, other receivables - net and guarantee deposit*

The above financial assets are short term financial assets that will expire within twelve (12) months so that the carrying amount of the financial assets have reflected the fair value of the financial assets.

2. *Short-term, Long-term debt due within one year and long-term debt - net of current portion due within one year*

The above financial liability is loan that has variable interest rates and fixed interest rate adjusted to the movement of the market so that the carrying amount of the financial liability is approaching fair value.

29. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS

Pada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Entitas melakukan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019	
Penambahan aset tetap melalui sewa pembiayaan	-	197.661.750	<i>Addition on property, plant and equipment through on finance lease</i>
Jumlah	-	197.661.750	<i>Total</i>

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan:

29. ADDITIONAL DISCLOSURES FOR NONCAS INVESTING ACTIVITIES AND FINANCING ACTIVITIES

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Entity entered into investment and financing transactions that did not affect cash and cash equivalents and were not included in the cash flow statement with the following details:

The table below shows the reconciliation of liabilities arising from funding:

	1 Januari 2020 <i>January 1, 2020</i>	Arus Kas <i>Cash flow</i>	Transaksi non kas <i>Trancation Non cash</i>	31 Desember 2020 <i>December 31, 2020</i>	
Utang bank jangka pendek	53.070.894.454	11.043.378.316	-	64.114.272.770	<i>Bank loan Short-term:</i>
Utang pembiayaan konsumen	1.570.457.436	(764.593.180)	-	805.864.256	<i>Finance lease payable</i>
Utang bank jangka panjang	58.105.218.495	(5.322.135.770)	-	52.783.082.725	<i>Bank loan long - term:</i>
Setoran modal	20.000.000.000	5.000.000.000	125	25.000.000.125	<i>Capital stock</i>
Tambahan modal disetor	-	26.329.108.204	(125)	26.329.108.079	<i>Additional paid-in capital</i>
Piutang / Utang Pihak berelasi	(2.776.970.784)	1.578.949.378	-	(1.198.021.406)	<i>receivable/payable related parties</i>
			Transaksi non kas <i>Trancation Non cash</i>		
	1 Januari 2019 <i>January 1, 2019</i>	Arus Kas <i>Cash flow</i>	31 Desember 2019 <i>December 31, 2019</i>		
Utang bank jangka pendek	42.111.602.460	10.959.291.994	-	53.070.894.454	<i>Bank loan Short-term:</i>
Utang pembiayaan konsumen	1.983.568.353	(610.772.667)	197.661.750	1.570.457.436	<i>Finance lease payable</i>
Utang bank jangka panjang	48.087.091.614	10.018.126.881	-	58.105.218.495	<i>Bank loan long-term:</i>
Piutang / Utang Pihak berelasi	(4.068.615.380)	1.291.644.596	-	(2.776.970.784)	<i>receivable/payable related parties</i>

30. INFORMASI SEGMENT

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh pejabat eksekutif tertinggi yang digunakan untuk mengambil keputusan strategis.

Maksud dan tujuan Entitas antara lain berusaha dalam bidang produksi, pemasaran dan distribusi produk. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Entitas menjalankan usahanya secara terintegrasi.

Entitas melaporkan segmen-segmen berdasarkan geografi dari pelaksanaan jasa konstruksi bangunan dan infrastruktur.

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen geografi:

30. SEGMENT REPORTING

Management has determined the operating segments based on reports that reviewed by top executives used to take strategic decisions.

The purpose and objectives of the Entity, among others, do business in the production, marketing and distribution of products. To achieve the above purpose and objectives, the Entity carries on business in an integrated effort.

The entity reports geographic segments from the implementation of building and infrastructure construction services.

The following is segment information based on geographic segments:

30. INFORMASI SEGMENT - Lanjutan

30. SEGMENT REPORTING - Continued

	31 Desember 2020/December 31, 2020				
	Sumatra	Kalimantan	Jawa	Jumlah	
Pendapatan:					<i>Revenue</i>
Konstruksi:					<i>Constructions:</i>
Bangunan	96.120.000	266.314.089	4.800.398.711	5.162.832.800	<i>Building</i>
Infrastruktur	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000	<i>Infrastructure</i>
Sewa bangunan	-	-	213.750.000	213.750.000	<i>Building rent</i>
Beban pokok pendapatan					<i>Cost of goods sold</i>
Bangunan	71.250.000	197.890.000	3.844.046.765	4.113.186.765	<i>Building</i>
Infrastruktur	-	-	10.208.190.450	10.208.190.450	<i>Infrastructure</i>
Hasil segmen	<u>24.870.000</u>	<u>68.424.089</u>	<u>10.961.911.496</u>	<u>11.055.205.585</u>	<i>Segment income</i>
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	(5.014.150.432)	<i>Operating expenses that cannot be allocated</i>
Pendapatan lainnya yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	95.686.803	<i>Other income that cannot be allocated</i>
Pajak final yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	(909.834.984)	<i>Tax final that cannot be allocated</i>
Laba Usaha	<u>24.870.000</u>	<u>68.424.089</u>	<u>10.961.911.496</u>	<u>5.226.906.972</u>	<i>Operating income</i>
Pendapatan keuangan yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	261.565.887	<i>Financial income that cannot be allocated</i>
Beban keuangan yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	(9.533.697.761)	<i>Financial charges that cannot be allocated</i>
Laba tahun berjalan	<u>24.870.000</u>	<u>68.424.089</u>	<u>10.961.911.496</u>	<u>(4.045.224.902)</u>	<i>Income for the year</i>

30. INFORMASI SEGMENT - Lanjutan

30. SEGMENT REPORTING - Continued

	31 Desember 2019/December 31, 2019				
	Palembang	Kalimantan	Jakarta	Jumlah	
Pendapatan:					Revenue
Bangunan	9.242.460.000	5.580.880.612	2.608.869.729	17.432.210.341	Building
Infrastruktur	-	-	24.000.000.000	24.000.000.000	Infrastructure
Beban pokok pendapatan					Cost of goods sold
Bangunan	4.203.168.894	5.092.104.929	1.695.765.324	10.991.039.147	Building
Infrastruktur	-	-	12.738.199.840	12.738.199.840	Infrastructure
Hasil segmen	<u>5.039.291.106</u>	<u>488.775.683</u>	<u>12.174.904.565</u>	<u>17.702.971.354</u>	Segment income
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	(5.488.965.337)	Operating expenses that cannot be allocated
Beban lainnya yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	(237.008.894)	Other expenses that cannot be allocated
Pajak final yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	(1.272.966.310)	Tax final that cannot be allocated
Laba Usaha	<u>5.039.291.106</u>	<u>488.775.683</u>	<u>12.174.904.565</u>	<u>10.704.030.813</u>	Operating income
Pendapatan keuangan yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	30.658.106	Financial income that cannot be allocated
Beban keuangan yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	(9.146.871.866)	Financial charges that cannot be allocated
Laba tahun berjalan	<u><u>5.039.291.106</u></u>	<u><u>488.775.683</u></u>	<u><u>12.174.904.565</u></u>	<u><u>1.587.817.053</u></u>	Income for the year

Berdasarkan Mou No 096/Tama/LG/X-2020 tanggal 27 Oktober 2020 Perusahaan melakukan pendandatanganan MOU Kerjasama dengan PT Primafood International untuk melakukan pekerjaan pembangunan toko retail sebanyak 500 unit di wilayah Sumatra dan Jawa.

Based on Mou No. 096/Tama/LG/X-2020 dated 27 October 2020 The company signed an MOU of cooperation with PT Primafood International to carry out the construction of 500 units of retail stores in Sumatra and Java.

Berdasarkan perjanjian No 021/LTS-LGL/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 Perusahaan melakukan pendandatanganan Kerjasama dengan PT The Master Steel Manufactory untuk melakukan pekerjaan Infrastruktur di TMS II dengan nominal Rp18.000.000.000 dan perbaikan bangunan TMS IV dengan nominal Rp6.000.000.000.

Based on the agreement No. 021/LTS-LGL/III/2021 dated March 1, 2021, the company signed a cooperation agreement with PT The Master Steel Manufactory to carry out infrastructure work in TMS II with a nominal value of Rp18,000,000,000 and repair of the TMS IV building with a nominal value of Rp6,000,000,000.

Berdasarkan perjanjian No 013/BI/TECH-PP/II/2021 tanggal 1 Pebruari 2021 Perusahaan melakukan pendandatanganan Kerjasama dengan PT Belaputera Intiland untuk melakukan pekerjaan Konstruksi Bangunan Ruko Pitaniaga Extension dengan nominal Rp5.850.000.000.

Based on the agreement No. 013/BI/TECH-PP/II/2021 dated February 1, 2021, the Company signed a cooperation agreement with PT Belaputera Intiland to carry out Ruko Pitaniaga Extension Building Construction work with a nominal value of Rp5,850,000,000.

31. HAL LAINNYA

Covid 19

Operasi Entitas telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19. Dampak virus Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak masa depan dari virus Covid-19 terhadap Indonesia dan Entitas masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Entitas.

Meskipun demikian, setelah tanggal laporan keuangan, manajemen Entitas berpendapat bahwa sampai saat ini wabah Covid-19 tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan operasi Entitas.

32. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Entitas bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 14 April 2021.

31. OTHER MATTER

Covid 19

The Entity's operation has been and may continue to be impacted by the outbreak of Covid-19 virus. The effects of Covid-19 virus to the global and Indonesia economy include effects to economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operations. The future effects of the outbreak of Covid-19 virus to Indonesia and its entities are unclear at this time. A significant rise in the number of Covid-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the entity.

Nevertheless, after the financial statements date, management of the Entity is of the opinion that the outbreak of the Covid-19 has no significant impact to the operational activities of the entity's.

32. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Entity's management is responsible for the preparation of financial statements that have been authorized for issue by the Directors on April 14, 2021.